

**ANALISIS KEBIJAKAN KOREA SELATAN TERHADAP
KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-
IN: DUKUNGAN TERHADAP KOEKSISTENSI DAMAI DUA
KOREA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jayabaya

Disusun Oleh:

NADIA SYAFIRA
NIM: 2017350750035



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2021**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA 2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

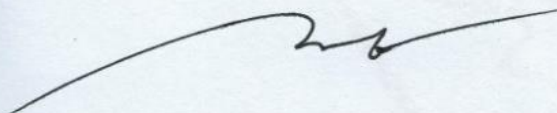
Nama Lengkap : **NADIA SYAFIRA**
NIM : **2017350750035**
Jurusan : **Hubungan Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea
Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In:
Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea**

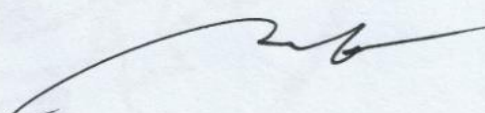
Jakarta, 29 Januari 2021

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,


Dr. Umar Suryadi Bakry


Dr. Umar Suryadi Bakry

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA 2021**

TANDA PENGESAHAN UJIAN SIDANG

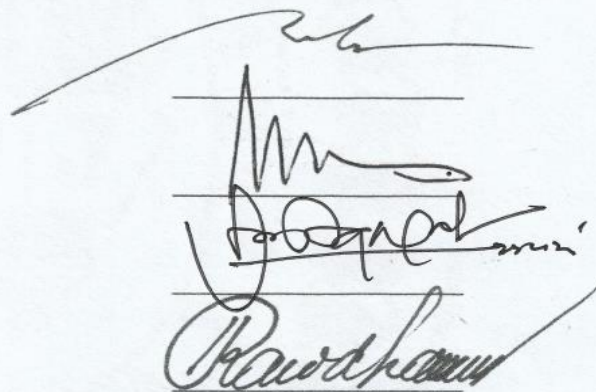
Nama Lengkap : **NADIA SYAFIRA**
NIM : **2017350750035**
Jurusan : **Hubungan Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In: Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea**

Telah diuji-sidangkan dan diberi nilai oleh Tim Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hubungan Internasional berdasarkan SK Yudisium FISIP Universitas Jayabaya No. 06 Tahun 2021, Tanggal 26 Februari 2021

Tim Penguji

Tanda Tangan

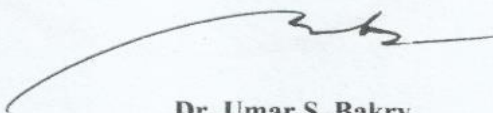
1. **Dr. Umar S. Bakry**
Ketua
2. **Dr. Ambarwati, M.Si.**
Penguji I
3. **Drs. Subarno, M.Hum.**
Penguji II
4. **Drs. Denny Ramdhany, M.Si.**
Penguji III



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A signature that appears to be 'Umar S. Bakry'. 2. A signature that appears to be 'Ambarwati'. 3. A signature that appears to be 'Denny Ramdhany'.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2021

Ketua Tim Ujian Sidang



Dr. Umar S. Bakry

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, bukan dibuat oleh pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 3 Februari 2021
Yang membuat pernyataan,



NADIA SYAFIRA
NIM: 2017350750035

HALAMAN MOTTO

“Penghargaan tertinggi dari kerja keras bukanlah pada apa yang kamu hasilkan melainkan bagaimana kamu berkembang karenanya.”

~ Unknown

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

~ Tan Malaka

“There are two primary choices in life; to accept conditions as they exist, or to accept the responsibility for changing them”

~ Denis Waitley

“There are no failures in life, only lessons to be learned”

~ Unknown

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk ayah dan ibu terima kasih untuk kasih sayang dan pengertiannya selama ini. Terima kasih karena ayah dan ibu selalu sabar menghadapi sikapku yang mungkin masih belum dewasa. Terima kasih juga atas semua do'a kalian untukku terutama do'a agar aku bisa segera menyelesaikan skripsi ini dan bisa segera lulus. Aku harap kalian tahu bahwa ingin membanggakan kalian adalah alasan utama mengapa aku selalu berusaha untuk bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam hidupku, terutama dalam urusan pendidikan.

Teruntuk saudara kembarku Nabila Syafira, *the person who literally has been there for me since the day one, thank you for being one of the biggest support systems in my life, thank you for accompanying me through the ups and downs of life, thank you for being a good listener to all of my worries, thank you for always supporting me and for always believing in me even when no one else did.* Terima kasih juga karena selama proses penulisan skripsi ini sudah mau mendengarkan keluh kesahku yang hampir setiap hari selalu aku sampaikan. Semoga suatu saat nanti aku juga bisa membuatmu bangga dengan apa yang aku lakukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan karya ini. Penulisan karya atau skripsi ini tidak lain merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya. Skripsi ini terinspirasi dari ketertarikan penulis terhadap permasalahan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara yang tak kunjung menemukan titik terang, serta karena ketertarikan penulis terhadap hubungan kedua negara yang selalu mengalami pasang surut.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih memilih untuk mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya. Beberapa kebijakan presiden Korea Selatan memang sempat ada yang ditujukan untuk mendukung prospek reunifikasi kedua Korea. Namun, semuanya mulai berubah ketika Presiden Kim Dae Jung mengeluarkan *Sunshine Policy* (kebijakan Sinar Matahari) yang menjunjung *peaceful co-existence* di antara kedua Korea, dan sudah tidak berusaha untuk menyatukan kedua Korea dalam satu pemerintahan tunggal lagi. Kebijakan Sinar Matahari milik Kim Dae Jung tersebut merupakan kebijakan yang dijadikan sebagai inspirasi bagi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis harus menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling menyulitkan adalah terkait dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan berbagai keterbatasan seperti kesulitan untuk pergi ke tempat umum karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta. Keterbatasan tersebut membuat penulis kesulitan dalam proses pencarian dan pengumpulan data referensi penelitian, membuat penulis kesulitan untuk bertemu dengan teman-teman lain untuk mediskusikan dan saling berbagi informasi terkait skripsi, dan juga membuat penulis kesulitan untuk melakukan bimbingan secara tatap muka dengan dosen pembimbing skripsi.

Namun, terlepas dari semua kesulitan dan hambatan yang harus dihadapi, penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu berkat izin Allah SWT dan tentunya berkat dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Umar Suryadi Bakry selaku Ketua Program Studi HI Universitas Jayabaya sekaligus dosen pembimbing penulis yang senantiasa baik hati meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan di tengah situasi pandemi *Covid-19* untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih atas bimbingan dan segala ilmu yang diberikan oleh bapak kepada penulis, terutama segala buah pikir mengenai studi HI, selama masa perkuliahan.
2. Bapak Drs. Denny Ramdhany, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Jayabaya yang dengan penuh dedikasi telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan *civitas academica* FISIP Universitas Jayabaya. Terima kasih atas segala dukungan bapak untuk apapun aktivitas yang pernah penulis kerjakan baik itu terkait dengan perkuliahan maupun berbagai kegiatan organisasi yang pernah diikuti oleh penulis.
3. Jajaran dosen FISIP HI Universitas Jayabaya, Ibu Dr. Ambarwati, M.Si., Ibu Dr. Poppy Setiawati, Bapak Dr. Gema Nusantara Bakry, Bapak Drs. Saiful Syam, M.Si., Ph.D., Bapak Chairul Ansari, S.Sos., Bapak Dr. Musa Alhabshy, Bapak Drs. Subarno, M.Hum., Ibu Sinta Julina S.Sos., Bapak Drs. H. Syarif Abd, MM., Ibu Dra. Esianera, MM., Ibu Dr. Rosni Thamrin, SH, MH, Bapak Indra Nuryadin, S.Sos., M.Si., dan dosen-dosen lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala ilmu yang pernah diberikan kepada penulis dan juga terima kasih atas waktunya selama masa perkuliahan.
4. Seluruh staf Universitas Jayabaya khususnya sekretariat FISIP (Pak Iin, Pak Edi Untoro, Ibu Suhartati, Ibu Sutaryani, dan Ibu Supriati, dan seluruh pihak

yang belum bisa saya sebutkan) yang telah banyak mengakomodasi dan melayani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

5. Orang tua saya, abang Rezky, abang Fauzan, kak Dian, saudara kembar saya Nabila, dan seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terima kasih telah menjadi penyemangat nomor satu dan juga pendengar terbaik dari segala cerita maupun keluh kesah saya, sehingga saya terkadang bisa melupakan semua rasa lelah dan rasa jenuh saya terutama selama proses penulisan skripsi ini, serta bisa selalu termotivasi untuk terus bekerja keras.
6. Sahabat-sahabat saya Reni Indrianti, Erika R. Austin, Marina Nirmalawati, Laila Almeida, dan Nur Zhafira Hanina yang sejak dari awal masa perkuliahan selalu senantiasa memberikan dukungan kepada saya, yang sering menemani saya di banyak kesempatan, dan yang selalu setia menjadi pendengar curhatan maupun keluh kesah saya terutama selama proses penulisan skripsi ini, terima kasih kalian!
7. Febryan, M. Yafi Nidhal Indrabrata, Wahyu Armadhea Putri, dan Alfian Fawzi, sesama sobat pejuang skripsi dan sobat pejuang bimbingan bersama, yang senantiasa selalu memotivasi dan memberikan dukungan kepada satu sama lain agar semangat dalam menuntaskan skripsi, yang selalu menjadi pendengar setia atas keluh kesah satu sama lain selama proses penulisan skripsi, terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua!
8. Teman-teman FISIP'17 beserta seluruh masyarakat FISIP Universitas Jayabaya tercinta lainnya yang selalu senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan, dan memotivasi penulis.
9. Keluarga besar HIMAHU Universitas Jayabaya periode 2018-2019 dan periode 2019-2020, khususnya para anggota divisi Kajian dan Keilmuan Aditya Zarkasih, Marini Sofia, Zalfa Salsabilla, Katarina Noviani Loda, Diniyah Putri Raharjo, dan Yivi Pamellia yang banyak memberikan dukungan kepada penulis selama berorganisasi dan masa perkuliahan.
10. Senior-senior FISIP HI Universitas Jayabaya; Kak M. Nidhal Ezzat Luthfi yang banyak memberikan 'virus' intelektual dan sudah seperti mentor bagi penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan,

dan dukungannya selama ini. Terima kasih juga atas waktu dan masukannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, mulai dari awal mendiskusikan topik penelitian hingga skripsi ini selesai. Kak Ribka Priskila Rompis yang juga turut memberikan ‘virus’ intelektual kepada penulis, terima kasih atas dukungan, masukannya, serta untuk berbagai bahan materi yang pernah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Kepada senior-senior FISIP HI Universitas Jayabaya lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan masukannya yang pernah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun selama proses penulisan skripsi ini.

11. Perangkat Youtube, Netflix, Viu, WeTv, Viki, yang senantiasa menemani dan menjadi selingan hiburan bagi penulis ketika penulis merasa bosan dan jenuh selama proses penulisan skripsi ini, serta aplikasi Wattpad yang menyediakan banyak karya yang dapat dijadikan selingan bacaan bagi penulis, terutama ketika penulis sedang merasa jenuh untuk membaca berbagai referensi penelitian.
12. Semua pihak yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, motivasi, dan dukungannya yang tulus semasa kuliah di Universitas Jayabaya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT akan membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membacanya. Karya ini tentunya juga masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan.

Jakarta, 17 Februari 2021

Nadia Syafira
(Mahasiswa FISIP-HI Universitas Jayabaya)

ABSTRAK

Perpecahan antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah salah satu isu yang selalu menjadi perhatian utama di kawasan Asia Timur. Upaya untuk mengatasi perpecahan kedua Korea selalu menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Semenjak masa pemerintahan Presiden Park Chung Hee, kebijakan Korea Selatan yang ditujukan kepada Korea Utara berfokus untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea. Tetapi pada saat Presiden Kim Dae Jung menjabat, Korea Selatan mulai merubah fokus kebijakannya dari yang semula berfokus untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea, menjadi ke arah yang lebih mendukung *peaceful co-existence* di antara keduanya. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang lebih berfokus untuk mendukung koeksistensi damai dua Korea tersebut, tetap dipertahankan oleh pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae In. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor sebab-akibat yang menjadi alasan mengapa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih condong mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya.

Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Model Pilihan/Aktor Rasional (*Rational Choice Theory*). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alasan mengapa kebijakan pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya adalah karena mendukung prospek reunifikasi dua Korea memiliki lebih banyak konsekuensi yang dapat merugikan Korea Selatan, bila dibandingkan dengan hanya sekedar mendukung koeksistensi damai di antara keduanya saja. Dalam *Rational Choice Theory*, hal ini disebut sebagai pilihan rasional yang dibuat oleh seorang aktor/*decision maker* dengan cara mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap opsi yang ada.

KATA KUNCI: koeksistensi damai, reunifikasi, kebijakan, Moon Jae-In, *rational choice theory*.

ABSTRACT

The division of South and North Korea is one of the issues that has always been a major concern in the East Asia region. Efforts to overcome the split between the two Koreas have always been a major concern in South Korean foreign policy making. Since the administration of President Park Chung Hee, South Korea's policy towards North Korea had focused on supporting the prospect of reunification of the two Koreas. However, when President Kim Dae Jung took office, South Korea began to change its policy focus from which initially focusing on supporting the prospect of reunification of the two Koreas, to one that was more supportive of peaceful co-existence between the two. South Korea's policy towards North Korea, which is more focused on supporting the peaceful co-existence of the two Koreas are still maintained by the South Korean government under the leadership of President Moon Jae In. The aim of this study is to explain the causal factors that could explain why South Korea's policy towards North Korea during the Moon Jae In administration has tended to favor the peaceful co-existence of the two Koreas rather than the prospect of reunification of the two countries.

This study is a qualitative research using descriptive analysis technique. The analysis in this study was carried out using the theoretical framework of the Rational Choice Model/Rational Actor Model (Rational Choice Theory). This study concluded that the reason why the policies during the administration of Moon Jae In favored the prospect of peaceful co-existence between the two Koreas rather than the prospect of reunification of the two countries is because supporting the prospect of the reunification of the two Koreas had more consequences that could harm South Korea, when compared to merely supporting peaceful co-existence between the two alone. In Rational Choice Theory, this is referred as a rational choice made by an actor/decision maker by considering the various consequences that may occur from each available option.

KEYWORDS: *peaceful co-existence, reunification, foreign policy, Moon Jae-In, rational choice theory.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I – PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
a) Kegunaan Teoritis/Akademis	9
b) Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Teori	10
1. <i>Rational Choice Theory</i>	10
F. Kerangka Analisis	13
G. Definisi Konseptual	15
1. Kebijakan Luar Negeri	15
2. Reunifikasi	15
3. Koeksistensi	15
H. Metode Penelitian	15

1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pengumpulan Data	16
a) Metode Berbasis Dokumen/Dokumentasi	16
b) Metode Berbasis Internet	17
I. Metode Analisis Data	17
J. Sistematika Penulisan	17
BAB II – PASANG SURUT HUBUNGAN KOREA SELATAN & KOREA UTARA	
A. Sejarah Konflik dan Terpecahnya Semenanjung Korea	20
1. Penjajahan Jepang di Semenanjung Korea	20
2. Akhir Perang Dunia II dan Terbaginya Dua Korea	25
3. Perang Korea 1950-1953	29
B. Hubungan Dua Korea Pasca Perang Korea dan Perang Dingin	34
C. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/ <i>Inter-Korean Summits</i> tahun 2000 & tahun 2007	38
1. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea tahun 2000	38
2. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea tahun 2007	41
D. Berbagai Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara pada Masa Pemerintahan Sebelum Moon Jae In	46
1. Masa Pemerintahan Park Chung Hee (1963-1979)	46
2. Masa Pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1993)	50
3. Masa Pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003) dan Roh Moo Hyun (2003-2008)	52
4. Masa Pemerintahan Park Geun Hye (2013-2017)	55
E. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pada Masa Pemerintahan Moon Jae In	57
BAB III – UPAYA KOREA SELATAN DALAM MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN	
A. Kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In	63
B. Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea Melalui <i>Inter-Korean</i>	

<i>Summit 2018, Deklarasi Panmunjom, & Pyongyang Joint Declaration</i>	70
1. KTT antar-Korea 2018/ <i>Inter-Korean Summit</i> 2018 fase I dan Deklarasi Panmunjom	70
2. KTT antar-Korea 2018/ <i>Inter-Korean Summit</i> 2018 fase II	74
3. KTT antar-Korea 2018/ <i>Inter-Korean Summit</i> 2018 fase III dan <i>Pyongyang Joint Declration</i>	76
BAB IV – ANALISIS RATIONAL CHOICE THEORY TERHADAP KEBIJAKAN KOREA SELATAN YANG CENDERUNG MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA	
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Korea Selatan Terhadap Prospek Reunifikasi Dua korea	81
1. Hambatan Ideologi dan Sistem Politik yang Berbeda	81
2. Respon Korea Utara dan Perbedaan Pandangan Dua Korea Terkait Reunifikasi	87
3. Pandangan dan Respon Publik Korea Selatan Terhadap Persoalan Reunifikasi dan Korea Utara	92
4. Hambatan Ekonomi dalam Upaya Mewujudkan Reunifikasi	98
5. Dinamika Hubungan Antara-Korea dan Pengaruh Pihak Sekutu Masing-masing Korea	102
B. Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In Berdasarkan Komponen <i>Rational Choice Theory</i>	107
BAB V – PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
BIODATA SINGKAT	135

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Model Pilihan Rasional	11
Gambar 2.1 Pembagian Dua Korea di Sekitar Garis Lintang 38° LU	27
Gambar 2.2 Alur Pergerakan Pasukan saat Perang Korea	31
Gambar 2.3 Perkiraan Jumlah Korban Perang Korea	33

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2000	40
Tabel 2.2 Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2007	42
Tabel 4.1 Persepsi Publik Korea Selatan Terhadap Ancaman Korea Utara	94
Tabel 4.2 Pandangan Terkait dengan Kecepatan Terjadinya Reunifikasi Dua Korea yang Diharapkan oleh Publik Korea Selatan	97

Daftar Grafik

Grafik 4.1 Pandangan Publik Korea Selatan Terhadap Korea Utara Berdasarkan Tahun dan Masa Pemerintahan	95
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketegangan Perang Dingin¹ adalah salah satu faktor besar yang melatarbelakangi terjadinya Perang Korea² dan terpecahnya Semenanjung Korea.³ Selama beberapa dekade, perpecahan antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah salah satu isu yang selalu menjadi perhatian utama di kawasan Asia Timur. Selama bertahun-tahun pula, reunifikasi dua Korea telah coba diupayakan, baik dari negara yang bersangkutan maupun dari negara-negara yang mempunyai kepentingan di Semenanjung Korea. Menyadari bahwa sejak awal perpecahan dua Korea adalah bukan karena keinginan rakyat Korea, maka upaya untuk menyatukan perpecahan dan mengembalikan perdamaian di Semenanjung Korea pun terus dilakukan.

Demi mendukung upaya tersebut, para presiden Korea Selatan selalu berusaha untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung proses pencapaian perdamaian di Semenanjung Korea. Setidaknya, ada 5 presiden Korea Selatan yang komitmennya terhadap perdamaian dua Korea sangat menonjol. Kelima presiden tersebut ialah Park Chung Hee (1963-1979), Kim Dae Jung (1998-2003), Roh Moo Hyun (2003-2008), Park Geun Hye (2013-2017), dan Moon Jae In yang mulai menjabat pada tahun 2017.

¹ Perang dingin adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta sekutunya disebut Blok Barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya disebut Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947—1991. Perang Dingin terjadi tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir (1945).

² Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

³ Aziza Fanny Larasati, "Ini Alasan Mengapa Perang Korea Tak Pernah Berakhir hingga Saat Ini.", dalam <https://www.matamatapolitik.com/historical-ini-alasan-mengapa-perang-korea-tak-pernah-berakhir-hingga-saat-ini/> [Diakses 1 Oktober 2020]

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang arahnya lebih mendukung reunifikasi baru mulai terlihat jelas pada masa pemerintahan Park Chung Hee. Keinginan Park Chung Hee akan reunifikasi Korea awalnya terlihat dalam pidato yang disampaikan olehnya pada *Liberation Day* tanggal 15 Agustus 1970. Dalam pidatonya, Presiden Park mengemukakan gagasan kemungkinan untuk menghapus sedikit demi sedikit berbagai batasan yang telah terbentuk antara Korea Selatan dan Korea Utara, demi kepentingan menciptakan kesepakatan bersama terkait reunifikasi dan sebagai bentuk konsiderasi kemanusiaan.⁴

Presiden Park Chung Hee lalu berusaha menerapkan kebijakan non-agresi terhadap Korea Utara sebagai usaha awal untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Tetapi, respon Korea Utara terhadap pengajuan perjanjian non-agresi setelahnya adalah negatif.⁵ Kemudian, pada masa pemerintahan Park Chung Hee juga muncul Deklarasi 8.15 yang kemudian dijadikan pedoman diplomasi Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa tersebut. Deklarasi 8.15 memiliki pernyataan utama terkait dengan “metode-metode untuk membangun sebuah fondasi demi unifikasi yang damai”.⁶

Tetapi pada saat Kim Dae Jung menjabat, Korea Selatan mulai merubah kebijakannya menjadi ke arah yang lebih mendukung *peaceful co-existence* antara dua Korea, daripada mendukung prospek reunifikasi keduanya. Pada masa pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003), pemerintah Korea Selatan membuat kebijakan *Sunshine (Sunshine Policy)* terhadap Korea Utara. Kebijakan tersebut

⁴ Nurul Hanafiaty, “Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara.”, dalam <http://repository.unair.ac.id/87738/5/Nurul%20Hanafiaty.pdf>. [Diakses 22 Agustus 2020]

⁵ *ibid.*,

⁶ Park Young Ho, "South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations.", dalam *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, Vol. 21 (2014), h. 4-5.

bertujuan untuk membebaskan Korea Selatan dan Korea Utara dari situasi konflik yang sering kali memanas diantara keduanya. Selain itu, *Sunshine Policy* juga dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang aman dan damai.⁷

Presiden Kim sendiri mengakui bahwa reunifikasi antara dua Korea masih merupakan sebuah tujuan yang sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diwujudkan.⁸ Oleh karena itu, *Sunshine Policy* dibuat dengan arah yang lebih condong mendukung *peaceful co-existence* antara dua Korea, daripada mendukung prospek penyatuan kembali keduanya. Sejalan dengan *Sunshine Policy* yang lebih mendukung *peaceful co-existence*, Kim Dae Jung menyatakan bahwa kata unifikasi tidak akan digunakan untuk menggambarkan tujuan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada saat ia memerintah.⁹

Kim Dae Jung pun lebih memilih untuk menggantinya dengan istilah *constructive engagement policies*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari Korea Utara merasa terpicu akan intensi Korea Selatan untuk melakukan absorpsi terhadap negaranya.¹⁰ *Sunshine Policy* kemudian juga tetap dijadikan sebagai pedoman kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada periode Roh Moo Hyun (2003-2008), tetapi dengan istilah yang berbeda yaitu "*The Policy of Peace and Prosperity*".¹¹

⁷ Nurul Hanafiaty, "Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara.", dalam <http://repository.unair.ac.id/87738/5/Nurul%20Hanafiaty.pdf>. [Diakses 22 Agustus 2020]

⁸ *ibid.*,

⁹ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 159.

¹⁰ *ibid.*, h. 159-160

¹¹ *ibid.*, h. 160

Selanjutnya ketika Park Geun Hye menjabat sebagai presiden (2013-2017), kebijakan luar negeri Korea Selatan yang diterapkan disebut dengan istilah *Trust-Politik Policy*. Kebijakan *Trust-Politik* memiliki tiga pilar yang salah satunya adalah *Trust-Building Process on the Korean Peninsula*. *Trust-Building Process on the Korean Peninsula* merupakan dasar dari kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Park Geun Hye.¹² Presiden Park juga meluncurkan *Dresden Initiative* sebagai pedoman kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada saat ia memerintah. Dalam inisiatif tersebut, Presiden Park menekankan terhadap tiga bidang penting dalam penerapan kebijakannya yaitu, kemanusiaan, *co-prosperity*, dan integrasi.¹³

Pada masa pemerintahan Park Geun Hye, kebijakan Korea Selatan arahnya juga terlihat masih cukup condong mendukung *peaceful co-existence* di antara kedua Korea. Hal ini terlihat dari kebijakan Park Geun Hye terhadap Korea Utara yang berkaitan dengan upaya untuk membangun kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dengan kebijakan tersebut, Park Geun Hye berharap nantinya dengan kepercayaan yang sudah dibangun, kedua negara kemudian bisa memulai untuk membentuk program-program ekonomi dan proyek pembangunan infrastruktur bersama.¹⁴

Tetapi di sisi lain sebenarnya Park Geun Hye merupakan salah satu presiden Korea Selatan yang memiliki mimpi besar akan reunifikasi dua Korea di masa depan. Harapan Park Geun Hye akan bersatunya kembali dua Korea disampaikan

¹² Byung-se Yun, "Park Geun-hye's Trustpolitik: A New Framework for South Korea's Foreign Policy", dalam https://globalasia.org/v8no3/cover/park-geun-hyes-trustpolitik-a-new-framework-for-south-koreas-foreign-policy_yun-byung-se. [Diakses 20 Agustus 2020]

¹³ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, *loc. cit.*

¹⁴ *ibid.*,

dalam pidatonya pada 28 Maret 2014 di Dresden, sebuah kota di Jerman yang juga menjadi simbol reunifikasi Jerman.¹⁵ Dalam pidatonya tersebut, Park Geun Hye menyatakan bahwa ia percaya apabila Semenanjung Korea bisa bersatu kembali seperti Jerman, maka Korea dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan yang lebih jauh lagi.¹⁶ Sayangnya, sebelum harapannya tercapai, pada tahun 2017 Park Geun Hye diberhentikan dari jabatannya karena kasus korupsi dan kemudian digantikan oleh Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan setelahnya.¹⁷

Pada masa pemerintahannya, Moon Jae In mengeluarkan *Berlin Initiative* sebagai outline dari kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.¹⁸ Hal ini disampaikan oleh Moon Jae In sendiri dalam pidatonya pada bulan Juli tahun 2011 di Körber Foundation, Jerman.¹⁹ Disebutkan oleh Moon Jae In bahwa kebijakan *Berlin Initiative* memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik dan struktur pasca perang dingin serta membentuk perdamaian di wilayah Semenanjung Korea.²⁰

Dalam pidatonya di *Körber Foundation*, Moon Jae In menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menginginkan kejatuhan dari rezim Korea Utara, dan tidak akan pula melakukan upaya apapun yang mengarah pada reunifikasi melalui absorpsi terhadap Korea Utara.²¹ Selain itu, Moon Jae In juga menyatakan bahwa dalam pemerintahannya, unifikasi yang ingin dicapai dengan Korea Utara memiliki

¹⁵ No Name, "Dresden Initiative for peaceful unification on the Korean peninsula", dalam <http://world.kbs.co.kr/special/kdivision/english/tasks/dresden.htm>. [Diakses 22 Agustus 2020]

¹⁶ Shin, Yong Bae, "Full text of Park's speech on N. Korea", dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140328001400> [Diakses 22 Agustus 2020]

¹⁷ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, *loc. cit.*

¹⁸ *ibid.*, h. 158

¹⁹ No Name, "The Berlin Initiative for peace on the Korean Peninsula", dalam <http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view;jsessionid=S0ITaDJdJZ-IR0cYLDg95I9x.node20?subId=686&affairId=750&articleId=40441> [Diakses 22 Agustus 2020]

²⁰ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, *op. cit.*, h. 162.

²¹ No Name, "Speech at the invitation of the Koerber Foundation", dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 20 Agustus 2020]

arti sebagai suatu proses dimana kedua belah pihak dapat berkoeksistensi dengan damai, dapat mencapai kesejahteraan bersama, dan bukan menyatukan kembali dua Korea dalam satu pemerintahan. Moon Jae In mengungkapkan bahwa sebenarnya reunifikasi mungkin saja bisa terjadi secara alami di masa depan apabila perdamaian sudah terbangun dengan baik. Tetapi, dalam pemerintahannya, fokus dan tujuan utama yang ingin dicapai hanyalah perdamaian saja, bukan penyatuan kembali dua Korea apalagi melalui absorpsi.²²

Sejalan dengan keinginan untuk hanya berfokus pada perdamaian saja agar kedua Korea dapat berkoeksistensi secara damai, kebijakan pada masa pemerintahan Moon Jae In memang sangat memprioritaskan upaya perdamaian. Dikutip dari laman *Ministry Of Unification* (2017), kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki 3 konsep utama, yaitu perdamaian sebagai prioritas utama (*'peace' first*), saling menghormati (*spirit of 'mutual respect'*), dan kebijakan terbuka (*open policy*).²³

Kebijakan Moon Jae In yang memang lebih condong mendukung *peaceful co-existence* antara dua Korea pun, terlihat jelas dalam konsep *spirit of 'mutual respect'* yang dijunjungnya. Dalam laman *Ministry Of Unification* (2017), dijelaskan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip *spirit of 'mutual respect'* adalah Korea Selatan akan menghormati Korea Utara dengan pendirian mereka yang disebut dengan “3-Nos”/”3-Tidak”. “3-Nos”/”3-Tidak” diantaranya adalah

²² No Name, “Speech at the invitation of the Koerber Foundation”, dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 20 Agustus 2020]

²³ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/ [Diakses 22 Agustus 2020]

tidak menginginkan runtuhnya rezim Utara, tidak akan melakukan unifikasi melalui absorpsi, dan tidak akan mengejar unifikasi melalui cara-cara yang artifisial.²⁴

Dikutip dari laman yang sama pula, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki 3 *goals* utama. Tiga *goals* utama tersebut ialah resolusi nuklir Korea Utara dengan membentuk perdamaian yang permanen, pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, dan realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea.²⁵ Dengan salah satu prinsip kebijakannya, yaitu *Korea-led Initiative*, Korea Selatan memang berusaha untuk memimpin proses perdamaian, rekonsiliasi, dan kerja sama di Semenanjung Korea.²⁶

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara arahnya bisa berubah-ubah. Dari yang semula tujuannya lebih mengarah dan mendukung prospek reunifikasi antara dua Korea, hingga dapat berubah ke arah yang lebih condong hanya mendukung koeksistensi di antara keduanya saja. Dari paparan di atas pula dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemerintahan Kim Dae Jung hingga Moon Jae In, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara arahnya cenderung lebih mendukung koeksistensi antara dua Korea dibandingkan prospek penyatuan kembali keduanya.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat berpotensi mempengaruhi arah kebijakan Korea Selatan terhadap

²⁴ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/ [Diakses 03 Oktober 2020]

²⁵ *ibid.*,

²⁶ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/principles/ [Diakses 03 Oktober 2020]

Korea Utara, terutama terkait dengan persoalan dukungan terhadap koeksistensi damai atau prospek reunifikasi dua Korea. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti arah kebijakan Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In, yang memang arahnya lebih condong mendukung pilihan koeksistensi damai daripada prospek reunifikasi antara dua Korea.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan tertentu yang secara spesifik menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu rancangan penelitian wajib ditentukan terlebih dahulu rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan “*Mengapa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih condong mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya?*”

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menentukan batasan-batasan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari inti materi yang ingin dibahas atau dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan berfokus pada kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara khususnya pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-

faktor sebab-akibat yang berpotensi menyebabkan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih condong mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, kegunaan dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Berikut adalah penjelasan dari kedua kegunaan tersebut:

a) Kegunaan Teoritis/Akademis

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi empiris dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang HI, terutama tentang analisis kebijakan luar negeri suatu negara, serta juga tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan reunifikasi dan koeksistensi damai antara dua negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna menambah informasi ataupun masukan bagi penelitian-penelitian lain yang serupa di masa depan.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembekalan wawasan bukan hanya bagi diri penulis, tetapi juga bagi para pembaca terutama rekan-rekan mahasiswa HI. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan para akademikus HI maupun masyarakat umum sebuah bahan diskusi atau bahan bacaan, yang dapat memberikan informasi tentang kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara serta tentang isu-isu terkait reunifikasi dua Korea.

E. Kerangka Teori

- Teori Pilihan Rasional/Aktor Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pengambilan Keputusan atau seringkali disebut sebagai Teori Kebijakan Luar Negeri, diperkenalkan Graham T. Allison ketika ia menganalisis Studi Kasus Misil Kuba. Graham T. Allison membagi teori tersebut menjadi tiga model yaitu, Model Pilihan Rasional/Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasional, dan Model Politik Birokratik.²⁷ Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Model Pilihan Rasional.

Berdasarkan Model Pilihan Rasional/*Rational Choice Theory*, negara atau pemerintah dianggap sebagai aktor yang menjadi *decision maker* dan dapat menentukan tindakan secara rasional. Dalam menentukan tindakan secara rasional, para *decision maker* melakukan pertimbangan yang dipengaruhi oleh 4 komponen. 4 komponen tersebut ialah *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran), *Options* (opsi), *Consequences* (konsekuensi), dan *Choice* (pilihan).²⁸

Model Aktor Rasional/*Rational Choice Theory* menjelaskan bahwa aktor rasional, yang dalam hal ini adalah pemerintah, mempunyai nilai (perhitungan), yang mana sebagai aktor rasional akan mengumpulkan pilihan, informasi, konsekuensi, lalu kemudian akan memilih dan membuat rencana dari setiap pilihan sebagai suatu cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika mengambil pilihan tersebut. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan, membandingkan semua pilihan dengan konsekuensinya, lalu akhirnya memilih pilihan yang paling rasional dan menguntungkan. Hal ini persis

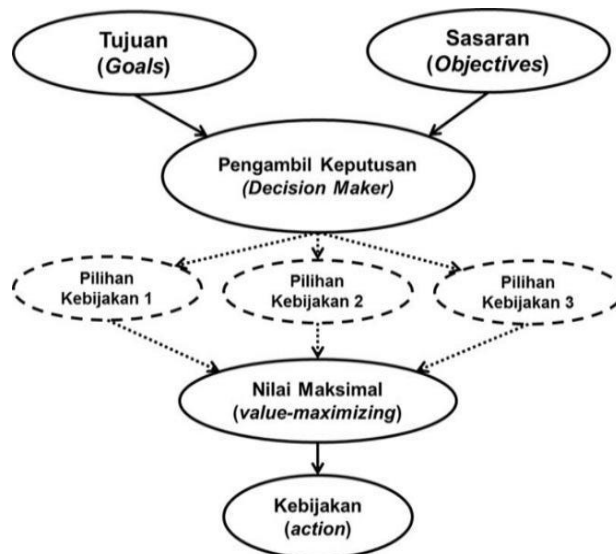
²⁷ Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 63 Issue 3 (1969), h. 690.

²⁸ *ibid.*, h. 694

seperti dalam ilmu ekonomi dimana para pelakunya secara rasional memilih tindakan atau alternatif yang paling efisien, yang paling dapat memaksimalkan keuntungan, dan yang dapat meminimalisir kerugian.²⁹

Inti dari hubungan keempat komponen *Rational Choice* tersebut ialah ketika *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran) dapat diidentifikasi, maka muncul berbagai *Options* (opsi) tindakan yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Opsi-opsi yang dimiliki negara kemudian kembali dipertimbangkan *Consequences*-nya (konsekuensinya) oleh *decision maker* sehingga muncul satu *Choice* (pilihan). Pilihan (kebijakan) ini yang selanjutnya dinilai kemanfaatannya bagi pencapaian sasaran dan tujuan negara.³⁰

Gambar 1.1 Model Pilihan Rasional



Sumber: Graham T. Allison, 1969 (Diambil dari Syinthia Fawaati, 2017)

²⁹ Graham T. Allison, *Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown and Company, 1971), h. 29.

³⁰ Syinthia Fawaati, "Indonesian Defense Diplomacy On The Cooperation Between Indonesian Ministry Of Defense Of The Republic Of Indonesia and United States Defense Institutional Reform Initiatives", dalam *Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan*, Vol. 3 No. 1 (2017), h. 4.

Dalam bukunya yang berjudul *Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Allison kembali menyinggung tentang model *Rational Choice*. Dalam bukunya tersebut, Allison menjelaskan tentang 4 konsep yang berhubungan dengan 4 komponen dasar *Rational Choice* yang telah disebutkan sebelumnya secara lebih detail. Dalam *Essence Of Decision*, 4 konsep yang dijelaskan adalah *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences*, dan *Choice*.

Pertama, *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran) menunjukkan adanya nilai atau utilitas dari sebuah keputusan yang di ambil, dimana setiap aktor diharapkan dapat menentukan urutan preferensi berdasarkan setiap kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi dari suatu tindakan. Hal ini dikarenakan setiap konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan mengandung sejumlah efek samping.³¹ Bisa disimpulkan bahwa *Goals and Objectives* menunjukkan preferensi atau hasil yang diinginkan oleh suatu agen setelah ia melakukan pertimbangan terkait dengan konsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai tindakan.

Kedua, pada konsep *Alternatives*/alternatif dijelaskan bahwa setiap aktor rasional diharuskan untuk memilih salah satu di antara alternatif atau opsi yang ada di dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam pengambilan keputusan, alternatif ini direpresentasikan sebagai pohon keputusan. Suatu alternatif mungkin saja mencakup tindakan yang sederhana, namun spesifikasi dari suatu tindakan tersebut tetap harus cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif yang lain, sehingga nantinya dapat meminimalisir kerugian.³² Konsep *Alternatives* sebenarnya sama saja dengan komponen *Options* atau opsi yang dijelaskan oleh Allison dalam tulisannya yaitu *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*. Allison

³¹ Graham T. Allison, *loc. cit.*

³² *ibid.*, h. 29-30

menjelaskan bahwa opsi adalah berbagai tindakan yang relevan dengan masalah strategis yang memberikan spektrum pilihan.³³

Ketiga, *Consequences*/konsekuensi adalah merupakan hasil yang akan terjadi untuk setiap alternatif yang telah dipilih. Variasi pun akan dihasilkan atau mulai terlihat pada titik ini, yaitu dengan cara membuat asumsi-asumsi yang berbeda tentang keakuratan pengetahuan dari pembuat keputusan tentang konsekuensi yang mengikuti dari setiap pilihan alternatif. Keempat, pada konsep *Choice* dijelaskan bahwa pilihan rasional secara sederhana hanyalah memilih pilihan-pilihan dalam alternatif yang konsekuensinya dapat menduduki peringkat tertinggi dalam meminimalisir kerugian saat pengambilan keputusan. Rasionalitas dalam hal ini dianggap mengacu pada pemaksimalan nilai-nilai dalam suatu pilihan secara konsisten dengan atau dalam batasan-batasan tertentu.³⁴

Model aktor rasional dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan rasional pemerintah Korea Selatan terkait dengan persoalan perdamaian, reunifikasi, maupun koeksistensi dua Korea, yang kemudian mempengaruhi arah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada era Moon Jae In.

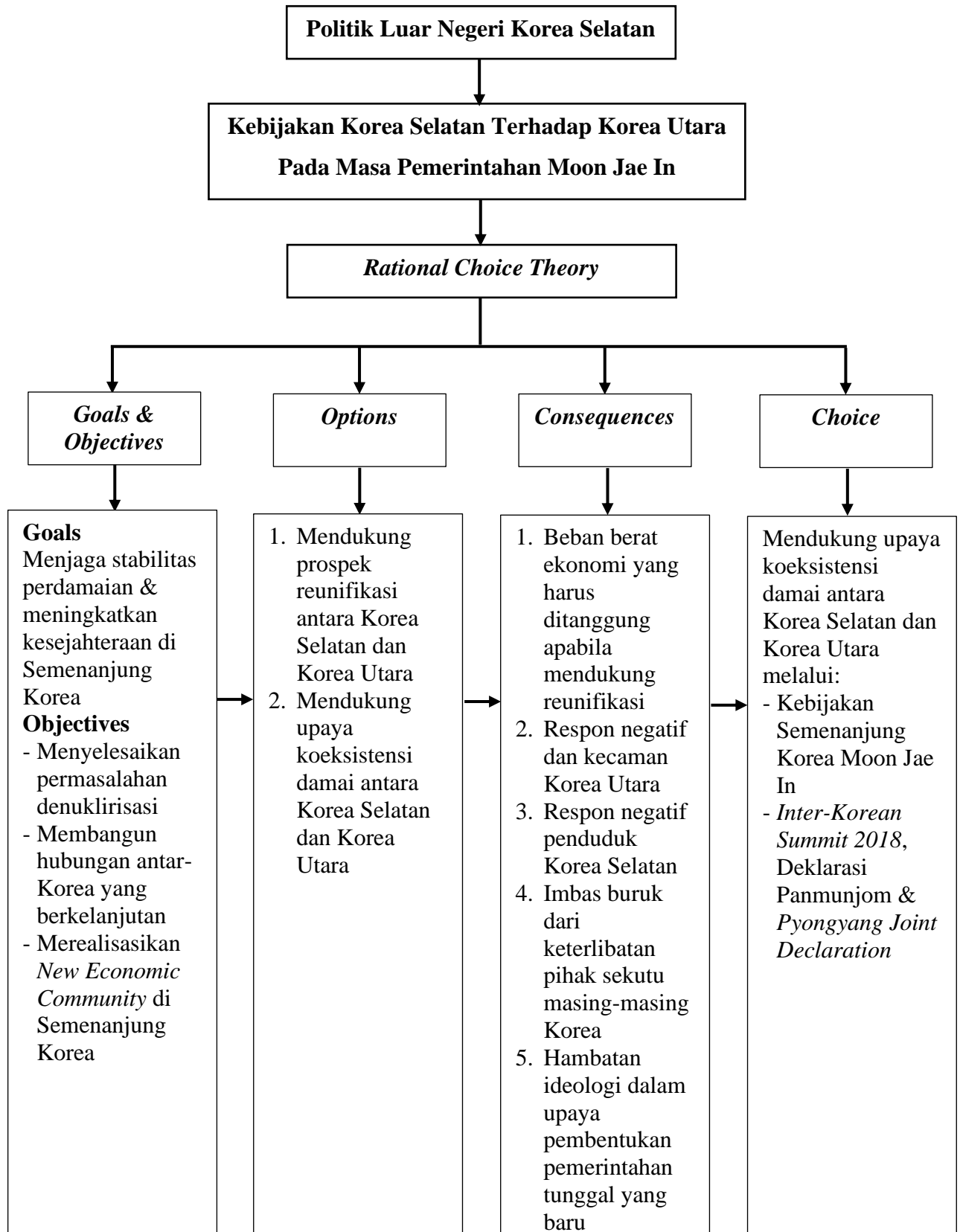
F. Kerangka Analisis

Level of analysis pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul *Man, the State, and War*. Dalam bukunya tersebut, Kenneth Waltz membagi tingkat analisis ke dalam tiga kategori yaitu Individu, Negara, dan Sistem Internasional. Tingkat analisis yang akan digunakan

³³ Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 63 Issue 3 (1969), h. 694.

³⁴ Graham T. Allison, *Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown and Company, 1971), h. 30.

dalam penelitian ini adalah tingkat analisis negara. Berikut adalah kerangka analisis penulis mengenai penelitian ini:



G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi dan rencana tindakan yang digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sikap dan aktivitas suatu negara yang ditujukan untuk menghadapi unit-unit internasional yang berada di lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri dibuat oleh pemerintah atau para pembuat keputusan suatu negara dan digunakan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

2. Reunifikasi

Reunifikasi adalah proses penyatuan kembali dua negara atau lebih, yang sebelumnya terpecah akibat dari peristiwa sejarah, baik itu terpecah secara damai maupun dikarenakan peperangan, menjadi satu negara kembali. Reunifikasi bisa terjadi dengan cara unifikasi melalui absorpsi, dimana negara yang lebih kecil akan bergabung dengan negara yang lebih besar, ataupun dengan cara dimana negara-negara yang terpisah memutuskan untuk bersatu kembali dan membentuk satu pemerintahan tunggal yang baru.

3. Koeksistensi

Koeksistensi adalah keadaan dimana dua negara atau lebih dapat hidup berdampingan secara damai dengan satu sama lain, walaupun negara-negara tersebut memiliki ideologi atau pandangan politik yang berbeda atau bertentangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menempati posisi yang sangat penting dan sangat sentral dalam sebuah proses penelitian. Berhasil tidaknya tujuan penelitian sangat

tergantung pada metode yang digunakan.³⁵ Oleh karenanya, penulis merumuskannya melalui sub-bab sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian **deskriptif**. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini terdiri atas dua metode yaitu Metode Berbasis Dokumen/Dokumentasi dan Metode Berbasis Internet.

a) Metode Berbasis Dokumen/Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berbasis dokumen/dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen/arsip tertentu untuk dijadikan bahan penelitian. Menurut Christopher Lamont, dokumen yang dimaksud dalam metode ini ada yang merupakan dokumen primer (*primary source documents*), ada pula yang berbentuk data sekunder (*secondary source documents*).³⁷

³⁵ Umar S. Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), h. 25.

³⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

³⁷ Umar S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 171.

b) Metode Berbasis Internet

Internet selain dapat dimanfaatkan untuk mengakses materi ilmiah tradisional (seperti artikel jurnal ilmiah dan buku), juga dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁸ Mengakses data-data melalui internet sangat mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data. Hal ini dikarenakan penulis dapat memperoleh informasi yang diperlukan hanya dengan melakukan *browsing* di internet. Oleh karena itu, metode berbasis internet pun juga digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan kali ini yakni analisis data yang bersifat **kualitatif**. Metode penelitian kualitatif adalah metode observasi ilmiah yang berfokus pada pengumpulan data non-numerik. Metode penelitian kualitatif lebih mengacu pada “makna, definisi konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi hal-hal” dan bukan pada “jumlah atau ukuran” (kuantifikasi) nya. Metode penelitian ini lebih berfokus untuk menjawab mengapa dan bagaimana suatu fenomena tertentu dapat terjadi daripada seberapa sering fenomena tersebut terjadi.³⁹

I. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan atau Bab I dari skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan

³⁸ *Ibid.*, h. 176.

³⁹ Rina Hayati, “Pengertian Penelitian Kualitatif, Macam, Ciri, dan Cara Menuliskannya”, dalam <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kualitatif/>. [Diakses 5 Oktober 2020]

penelitian, kerangka teori, kerangka analisis, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PASANG SURUT HUBUNGAN KOREA SELATAN & KOREA UTARA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sering kali mengalami pasang surut ketegangan. Pemaparan terkait dengan pasang surut hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ini akan meliputi tentang sejarah terpecahnya Semenanjung Korea, hubungan dua Korea pasca Perang Korea dan Perang Dingin, Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea dan upaya perdamaian yang pernah dilakukan, hingga dinamika hubungan kedua negara tersebut pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In.

BAB III. UPAYA KOREA SELATAN DALAM MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In dalam mendukung koeksistensi damai antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pemaparan pada bab ini akan meliputi tentang berbagai kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In yang ditujukan terhadap Korea Utara, yaitu termasuk dengan kebijakan Semenanjung Korea Presiden Moon Jae In, kemudian pemaparan tentang dilaksanakannya *Inter-Korean Summit* pada tahun 2018, serta penandatanganan Deklarasi Panmunjom dan *Pyongyang Joint Declaration* oleh kedua pihak Korea.

BAB IV. ANALISIS *RATIONAL CHOICE THEORY* TERHADAP KEBIJAKAN KOREA SELATAN YANG CENDERUNG MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA

Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap berbagai alasan atau faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kebijakan Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih condong mendukung koeksistensi damai dua Korea, daripada prospek reunifikasi keduanya. Analisis pada bab ini akan dilakukan dengan menggunakan 1 teori, yaitu *Rational Choice Theory*. *Rational Choice Theory* akan digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana pilihan rasional yang berkaitan dengan pertimbangan akan tujuan, opsi-opsi, dan konsekuensi dapat mempengaruhi kebijakan Korea Selatan yang cenderung lebih mendukung koeksistensi damai dua Korea.

BAB V. PENUTUP

Pada bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.

BAB II

PASANG SURUT HUBUNGAN KOREA SELATAN & KOREA UTARA

A. Sejarah Konflik dan Terpecahnya Semenanjung Korea

1. Penjajahan Jepang di Semenanjung Korea

Pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1910-1945 ditandai dengan penindasan budaya dan warisan Korea, eksploitasi massal tenaga kerja Korea, dan penindasan dengan kekerasan terhadap gerakan kemerdekaan Korea. Pada tahun 1897, Joseon, kerajaan Korea yang didirikan pada tahun 1392, diubah namanya menjadi Kekaisaran Korea, dan Raja Gojong menjadi Kaisar Gojong. Pemerintah kekaisaran bertujuan untuk mendirikan negara yang kuat dan merdeka dengan melaksanakan reformasi dalam negeri, memperkuat kekuatan militer, mengembangkan perdagangan dan industri, dan mensurvei kepemilikan tanah.⁴⁰

Pengaruh Rusia bisa dikatakan cukup kuat di Kekaisaran Korea sampai akhirnya Rusia dikalahkan oleh Jepang dalam Perang Rusia-Jepang (1904–1905). Setelah membangun dominasi ekonomi dan militer di Korea pada tahun 1904, Jepang melaporkan bahwa mereka telah mengembangkan reformasi yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pengaruh Jepang dalam ekonomi, hubungan luar negeri, dan militer Korea. Reformasi ini terhenti ketika Jepang memenangkan perang dengan Rusia, sehingga menghilangkan saingan terakhir Jepang yang berpengaruh di Korea.⁴¹

⁴⁰ No Name, “Korea Under Japanese Rule”, dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 25 Desember 2020]

⁴¹ No Name, “Japan’s Annexation of Korea”, dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 25 Desember 2020]

Dua bulan kemudian, Korea diwajibkan menjadi protektorat Jepang oleh Perjanjian Protektorat Jepang-Korea tahun 1905 dan reformasi pro-Jepang diberlakukan, termasuk pengurangan Angkatan Darat Korea dari 20.000 menjadi 1.000 orang. Banyak intelektual dan cendekiawan mendirikan berbagai organisasi dan asosiasi, memulai gerakan kemerdekaan. Pada tahun 1907, Gojong dipaksa turun tahta setelah Jepang mengetahui bahwa ia mengirim utusan rahasia ke Konvensi Den Haag Kedua untuk memprotes perjanjian protektorat, yang mengarah ke aksesinya putra Gojong, Kaisar Sunjong.⁴²

Pada tahun 1910, Jepang secara efektif mencaplok Korea melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Sementara Jepang menegaskan bahwa perjanjian itu dibuat secara hukum, argumen ini tidak diterima di Korea karena tidak ditandatangani oleh Kaisar Korea seperti yang dipersyaratkan dan melanggar konvensi internasional tentang tekanan eksternal terkait perjanjian. (Ibid) Jepang kemudian mendirikan pemerintahan di Korea dengan jabatan gubernur-jenderal sebagai pemimpinya dan jabatan tersebut diisi oleh jenderal atau laksamana yang ditunjuk oleh kaisar Jepang.⁴³

Selama penjajahan Jepang, hak-hak kebebasan orang Korea untuk berkumpul, berserikat, dan berbicara, serta hak pers semuanya dirampas. Banyak sekolah swasta ditutup karena tidak memenuhi standar tertentu yang sewenang-wenang. Otoritas kolonial menggunakan sistem sekolah mereka sendiri sebagai alat untuk mengasimilasi Korea ke Jepang, menempatkan penekanan utama pada pengajaran bahasa Jepang dan mengecualikan mata pelajaran seperti bahasa Korea

⁴² No Name, "Japan's Annexation of Korea", dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 26 Desember 2020]

⁴³ *ibid.*,

dan sejarah Korea dari kurikulum pendidikan. Jepang membangun jaringan transportasi dan komunikasi nasional serta membentuk sistem moneter dan keuangan baru. Jepang juga mempromosikan perdagangan Jepang di Korea sementara melarang orang Korea melakukan aktivitas serupa.

Titik balik dalam gerakan perlawanan Korea terjadi pada tanggal 1 Maret 1919, ketika unjuk rasa anti-Jepang secara nasional diadakan. Mantan kaisar Kekaisaran Korea, Gojong, yang merupakan simbol kemerdekaan tertinggi, telah meninggal dengan rumor kematiannya yang tersebar luas menyebutkan bahwa ia diracuni beberapa minggu sebelum terjadinya unjuk rasa tersebut, dan akhirnya menjadi salah satu pemicu utama terjadinya unjuk rasa.⁴⁴ Deklarasi Kemerdekaan Korea dibacakan pada rapat umum di Seoul pada 1 Maret. Gelombang pelajar dan warga turun ke jalan, menuntut kemerdekaan.

Peristiwa tersebut kemudian disebut dengan Gerakan Satu Maret (*The March First Movement*). Diperkirakan ada sekitar dua juta orang ikut ambil bagian. Jepang menanggapi kembali gerakan dan unjuk rasa tersebut dengan penindasan yang brutal, melepaskan pasukan beserta unit angkatan lautnya untuk menekan demonstrasi. Jepang menangkap sekitar 47.000 warga Korea, di antaranya sekitar 10.500 didakwa, sementara sekitar 7.500 tewas dan 16.000 luka-luka.⁴⁵ Untuk mengenang usaha dan perjuangan tersebut, Korea Selatan menjadikan tanggal 1 Maret sebagai hari Demonstrasi Manse atau lebih di kenal sebagai pergerakan

⁴⁴ No Name, "Japanese Rule Begins", dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 26 Desember 2020]

⁴⁵ Kwang Rin Lee, "Korea Under Japanese Rule, The March First Movement", dalam <https://www.britannica.com/place/Korea/Korea-under-Japanese-rule>. [Diakses 26 Desember 2020]

Sambil 1 Maret yang kemudian di jadikan sebagai libur nasional oleh pemerintah Korea Selatan.⁴⁶

Masa penjajahan Jepang atas Korea yang dimulai pada tahun 1910 hingga masa pecahnya Perang Dunia II dapat dibedakan menjadi beberapa tahap. Tahap Pertama, tahun 1910-an. Pada masa ini, kebijakan pemusnahan rakyat Korea tetap dilakukan oleh penjajah Jepang. Pasukan Jepang ditempatkan di Korea dan panglima pasukan tersebut ditunjuk menjadi gubernur jenderal yang memegang kekuasaan tertinggi di Korea. Sistem politik Jepang yang berlaku pada saat itu adalah sistem politik militer.⁴⁷

Pada saat itu, polisi militer Jepang berlaku pula sebagai polisi di wilayah Korea. Polisi militer tersebut memegang hak memerintah sehingga masyarakat sipil tidak berkuasa. Polisi militer juga memiliki hak untuk memberikan hukuman mati di tempat bagi rakyat Korea. Saat itu, selain dari polisi militer, semua guru sekolah negeri pun membawa pedang Jepang sebagai senjata dan alat untuk menegakkan kewibawaan penjajah Jepang di mata rakyat Korea. Sementara itu, kebijakan eksploitasi tetap dilakukan secara luas di Korea oleh imperialis keuangan Jepang.⁴⁸

Tahap Kedua, tahun 1920-an. Dengan adanya gerakan perjuangan kemerdekaan Korea, imperialism Jepang mulai memperbaiki kebijakan penjajahannya yang didasarkan pada kebijakan eksploitasi. Sebagai pengganti kebijakan eksploitasi, Jepang mengumumkan kebijakan politik kebudayaan, yang intinya sebenarnya sama dengan kebijakan politik militer sebelumnya. Dibawah

⁴⁶ Dita Feby Indriani, "Sejarah Kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang Terlengkap", dalam <https://sejarahlengkap.com/dunia/negara/sejarah-kemerdekaan-korea-selatan>. [Diakses 26 Desember 2020]

⁴⁷ Seung Yoon Yang, *Spirit Budaya & Politik Korea* (Jakarta: Kosa Kata Kita, 2016), h. 155.

⁴⁸ *ibid.*,

kebijakan tersebut, kebijakan menghancurkan rakyat Korea dan menyatukan rakyat Korea-Jepang tidak berubah sama sekali.⁴⁹

Akan tetapi, karena Jepang ingin menciptakan kesan bahwa Jepang bukanlah penjajah bangsa Korea, pada masa ini Jepang memperbolehkan rakyat Korea memperoleh Pendidikan. Pada masa ini proyek pembangunan dasar infrastruktur seperti pemasangan rel kereta api, pembangunan stasiun pembangkit listrik, fasilitas Pelabuhan, jalan raya, dan lain-lain mulai dikerjakan. Pembangunan itu memang berguna untuk memulai proses modernisasi Korea, namun jelas lebih dipergunakan untuk memperlancar kebijakan penjajahan Jepang, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Tahap Ketiga, tahun 1931-1945. Pada tahun 1931, Jepang mengobarkan Perang Manchuria. Kemenangan Jepang dalam Perang Manchuria berhasil meningkatkan posisi Semenanjung Korea secara strategis. Sejak saat itu, Jepang menjadikan Semenanjung Korea sebagai basis logistik perangnya. Dengan demikian, kebijakan politik kebudayaan di Korea sudah berakhir dan Jepang mulai secara langsung melakukan eksploitasi secara besar-besaran untuk membuat peralatan perang.⁵⁰ Setelahnya Korea tetap berada dibawah kendali jepang sampai Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tahun 1945, dan dengan kedaulatan *de jure*⁵¹ Korea dianggap telah diteruskan dari Dinasti Joseon ke Pemerintahan Sementara Republik Korea.⁵²

⁴⁹ *ibid.*, h. 156

⁵⁰ *ibid.*, h. 157-158

⁵¹ *De jure* adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan hukum", yang dibedakan dengan *de facto*, yang berarti "pada kenyataannya". Istilah *de jure* dan *de facto* digunakan sebagai ganti "pada prinsipnya" dan "pada praktiknya", ketika orang menggambarkan situasi politik

⁵² No Name, "Japanese Rule Begins", dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 26 Desember 2020]

2. Akhir Perang Dunia II dan Terbaginya Dua Korea

Pada tanggal 2 September tahun 1945, Perang Dunia II berakhir secara mutlak, ketika Jenderal Amerika Serikat, Douglas MacArthur, secara resmi menerima pengakuan kekalahan dari Jepang di atas kapal perang AS, Missouri.⁵³ Korea pun akhirnya bisa terbebas dari jajahan Jepang setelah dikolonialisasi selama 35 tahun lamanya akibat dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II, masa persaingan ideologi antara sosialisme-komunisme dengan demokrasi-kapitalisme dimulai. Pemimpin ideologinya masing-masing adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat.⁵⁴

Persaingan dua blok yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkat tajam pasca Perang Dunia II dan negara-negara di dunia dipaksa untuk memilih satu blok. Semenanjung Korea dalam waktu singkat akhirnya juga menjadi medan perang ideologi dari kedua blok, tidak hanya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, tetapi juga antara Dunia Komunis dan Dunia Barat.⁵⁵ Setelah Korea terbebas dari kolonialisasi Jepang, Uni Soviet beserta Amerika Serikat langsung mengirimkan delegasi untuk menduduki Korea. Amerika Serikat menduduki Korea dibagian Selatan, sedangkan Uni Soviet menduduki Korea bagian Utara.⁵⁶

Tidak seperti China, Manchuria, dan bekas koloni Barat yang direbut oleh Jepang pada tahun 1941–42, Korea, yang dianeksasi oleh Jepang sejak 1910, tidak

⁵³ Absal Bachtiar, “Bagaimana Kekalahan Jepang Menjadi Penentu Berhentinya Perang Dunia Kedua?”, dalam <https://kumparan.com/absal-bachtiar/bagaimana-kekalahan-jepang-menjadi-penentu-berhentinya-perang-dunia-kedua-1uC6e50UC99/full> [Diakses 01 Januari 2021]

⁵⁴ Seung Yoon Yang, *Spirit Budaya & Politik Korea* (Jakarta: Kosa Kata Kita, 2016), h. 250.

⁵⁵ *ibid.*, h. 251

⁵⁶ No Name, “Sejarah dan Dinamika Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara”, dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30066/4.%20Bab%20ii.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. [Diakses 28 Desember 2020]

memiliki pemerintahan asli atau rezim kolonial yang menunggu untuk kembali setelah permusuhan dengan Jepang berhenti. Sebagian besar penggugat kekuasaan adalah orang buangan yang dibuang di China, Manchuria, Jepang, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Para penggugat kekuasaan tersebut terbagi dalam dua kategori atau kelompok besar.⁵⁷

Kategori pertama terdiri dari para kaum revolusioner Marxis yang berkomitmen dan telah melawan Jepang sebagai bagian dari pasukan gerilya di Manchuria dan China. Salah satu dari orang buangan ini adalah seorang pemimpin gerilya kecil tapi sukses bernama Kim Il-sung, yang telah menerima beberapa pelatihan di Rusia dan telah menjadi mayor di tentara Soviet. Gerakan nasionalis Korea lainnya, yang juga tidak kalah revolusioner, mendapatkan inspirasi dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan industrialisme di Eropa, Jepang, dan Amerika. Para "ultranasionalis" tersebut terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing, salah satunya berpusat pada Syngman Rhee, yang menempuh pendidikannya di Amerika Serikat dan nantinya akan menjadi presiden pertama Korea Selatan.⁵⁸

Dalam upaya tergesa-gesa untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan penduduk Jepang di Korea yang diperkirakan berjumlah sekitar 700.000 orang, Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai kesepakatan pada bulan Agustus 1945 untuk membagi Korea menjadi dua di garis lintang 38 derajat (lintang 38° LU) demi keperluan administratif. Setidaknya dari perspektif Amerika, pembagian geografis ini berguna untuk sementara waktu. Namun Uni Soviet malah memulai pemerintahan teror yang berumur pendek di Korea Utara dan dengan cepat

⁵⁷ Allan R. Millet, "Revolution, Division, And Partisan Warfare, 1945–50", dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 28 Desember 2020]

⁵⁸ *ibid.*,

mempolitisasi divisi tersebut dengan mendorong ribuan pengungsi ke bagian selatan. Kedua belah pihak akhirnya tidak dapat menyetujui formula yang akan menghasilkan dan mendukung Korea yang bersatu, dan pada tahun 1947 Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman membujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memikul tanggung jawab atas negara tersebut, meskipun militer Amerika Serikat tetap memegang kendali atas Korea Selatan hingga tahun 1948.⁵⁹

Gambar 2.1 Pembagian Dua Korea di Sekitar Garis Lintang 38° LU



(Sumber: <https://www.khanacademy.org>)

Pembentukan Korea Selatan yang merdeka kemudian menjadi kebijakan PBB pada awal tahun 1948. Para Komunis Selatan menentang hal ini, dan pada musim gugur 1948 peperangan partisan terjadi dan telah melanda sebagian dari setiap provinsi Korea di bawah garis paralel ke-38. Pertempuran meluas menjadi perang perbatasan antara Tentara Republik Korea (ROKA) yang baru dibentuk di

⁵⁹ Allan R. Millet, "Revolution, Division, And Partisan Warfare, 1945–50", dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 28 Desember 2020]

Korea Selatan dan polisi perbatasan Korea Utara serta Tentara Rakyat Korea Utara (KPA).⁶⁰

Korea Utara sempat melancarkan 10 serangan gerilya lintas perbatasan untuk menarik unit ROKA menjauh dari pasukan gerilya mereka yang berada di daerah Selatan. Tetapi pemberontakan partisan dan usaha Korea Utara mencegah berdirinya Korea Selatan yang merdeka berakhir gagal. Namun demikian, hampir 8.000 anggota pasukan keamanan Korea Selatan dan setidaknya 30.000 orang Korea lainnya kehilangan nyawa. Banyak dari para korban sama sekali bukan pasukan keamanan atau gerilyawan bersenjata, tetapi hanya orang-orang yang diidentifikasi sebagai "sayap kanan" atau "merah" oleh para pihak yang berperang.⁶¹

Di bawah pengawasan dan dukungan positif Pasukan Uni Soviet, Kim Il-Sung yang pernah bertugas sebagai kapten Pasukan Merah Uni Soviet pada 1948 akhirnya mendirikan pemerintahan komunis dengan nama Republik Rakyat Demokrat Korea (Korea Utara), sedangkan Syngman Rhee yang pernah memperoleh gelar doktor dari Amerika Serikat mendirikan pemerintah pro-Amerika Serikat dengan nama Republik Korea (Korea Selatan) pada tahun yang sama.⁶² Pada saat itu rasa permusuhan antara kedua pemerintahan Korea tersebut mulai timbul, dan akhirnya pecalah perang Korea pada tahun 1950.⁶³

⁶⁰ Allan R. Millet, "Revolution, Division, And Partisan Warfare, 1945–50", dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 28 Desember 2020]

⁶¹ *ibid.*,

⁶² Mohtar Mas' oed dan Yang Seung Yoon, *Memahami Politik Korea* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 237.

⁶³ *ibid.*, h. 237-238

3. Perang Korea 1950-1953

Pada 25 Juni 1950, Korea Utara memulai perang dengan melancarkan invasi besar-besaran menerobos garis demarkasi 38° menuju Korea Selatan.⁶⁴ Hanya dalam tiga hari, Seoul berhasil direbut, dan dalam tiga bulan tentara Korea Utara bergerak maju ke ujung tenggara Semenanjung Korea. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat secara aktif bergabung dalam perang untuk membantu Korea Selatan, bahkan sejak perang tersebut dimulai. Pembenaran Amerika Serikat untuk ikut berperang di Semenanjung Korea adalah untuk melindungi negara Demokratis dari invasi Komunis.

Sebagai tanggapan, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian juga memberikan teguran terhadap invasi yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut.⁶⁵ Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi cepat meyerukan Korea Utara untuk menghentikan permusuhan dan menarik pasukannya dari wilayah Korea Selatan, tetapi Korea Utara menolaknya.⁶⁶ PBB pun dengan demikian setuju untuk mengirim *the UN forces*⁶⁷ yang terdiri atas pasukan dari 16 negara ke Semenanjung Korea dengan Amerika Serikat sebagai pimpinannya. Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya berubah menjadi perang internasional.⁶⁸

Selain Amerika Serikat dan PBB, intervensi pihak asing dalam Perang Korea juga dilakukan oleh China yang mendukung pihak Korea Utara dalam perang tersebut. Secara mendadak, pasukan China melakukan serangan terhadap pasukan

⁶⁴ Frassminggi Kamasa, *Perang Korea: Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea Dalam Perang yang Belum Selesai* (Yogyakarta: Narasi, 2016), h. 204.

⁶⁵ Association of Korean History Teachers, *A Korean History for International Readers: What Do Koreans Talk about Their Own History and Culture?* (Seoul: Humanist, 2010), h. 288.

⁶⁶ Frassminggi Kamasa, *loc.cit.*

⁶⁷ Pasukan Penjaga Perdamaian *United Nations*. Pasukan penjaga perdamaian dikontribusikan oleh negara-negara anggota *United Nations* secara sukarela.

⁶⁸ Association of Korean History Teachers, *loc.cit.*

sekutu Amerika Serikat dan Korea Selatan pada tanggal 25 Oktober 1950. Serangan dengan taktik gelombang manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah kembali situasi pertempuran. Dengan tambahan pasukan China, Korea Utara berhasil memukul mundur pasukan sekutu yang sempat menguasai wilayah Korea Utara, Pyongyang, hingga kembali ke perbatasan garis lintang 38 derajat.

Selain berhasil mendesak dan mengusir pasukan sekutu keluar dari Pyongyang, intervensi China bahkan juga berhasil membuat aliansi komunis menguasai Seoul. Pada tanggal 4 Januari 1951, pasukan sekutu Amerika Serikat dan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan terpaksa harus mundur untuk melakukan pertahanan strategis. Pasukan PBB pun kemudian sempat bergerak ke utara lagi untuk menangkis serangan tentara China. Setelah garis depan medan perang terbentuk di wilayah batas lintang 38 derajat, beberapa pertempuran yang melelahkan terus terjadi.⁶⁹ Pasukan Korea Selatan akhirnya bisa berhasil merebut kembali wilayah Seoul pada 15 Maret 1951.

Pada Juni 1951, Perang Korea telah mencapai titik kritis lainnya. Tentara China-Korea Utara, meskipun sudah kehilangan sekitar 500.000 korban sejak November 1950, jumlah tersebut telah berkembang menjadi 1.200.000 tentara. Pasukan dibawah Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengalami jatuhnya korban yang tidak sedikit, yaitu sekitar lebih dari 100.000 korban sejak intervensi China dalam Perang Korea.⁷⁰ Perang memasuki fase baru ketika perundingan gencatan senjata dimulai pada 10 Juli 1951.

⁶⁹ No Name, "Intervensi China dan Perlawanan Pasukan PBB", dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/625/war_panorama_i.html?lang=i#warEnterModal03. [Diakses 06 Januari 2021]

⁷⁰ Allan R. Millet, "Invasion and Counterinvasion, 1950-51 (To the negotiating table)", dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 06 Januari 2021]

Gambar 2.2 Alur Pergerakan Pasukan saat Perang Korea



(Sumber: Encyclopedia Britannica, Inc.)

Perang Korea terus berlanjut hingga perundingan gencatan senjata yang dimulai pada 10 Juli 1951 tersebut akhirnya menemui titik terang pada pertengahan tahun 1953. Ini berarti perundingan gencatan senjata Perang Korea memakan waktu selama kurang lebih dua tahun. Dengan mencatat rekor baru sebagai perundingan yang terlama dalam sejarah dunia, pasukan PBB dan pasukan komunis tetap saja mempunyai argumen yang berbeda dalam rincian-rincian perjanjian.⁷¹ Setelah lebih dari dua tahun berunding dan bernegosiasi, Korea Utara, China, Amerika Serikat, dan PBB barulah mencapai kesepakatan dan akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953.

⁷¹ No Name, “Penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata”, dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/625/war_panorama_i.html?lang=i#warSignModal. [Diakses 06 Januari 2021]

Perjanjian gencatan senjata itu memungkinkan para tahanan perang untuk tetap berada di tempat yang mereka sukai (antara Korea Utara dan Korea Selatan), menarik batas baru dekat garis demarkasi 38° yang memberikan Korea Selatan wilayah seluas lebih dari 1.500 mil persegi dan menciptakan "zona demiliterasi" seluas 2 mil. Secara teknis sebenarnya Perang Korea tidak pernah berakhir. Namun pertempuran berhenti ketika perjanjian gencatan senjata tahun 1953 telah ditandatangani oleh pihak Korea Utara, China, Amerika Serikat, dan PBB. Korea Selatan sendiri tidak menandatangani gencatan senjata tersebut dan hanya memilih untuk menghormatinya.⁷²

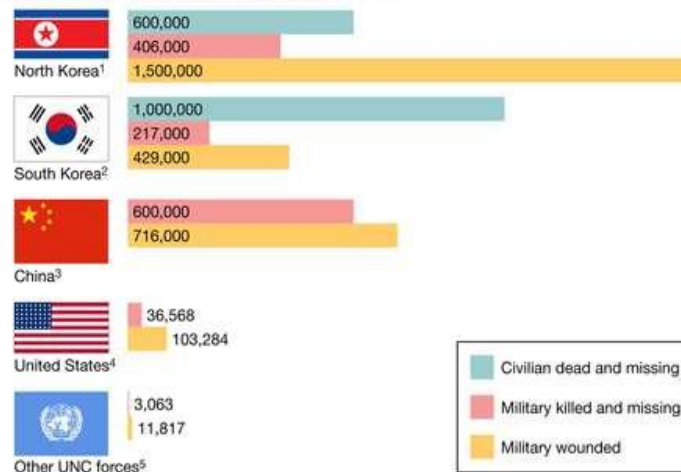
Perang Korea mengakibatkan banyak kematian dan menimbulkan banyak korban luka-luka yang berjatuh. Perang Korea juga menjadi penyebab kehancuran dari banyaknya ladang, gunung dan kota-kota yang ada di Semenanjung Korea. Diperkirakan sekitar 150.000 tentara Korea, 35.000 pasukan PBB, 520.000 milisi Korea Utara, dan ratusan ribu tentara China tewas dalam Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun tersebut. Jumlah korban dan orang yang hilang sebenarnya terlalu besar untuk dihitung. Selama perang, banyak warga sipil menjadi korban yang parah. Jumlah kematian warga sipil diperkirakan mencapai lebih dari satu juta orang. Sejumlah besar orang menjadi korban karena pemboman yang terjadi berulang-ulang.⁷³

Gambar 2.3 Perkiraan Jumlah Korban Perang Korea

⁷² Ramadhona, "Sejarah Singkat Perang Korea", dalam <https://www.kompasiana.com/dhnhz/5aeb066bab12ae483d688e93/sejarah-singkat-perang-korea?page=2>. [Diakses 08 Januari 2021]

⁷³ Association of Korean History Teachers, *A Korean History for International Readers: What Do Koreans Talk about Their Own History and Culture?* (Seoul: Humanist, 2010), h. 288.

Battle casualties of the Korean War (1950–53)



¹ Figures reflect the higher end of U.S. and South Korean estimates, which range from 500,000 to 600,000 civilian dead and missing, from 294,000 to 406,000 military killed and missing, and from 226,000 to 1,500,000 military wounded.

² South Korean estimates of civilian dead and missing range from 500,000 to 1,000,000. Official figure of military killed in action is 187,712.

³ Figures are U.S. and South Korean estimates. Official Chinese figures acknowledge 152,400 military killed and missing, 238,000 military wounded.

⁴ Figures reflect official U.S. tally, which counts 33,741 battlefield killed and missing and 2,827 dead and missing in war zone from other causes. U.S. military deaths outside the war zone were 17,678, bringing the total military dead and missing during the Korean War to 54,246.

⁵ No UNC member had more than 700 battlefield deaths except Turkey (721).

© Encyclopædia Britannica, Inc.

(Sumber: Encyclopedia Britannica, Inc.)

Sulit untuk memberikan perhitungan yang akurat tentang kerugian materi yang diakibatkan oleh terjadinya Perang Korea, tetapi kerusakan properti diperkirakan mencapai lebih dari 3 miliar dolar (dollar AS pada tahun 1953). Sekitar 43% dari fasilitas manufaktur, 41% dari kapasitas pembangkit listrik, dan 50% dari tambang batubara di Korea Selatan hancur atau rusak akibat terjadinya perang.⁷⁴ Setelah lebih dari satu juta korban pertempuran telah diderita oleh kedua belah pihak, dan bahkan setelah penandatanganan gencatan senjata pada tahun 1953, Perang Korea tetap berakhir dengan Semenanjung Korea masih terbagi menjadi dua negara musuh. Negosiasi pada tahun 1954 tidak menghasilkan kesepakatan lebih

⁷⁴ Ki Baik Lee, *A New History of Korea* (Cambridge: Harvard University Press, 1984), h. 380-381.

lanjut, dan garis depan telah diterima sejak saat itu sebagai batas *de facto*⁷⁵ antara Korea Utara dan Selatan.⁷⁶

B. Hubungan Dua Korea Pasca Perang Korea dan Perang Dingin

Beberapa tahun setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata, kedua Korea saling bersaing untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan internasional di luar negeri, dengan kediktatoran yang berkembang muncul di Selatan dan rezim personalis yang sangat tersentralisasi muncul di Utara. Selama beberapa dekade setelah perang, kontak antar pemerintah kedua Korea bisa dikatakan hampir tidak ada.⁷⁷ Sepanjang tahun 50-an dan 60-an kedua Korea telah menjadi sangat bermusuhan.

Hubungan tidak baik dan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara pasca Perang Korea bisa terlihat dari sering terjadinya berbagai serangan kecil maupun peristiwa tembak-menembak di sekitar daerah bebas militer. Kedua belah pihak juga sering mengirimkan gerilyawan dan menyusupkan mata-mata ke pihak lawan. Masing-masing pemerintahan sama sekali tidak diakui oleh lawannya, sedangkan semua rakyat di masing-masing pihak dipaksa mempelajari keunggulan ideologi mereka sendiri. Dimana di Korea Selatan masyarakatnya hanya dididik ideologi demokrasi dan kapitalisme, sedangkan di Korea Utara masyarakatnya dididik dengan ideologi komunisme dan sosialisme.⁷⁸

⁷⁵ *De facto* dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya" atau "pada praktiknya". Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

⁷⁶ Allan R. Millet, "Korean War: Introduction", dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 06 Januari 2021]

⁷⁷ Daniel Wertz, "Inter-Korean Relations", dalam <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations>. [Diakses 06 Januari 2021]

⁷⁸ Mohtar Mas'ood dan Yang Seung Yoon, *Memahami Politik Korea* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 238.

Pada akhir tahun 1960-an, peningkatan tajam terjadi dalam bentrokan di sepanjang *Demilitarized Zone*, bersamaan dengan percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung Hee. Serombongan gerilyawan khusus Korea Utara secara mendadak menyerang kediaman presiden, Cheong Wa Dae, dalam usahanya untuk membunuh Park Chung Hee. Dalam penyerangan tersebut semua gerilyawan Korea Utara ditembak mati kecuali satu orang, sedangkan jumlah polisi Korea Selatan yang menjadi korban cukup banyak.⁷⁹ Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab meningkatnya ketegangan antar-Korea ke titik tertinggi sejak perang.⁸⁰

Pada awal dekade 70-an, Korea Utara dan Korea Selatan mulai bersaing keras dalam hal kekuatan nasional, keunggulan sistem pemerintahan dan ideologinya sendiri. Sejak saat itu, kekuatan ekonomi nasional masing-masing pihak mulai sama. Korea Utara mementingkan industri berat, sedangkan Korea Selatan mengutamakan industri ringan sambil mengusahakan swasembada bahan pangan. Masa persaingan antar-Korea ini berlangsung sampai akhir tahun 80-an.⁸¹

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya sempat membaik pada tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh pemulihan hubungan AS-China yang secara fundamental mengubah arsitektur keamanan Asia Timur pada tahun 1970-an termasuk Semenanjung Korea. Pemerintah kedua Korea pun akhirnya merasa tertarik untuk memulai dialog dengan satu sama lain. Pembicaraan antar-Korea awalnya diadakan di bawah naungan Palang Merah, lalu mengarah pada Pernyataan

⁷⁹ *ibid.*, h. 240

⁸⁰ Daniel Wertz, "Inter-Korean Relations", dalam <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations>. [Diakses 06 Januari 2021]

⁸¹ Mohtar Mas' oed dan Yang Seung Yoon, *loc. cit.*

Bersama pertama tentang reunifikasi, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 1972. Namun *détente*⁸² di Semenanjung Korea ini hanya berumur pendek.

Pada tahun 1974, Ibu Negara Korea Selatan, Yuk Young Soo, tewas dalam upaya pembunuhan lain Park Chung-hee yang gagal, yang dilakukan oleh simpatisan Korea Utara kelahiran Jepang. Agen Korea Utara juga berusaha untuk membunuh penerus Park Chung Hee, yaitu Presiden Chun Doo Hwan, selama perjalanan kepresidenan ke Burma pada tahun 1983. Setelahnya Korea Utara juga mengebom penerbangan penumpang, Korean Air Flight 858, pada tahun 1987.

Meskipun ada beberapa periode dimana ketegangan hubungan antar-Korea memanas karena kejadian-kejadian yang tadi telah disebutkan, di tahun-tahun terakhir Perang Dingin hubungan antar-Korea sempat sedikit membaik. Misalnya seperti dialog antar-Korea yang akhirnya memungkinkan sejumlah kecil anggota keluarga Korea Selatan dan Korea Utara yang terpisah untuk diizinkan bersatu kembali sebentar di Seoul dan Pyongyang pada tahun 1985, walaupun periode dialog ini tidak berlangsung lama.

Pasca Perang Dingin, dialog antar-Korea yang signifikan dilanjutkan di bawah presiden pertama Korea Selatan yang terpilih secara demokratis, yaitu Roh Tae Woo (menjabat 1988-1993). Kebijakan *Nordpolitik*⁸³ Presiden Roh mengarah pada pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan sekutu utama tradisional Korea Utara, Uni Soviet dan China. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintahan Roh juga secara diplomatik menjangkau Korea Utara, mengizinkan

⁸² *Détente* (Prancis untuk 'relaksasi') adalah pengurangan ketegangan hubungan, terutama dalam situasi politik.

⁸³ *Nordpolitik* adalah sebutan untuk kebijakan luar negeri khas Korea Selatan yang berlaku saat Presiden Roh Tae Woo menjabat. Kebijakan tersebut memandu upaya Korea Selatan untuk menjangkau para sekutu tradisional Korea Utara, dengan tujuan menormalkan hubungan dengan sekutu terdekat Korea Utara, yaitu China, dan Uni Soviet.

perdagangan antar-Korea langsung pada tahun 1989 untuk pertama kalinya, dan memulai pertukaran olahraga antar-Korea.⁸⁴

Pada bulan Desember 1991, kedua Korea menandatangani "Perjanjian Dasar" tentang rekonsiliasi, non-agresi dan pertukaran dan kerjasama. Tak lama kemudian, kedua Korea mengeluarkan Deklarasi Bersama tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea, berjanji untuk tidak memiliki, memproduksi, atau menggunakan senjata nuklir dan melarang pengayaan uranium dan pemrosesan ulang plutonium. Hubungan antar-Korea setelahnya malah kembali berantakan di bawah kepemimpinan penerus Roh Tae Woo yaitu Presiden Kim Young Sam (menjabat 1993-1998).

Hubungan antar-Korea terus naik-turun selama beberapa tahun setelah Kim Young Sam menjabat karena masalah-masalah termasuk bantuan makanan, serangan kapal selam Korea Utara, dan diplomasi regional.⁸⁵ Hubungan antar-Korea baru membaik secara signifikan ketika Presiden Kim Dae jung menjabat sebagai presiden (1998-2003) dan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan *Sunshine Policy*. Penerapan *Sunshine Policy* membawa pengaruh baik terhadap hubungan antar-Korea, sebab penerapan *Sunshine Policy* memungkinkan terjadinya Inter-Korean Summit pertama dalam sejarah Korea dan memungkinkan terealisasinya kunjungan Kim Dae Jung ke Korea Utara.⁸⁶

⁸⁴ Daniel Wertz, "Inter-Korean Relations", dalam <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations>. [Diakses 06 Januari 2021]

⁸⁵ *ibid.*,

⁸⁶ Mohtar Mas' oed dan Yang Seung Yoon, Memahami Politik Korea (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 246.

C. **Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/*Inter-Korean Summits* tahun 2000 & tahun 2007**

Hubungan antara dua Korea sempat berada di titik yang baik ketika *Inter-Korean Summit* berhasil direalisasikan. *Inter-Korean Summit*/Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea merupakan pertemuan antara para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelum masa pemerintahan presiden Moon Jae In, terdapat dua pertemuan besar atau KTT antar-Korea yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah KTT antar-Korea pada tahun 2000 dan yang kedua adalah KTT antar-Korea pada tahun 2007. Agenda-agenda KTT antar-Korea tersebut biasanya meliputi topik-topik seperti pengakhiran perang tahun 1953 secara resmi (karena pada akhir perang tahun 1953 hanya diberlakukan gencatan senjata), permasalahan kerjasama ekonomi, kerjasama sosial-budaya, penempatan masif pasukan di Zona Demilitarisasi Korea, pengembangan senjata nuklir di Korea Utara serta permasalahan HAM.

1. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/*Inter-Korean Summit* tahun 2000

Inter-Korean Summit/Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea tahun 2000 diadakan di Pyongyang dari 13 sampai 15 Juni 2000 dan merupakan sebuah pertemuan antara pemimpin Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) Kim Jong Il dengan presiden Korea Selatan Kim Dae Jung. *Inter-Korean Summits* pada tahun 2000 adalah Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea perdana sejak Perang Korea yang terjadi pada 1950-1953.⁸⁷

⁸⁷ No Name, "KTT antar-Korea yang pertama di tahun 2000.", dalam http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=&id=&board_seq=339274. [Diakses 16 Desember 2020]

Presiden Kim Dae Jung dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Korea Selatan pada tanggal 25 Februari tahun 1998, pertama kali mengungkapkan niatnya untuk menggelar konferensi tingkat tinggi antar-Korea tahun 2000, yang akan menjadi pertemuan perdana di antara pemimpin dua Korea sejak terpecahnya dua Korea.⁸⁸ Dalam kunjungannya ke Jerman pada bulan Maret 2000 pun, melalui Deklarasi Berlin presiden Kim Dae Jung juga menyerukan kepada pihak Korea Utara agar mulai mengembangkan kembali dialog langsung dengan pihak Korea Selatan.⁸⁹

Pada tahun 2000 Presiden Kim Dae Jung kemudian mengirim mantan Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Park Ji-won sebagai utusan khusus untuk Korea Utara. Setelahnya, Park Ji-won mengadakan kontak dengan Wakil Ketua Komite Korea Utara untuk Perdamaian Asia Pasifik Song Ho-gyong di Singapura pada Maret 2000. Korea Utara menerima ajakan dialog Korea Selatan untuk mengeluarkan diri dari isolasi dan membuka peluang untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi.⁹⁰ Sehingga kemudian pada tanggal 8 April 2000 terjadilah kesepakatan untuk diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea yang pertama kali pada tanggal 13-15 Juni 2000 di kota Pyongyang, Korea Utara.⁹¹

⁸⁸ *ibid.*,

⁸⁹ Dessy Fathimatuzzahrah, "Studi Tentang Pemerintahan Presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan Tahun 1998-2003", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/241758-none-2baa3780.pdf>. [Diakses 16 Desember 2020]

⁹⁰ No Name, "KTT antar-Korea yang pertama di tahun 2000.", dalam http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=&id=&board_seq=339274. [Diakses 16 Desember 2020]

⁹¹ Fahrin Umarama, Michael Mamentu, dan Trilke E. Tulung, "Prospek Penyelesaian Konflik Korea Selatan dan Korea Utara", dalam *Jurnal Politico*, Vol. 7, No. 4 (2018), h. 5.

Tabel 2.1 Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2000

Masalah Keluarga Terpisah	<ul style="list-style-type: none">• Reuni keluarga terpisah antar Korea• Pembukaan tempat reuni bagi keluarga terpisah (masih menghadapi hambatan)
Perwujudan hubungan kerjasama ekonomi antar-Korea	<ul style="list-style-type: none">• Proyek kompleks Industri Korea Selatan di kota Gaesong Korea Utara• Proyek penyambungan rel kereta api jalur Kyongui dan Donghae dan jalan darat antar Korea• Proyek hubungan kerjasama industri ringan dan sumber daya alam antar Korea
Dialog langsung antar Korea	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan tingkat menteri (mengadakan 21 kali pertemuan secara rutin hingga awal Juni 2007 lalu)• Komisi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Ekonomi antar Korea (membahas dan melaksanakan berbagai proyek ekonomi antar Korea secara nyata)• Pertemuan militer (Pertemuan militer tingkat kerja, pertemuan militer tingkat perwira tinggi, dan pertemuan menteri pertahanan selama ini berhasil meningkatkan rasa saling percaya)

(Sumber: world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2000.htm?lang=i)

Namun hubungan dua Korea setelahnya mengalami tantangan dengan adanya isu terorisme internasional dan rezim Korea Utara dilibatkan oleh pemerintah Amerika serikat di bawa pimpinan George W. Bush sebagai negara

anggota “poros setan” (*Axis of Evil States*) dan Korea Utara dimasukkan sebagai salah satu negara yang dimungkinkan sebagai sasaran penyerangan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi karena adanya tuduhan terhadap Korea Utara yang dianggap membuat program pengayaan uranium dan telah melanggar perjanjian *Inter-Korean Summit* pada bulan Juni 2000 serta *six party talk* pada bulan April 2003. Sehingga kemudian terjadilah kembali krisis nuklir untuk kedua kalinya setelah krisis nuklir tahun 1994.⁹²

2. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/*Inter-Korean Summits* tahun 2007

Inter-Korean Summit/Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea 2007 diadakan antara 2 dan 4 Oktober 2007, di Pyongyang, Korea Utara. Konferensi ini merupakan pertemuan antara Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) yang diwakili oleh pemimpinnya Kim Jong Il dan Republik Korea (Korea Selatan) yang diwakili oleh presidennya saat itu yaitu Roh Moo Hyun. Konferensi yang terjadi pada tahun 2007 tersebut pun merupakan KTT antar-Korea kedua setelah KTT antar-Korea pertama yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2000.

Konferensi ini juga disebut sebagai Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea 10.4. Hal tersebut dikarenakan pada pertemuan puncak KTT antar-Korea tahun 2007 yang bersejarah itu, diakhiri dengan pengumuman dan penandatanganan Pernyataan Bersama 4 Oktober oleh kedua belah pihak. Pernyataan Bersama 4 Oktober tersebut disebut juga sebagai deklarasi pengembangan hubungan antar-Korea, perdamaian, dan kemakmuran.⁹³

⁹² *ibid.*, h. 6

⁹³ No Name, “Proses Pelaksanaan [Pertemuan puncak antar-Korea tahun 2007]”, dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i. [Diakses 8 Desember 2020]

Tabel 2.2 Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2007

<p>Implementasi Deklarasi Bersama 15 Juni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penuntasan masalah unifikasi secara independen - Implementasi dan peringatan Deklarasi Bersama 15 Juni
<p>Hubungan antar-Korea yang saling hormat dan percaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain - Melakukan perubahan undang-undang dan sistem kebijakan dalam rangka mengembangkan hubungan antar-Korea berorientasi pada unifikasi - Promosi dialog di berbagai bidang termasuk parlemen
<p>Peredaan ketegangan militer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama erat untuk mengakhiri permusuhan militer, meredakan ketegangan dan menjamin perdamaian di Semenanjung Korea - Menolak perang apapun di Semenanjung dan menaati perjanjian non-agresi - Mengadakan pertemuan Menteri pertahanan antar-Korea di Pyongyang pada bulan November guna membahas penetapan zona penangkapan ikan bersama dan mengubahnya menjadi zona

	<p>perdamaian, dan membahas masalah pembangunan kepercayaan militer untuk mewujudkan tujuan itu</p>
<p>Pengakhiran gencatan senjata dan pembangunan perdamaian secara permanen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pertemuan antara 3 atau 4 pemimpin negara yang terlibat dalam masalah di Semenanjung Korea untuk mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea - Berupaya untuk memperlancar implementasi ‘Pernyataan Bersama 18 September’ dan ‘Persetujuan 13 Februari’ guna menuntaskan masalah nuklir di Semenanjung Korea
<p>Kerjasama ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi berimbang dan kemakmuran bersama di Semenanjung Korea, kedua belah pihak mengaktifkan proyek kerjasama ekonomi antar-Korea dengan basis berkesinambungan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kemakmuran bersama, dan saling membantu - Mengembangkan investasi pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber

	<p>daya alam, serta memberikan syarat prioritas dan lebih banyak keuntungan dalam proyek.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan ‘zona perdamaian dan kerjasama khusus di Laut Barat’ di daerah Haeju dan di sekitarnya, pembentukan zona penangkapan ikan bersama, pembangunan zona ekonomi khusus, penggunaan pelabuhan Haeju, pembukaan jalur pelayaran langsung melalui Haeju serta penggunaan bersama muara sungai Han. - Peluncuran proyek pembangunan tahap kedua Kawasan Industri Gaesong - Pembukaan layanan kereta barang antara Munsan dan Bongdong - Penyelesaian berbagai tindakan institusional, termasuk hal-hal yang terkait urusan imigrasi, komunikasi dan prosedur bea cukai - Pembahasan perbaikan jalur rel antara Gaesong-Shineuiju dan jalan raya Gaesong-Pyeongyang untuk penggunaan bersama jalur tersebut.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kompleks kerjasama galangan kapal di Anbyeon dan Nampo. - Melanjutkan proyek kerjasama di bidang pertanian, kesehatan, dan jasa medis serta perlindungan lingkungan hidup - Mengangkat status ‘Komite Pelaksana Kerjasama Ekonomi antar-Korea’ yang telah ada dengan ‘Komite Bersama untuk Kerjasama Ekonomi antar-Korea’ yang dipimpin oleh pejabat tingkat Wakil Perdana Menteri.
Pertukaran dan kerjasama di sektor sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertukaran dan kerjasama di bidang sosial-budaya yang mencakup sejarah, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan olahraga - Melakukan program pariwisata gunung Baekdu dan pembukaan layanan penerbangan langsung antara Seoul dan gunung Baekdu untuk tujuan wisata itu. - Pengiriman supporter bersama ke Olimpiade Beijing 2008 lewat jalur kereta Gyengeui
Kerjasama kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan reuni antara anggota keluarga yang terpisah dan sanak

	<p>saudaranya serta mempromosikan pertukaran pesan lewat video (korespondensi video) antar-Korea.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menempatkan perwakilan masing-masing di pusat reuni permanen di gunung Geumgang dan mengadakan reuni secara teratur. - Kerjasama secara aktif dalam keadaan darurat termasuk bencana alam
Peningkatan kerjasama di panggung internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama untuk mempromosikan keharuman bangsa Korea, dan hak warga Korea di luar negeri

(Sumber:http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i)

D. Berbagai Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara pada Masa Pemerintahan Sebelum Moon Jae In

1. Masa Pemerintahan Park Chung Hee (1963-1979)

Ketika Park Chung Hee mulai menjabat sebagai presiden Korea Selatan, ikatan masa lalunya dengan komunisme menciptakan ketakutan bagi Amerika Serikat dan harapan untuk dialog baru dengan Korea Utara. Harapan ini menyebabkan Kim Il Sung, pemimpin Korea Utara pada saat itu, mengirimkan utusan terpercaya Korea Utara untuk bertemu dengan Park Chung Hee. Namun, alih-alih bertemu dengan utusan terpercaya Korea Utara tersebut, Park Chung Hee

malah memutuskan untuk mengeksekusi utusan yang dikirim oleh Kim Il Sung itu.⁹⁴

Ketika Korea Selatan menjadi lebih stabil secara ekonomi dan menumbuhkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang, Kim Il Sung semakin yakin bahwa cara terbaik untuk mewujudkan reunifikasi adalah melalui perang non-konvensional. Perang yang non-konvensional tersebut akhirnya menjadi salah satu karakteristik yang paling menonjol dari interaksi antara Korea Selatan dan Korea Utara selama rezim pemerintahan Park Chung Hee. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sempat sangat memanas hingga pada bulan Januari 1968, 31 orang yang berasal dari unit Korea Utara berusaha menyerbu *Blue House* (gedung kepresidenan milik Korea Selatan) untuk membunuh Park Chung Hee.⁹⁵

Terlepas dari hubungan di antara kedua Korea yang sempat memanas sebelumnya, Park Chung Hee sempat mengutarakan harapannya akan tercapainya reunifikasi dua Korea. Keinginan Park Chung Hee akan reunifikasi dua Korea awalnya terlihat dalam pidato yang disampaikan olehnya pada *Liberation Day* tanggal 15 Agustus 1970. Dalam pidatonya, Presiden Park mengemukakan gagasan kemungkinan untuk menghapus sedikit demi sedikit berbagai batasan yang telah terbentuk antara Korea Selatan dan Korea Utara, demi kepentingan menciptakan kesepakatan bersama terkait reunifikasi dan sebagai bentuk konsiderasi kemanusiaan.⁹⁶

⁹⁴ Adam de Bear, "From Sunshine To Storm Clouds: An Examination of South Korea's Policy on North Korea", dalam *Michigan State International Law Review*, Vol. 23, No. 3 (2015), h. 832.

⁹⁵ *ibid.*, h. 832-833

⁹⁶ Nurul Hanafiaty, "Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara.", dalam <http://repository.unair.ac.id/87738/5/Nurul%20Hanafiaty.pdf>. [Diakses 28 Februari 2021]

Selain itu, ada beberapa interaksi positif juga yang terjadi di antara kedua Korea selama pemerintahan Park Chung Hee. Interaksi tersebut salah satunya adalah pada tahun 1971 anggota dari Perhimpunan Palang Merah milik masing-masing Korea mengusulkan untuk diadakannya pertemuan antara pejabat tinggi dari kedua Korea. Pada awal tahun 1972, Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA) sebagai perwakilan Korea Selatan dibawa ke Pyongyang untuk bertemu dengan seorang pejabat tinggi Korea Utara, dimana hal ini menandai kesempatan pertama bagi seorang pejabat Korea Selatan untuk pergi ke Pyongyang untuk berunding.

Setelahnya pada akhir April tahun 1972, kepala Badan Intelijen Pusat Korea Selatan (KCIA) pergi ke Pyongyang dan dibawa untuk menemui Kim Il Sung. Pertemuan itu dianggap sukses dan berakhir dengan dikeluarkannya *Joint Statement* 1972 atau Pernyataan Bersama 1972 yang ditandatangani oleh kepala KCIA dan Kim Il Sung sendiri, di mana reunifikasi damai akhirnya dijadikan sebagai tujuan bagi kedua Korea. Pernyataan Bersama tahun 1972 tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk membentuk hubungan kedua Korea ke depannya.⁹⁷ Dalam Pernyataan Bersama tahun 1972 kedua Korea menyepakati tiga prinsip berikut untuk mewujudkan reunifikasi:

- 1) Reunifikasi harus dicapai tanpa bergantung pada kekuatan atau campur tangan eksternal;
- 2) Reunifikasi harus dicapai secara damai tanpa menggunakan kekuatan militer melawan pihak lain; dan

⁹⁷ Adam de Bear, "From Sunshine To Storm Clouds: An Examination of South Korea's Policy on North Korea", dalam *Michigan State International Law Review*, Vol. 23, No. 3 (2015), h. 833.

- 3) Kedua pihak harus memajukan dan mengutamakan persatuan nasional sebagai satu bangsa atas perbedaan apapun [antara] sistem ideologis dan politik.

Selain itu, tujuan kedua Korea untuk berfokus pada reunifikasi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama tahun 1972 akhirnya juga mempengaruhi kebijakan Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Chung Hee. Salah satunya adalah Konstitusi Republik Ke-empat milik Korea Selatan (Konstitusi Yushin) yang diamandemen hanya beberapa bulan setelah perjanjian kedua Korea dalam Pernyataan Bersama tahun 1972 diresmikan. Konstitusi Yushin sendiri menandai versi pertama dari Konstitusi Korea Selatan yang menampilkan konsep “unifikasi damai”. Konstitusi Yushin juga merupakan suatu konstitusi yang paling awal dalam memberikan kontribusi terkait dengan "tugas Presiden untuk mengejar unifikasi damai tanah air" bagi pemerintahan-pemerintahan Korea Selatan setelahnya, serta yang menjadi akar dari konsep para presiden Korea Selatan yang harus menyebutkan unifikasi damai dalam sumpah pengukuhan.⁹⁸

Presiden Park Chung Hee juga sempat berusaha untuk menerapkan kebijakan non-agresi terhadap Korea Utara sebagai usaha untuk mewujudkan keinginannya akan reunifikasi. Tetapi, sayangnya respon Korea Utara terhadap pengajuan perjanjian non-agresi setelahnya adalah negatif.⁹⁹ Kemudian, pada masa pemerintahan Park Chung Hee juga muncul Deklarasi 8.15 yang kemudian dijadikan pedoman diplomasi Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa

⁹⁸ *ibid.*, h. 834

⁹⁹ Nurul Hanafiaty, “Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara.”, dalam <http://repository.unair.ac.id/87738/5/Nurul%20Hanafiaty.pdf>. [Diakses 28 Februari 2021]

tersebut. Deklarasi 8.15 memiliki pernyataan utama terkait dengan “metode-metode untuk membangun sebuah fondasi demi unifikasi yang damai”.¹⁰⁰

2. Masa Pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1993)

Pada masa pemerintahannya, Presiden Roh Tae Woo mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan “*Nordpolitik*”. *Nordpolitik* adalah istilah untuk kebijakan luar negeri pragmatis baru milik Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Roh Tae Woo. Istilah “*Nordpolitik*” mulanya pertama kali digunakan secara singkat oleh pemerintahan Presiden Park Chung Hee pada tahun 1973, dimana istilah tersebut merujuk pada kebijakan pintu terbuka terhadap negara-negara komunis. Namun, konfrontasi antara dua negara Korea di Semenanjung Korea terus menghalangi upaya lebih lanjut untuk menjalin hubungan kerja sama lintas ideologis di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya hingga akhir tahun 1980-an.

Pemerintahan Roh Tae Woo-lah yang kemudian membuat langkah ambisius untuk menormalisasi hubungan luar negeri Korea dengan negara-negara komunis, menargetkan dua tetangga raksasa utara, Rusia dan China, untuk mengatasi perbedaan ideologis. Presiden Roh Tae Woo mendeklarasikan “*Nordpolitik*” sebagai kebijakan “*New Détente*”¹⁰¹, ketika ia merancangnyanya sebagai alat yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan Korea

¹⁰⁰ Park Young Ho, "South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations.", dalam *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, Vol. 21 (2014), h. 4-5.

¹⁰¹ *Détente* (Prancis untuk 'relaksasi') adalah pengurangan hubungan ketegangan, terutama dalam situasi politik.

Utara.¹⁰² Selain mengeluarkan kebijakan “*Nordpolitik*”, Presiden Roh Tae Woo juga mengeluarkan Deklarasi 7 Juli sebagai pedoman kebijakan luar negerinya.

Deklarasi tersebut memiliki enam proposal: (1) kerjasama aktif antara kedua Korea, dan pencabutan banyak pembatasan perjalanan; (2) pertukaran surat dan kunjungan oleh keluarga yang terpisah; (3) pernyataan niat untuk memperluas perdagangan antara Korea Utara dan Korea Selatan; (4) penyeimbangan, pengembangan, dan peningkatan pertukaran barang non-militer dengan lebih banyak negara; (5) kerjasama luar negeri untuk kebaikan bangsa; dan (6) membantu Korea Utara meningkatkan hubungan dengan negara-negara kapitalis, dan untuk Korea Selatan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara sosialis.

Salah satu hal terpenting dalam deklarasi tersebut adalah sinyal kepada komunitas internasional bahwa Korea Selatan secara resmi tidak lagi menganggap Korea Utara sebagai ancaman bagi Korea Selatan. Hal tersebut terlepas dari kekhawatiran analis militer Korea Selatan dan Amerika Serikat yang khawatir bahwa Korea Utara masih terus membangun pasukan darat konvensional dan pasukan perang non-konvensional sejak tahun 1970-an.¹⁰³ Dalam deklarasi Juli milik pemerintahan Roh Tae Woo, pemerintah Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak Perang Korea juga mengusulkan pengakuan *de facto*¹⁰⁴ Korea Utara.¹⁰⁵

¹⁰² Yong Jick Kim, “The Nordpolitik as President Rho Tae Woo's New Foreign Policy, 1988-1992”, dalam http://www.ekaas.org/lib/common/download.php?fpath=/data/bbs/kjas_board/. [Diakses 20 Februari 2021]

¹⁰³ Grażyna Strnad, “The Sixth Republic Under Roh Tae Woo: The Genesis of South Korean Democracy”, dalam *Polish Political Science*, Vol. 39 (2010), h. 220.

¹⁰⁴ *De facto* dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya" atau "pada praktiknya". Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

¹⁰⁵ Yong Jick Kim, “The Nordpolitik as President Rho Tae Woo's New Foreign Policy, 1988-1992”, dalam http://www.ekaas.org/lib/common/download.php?fpath=/data/bbs/kjas_board/. [Diakses 20 Februari 2021]

Kemudian pemerintahan Presiden Roh Tae Woo meluncurkan “*Northern Policy*” menjelang diadakannya Olimpiade Seoul 1988. Presiden Roh bersikeras bahwa partisipasi negara-negara dalam pertandingan tersebut akan membantu menghilangkan hambatan antara Timur-Barat, dan membawa era baru rekonsiliasi serta kerja sama internasional. “*Northern Policy*” memberikan tekanan kepada Korea Utara untuk melanjutkan dialog dengan Korea Selatan, yang mengarah pada penandatanganan pakta non-agresi dan rekonsiliasi antara kedua Korea pada tahun 1991.¹⁰⁶

3. Masa Pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003) dan Roh Moo Hyun (2003-2008)

Kebijakan Sinar Matahari atau *Sunshine Policy* merupakan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara selama masa kepresidenan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun. Nama resmi kebijakan tersebut adalah “*Comprehensive Engagement Policy towards North Korea*” atau “Kebijakan Keterlibatan Komprehensif terhadap Korea Utara” dan pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan ke-15, yaitu Kim Dae Jung, pada tahun 1998. Istilah “*Sunshine Policy*” berasal dari salah satu dongeng Aesop, “*The North Wind and the Sun*”, dimana *Sunshine Policy* sendiri memang ditujukan untuk melonggarkan pengontrolan atau penahanan terhadap Korea Utara, untuk merangkul Korea Utara, hingga akhirnya membuat pemerintah Korea Utara melakukan denuklirisasi dengan sendirinya.

Kebijakan *Sunshine Policy* tergolong cukup mencolok dan mengejutkan pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan banyak warga dan cendekiawan yang mendesak untuk diadakannya tindakan yang lebih keras dan

¹⁰⁶ Grażyna Strnad, *loc. cit.*

lebih konservatif terhadap Korea Utara pada saat itu. Desakan tersebut sebenarnya disebabkan oleh adanya antagonisme yang meluas terhadap Korea Utara karena provokasi militernya yang kejam terhadap Korea Selatan dan kebrutalannya terhadap warganya sendiri sebelum kebijakan *Sunshine Policy* dikeluarkan.¹⁰⁷

Inti dari *Sunshine Policy* sebenarnya berasal dari Ostpolitik, upaya normalisasi Jerman Barat yang terkenal terhadap Jerman Timur, di mana pemerintah Jerman Barat mengakui Jerman Timur tidak hanya sebagai negara yang normal dan merdeka, tetapi juga sebagai bangsa yang sangat dekat. Jerman Barat bahkan juga memberikan bantuan hingga 57,6 miliar dolar (USD) untuk mendukung Jerman Timur. Berdasarkan keberhasilan kebijakan Jerman Barat yang akhirnya mengarah pada penyatuan yang berhasil dengan Jerman Timur, Presiden Kim Dae Jung kemudian memperkenalkan tiga prinsip utama atau dasar dari *Sunshine Policy* dengan mempertimbangkan keunikan semenanjung Korea.¹⁰⁸

Tiga prinsip dasar *Sunshine Policy* di antaranya adalah pemerintah Korea Selatan tidak akan mentoleransi segala bentuk provokasi militer yang diinisiasi oleh Korea Utara, dan akan menjaga deterensi terhadap Korea Utara dengan memperkuat pertahanan militer Amerika Serikat-Korea Selatan. Kemudian yang kedua pemerintah Korea Selatan secara jelas tidak memiliki intensitas untuk mengabsorpsi Korea Utara. Terakhir, pemerintah Korea Selatan akan secara aktif membangun kerja sama dan rekonsiliasi di antara Korea Selatan dengan Korea Utara.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Jesse Min, "The Sunshine Policy of South Korea", dalam <http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/>. [Diakses 26 Februari 2021]

¹⁰⁸ *ibid.*,

¹⁰⁹ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 159.

Sunshine Policy berbeda dengan dengan preferensi kebijakan luar negeri Korea Selatan dengan Korea Utara sebelumnya, karena *Sunshine Policy* berusaha untuk menyadarkan masyarakat Korea Selatan dalam memahami bahwa Korea Utara bukanlah musuh dari Korea Selatan. Dalam hal reunifikasi, Kim Dae Jung mengatakan bahwa kata unifikasi tidak akan digunakan untuk menjelaskan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahannya, dan menggantikannya dengan istilah *constructive engagement policies* dengan tujuan menghindari Korea Utara merasa terpicu akan intensi Korea Selatan untuk melakukan absorpsi terhadap negaranya.

Melalui *Sunshine Policy*, beberapa perkembangan dalam dinamika hubungan antar-Korea mengalami peningkatan. Salah satunya adalah pemerintah Korea Selatan berusaha untuk melaksanakan pertemuan *Inter-Korean Summit* yang dilaksanakan pada 15 Juni 2000. *Inter-Korean Summit* tersebut kemudian menghasilkan *joint declaration* yang disepakati oleh kedua Korea.¹¹⁰ Presiden Kim Dae Jung pun akhirnya dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian berkat pencapaiannya karena penerapan *Sunshine Policy* pada tahun 2000 tersebut.¹¹¹

Kemudian konsep *Sunshine Policy* juga tetap dijalankan oleh presiden selanjutnya setelah Kim Dae Jung yaitu Roh Moo Hyun. Penerapan konsep kebijakan *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun pun menghasilkan dibuatnya *peace declaration* pada tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kim Jong Il dan Roh Moo Hyun dalam sebuah pertemuan *Inter-Korean Summit*. Namun, kebijakan Roh Moo Hyun terhadap Korea Utara

¹¹⁰ *ibid.*, h. 159-160

¹¹¹ Jesse Min, "The Sunshine Policy of South Korea", dalam <http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/>. [Diakses 26 Februari 2021]

disebut sebagai *The Policy of Peace and Prosperity* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perdamaian di Semenanjung Korea dan menjadikan wilayah Semenanjung Korea sebagai pusat ekonomi di wilayah Asia Timur.¹¹²

4. Masa Pemerintahan Park Geun Hye (2013-2017)

Pada masa pemerintahan Presiden Park Geun Hye, Korea Selatan menggunakan kebijakan atau strategi *Trustpolitik* sebagai dasar dari kebijakan luar negerinya. *Trustpolitik* sendiri terdiri atas tiga bagian. Pertama, membangun kepercayaan antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang ditujukan untuk mencegah Korea Utara terus mengejar peningkatan kapabilitas nuklir, dan pada akhirnya dapat mempromosikan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea. Kedua, President Park Geun Hye juga telah mengusulkan *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NEAPCI) atau Prakarsa Perdamaian dan Kerjasama Asia Timur Laut, untuk menjalin rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama antara China, Jepang, dan Korea Selatan. Terakhir, Korea Selatan juga akan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara di luar wilayah regionalnya, termasuk negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), India dan Eropa.¹¹³

Kebijakan *Trustpolitik* yang dijalankan oleh Park Geun Hye terhadap Korea Utara berfokus pada pembangunan kepercayaan antara Korea Selatan dengan Korea Utara.¹¹⁴ Usaha pembangunan kepercayaan tersebut diharapkan oleh

¹¹² Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 160.

¹¹³ Sarah Teo, "South Korea's Foreign Policy in 2013: Building Trust in East Asia", dalam <https://www.e-ir.info/2014/02/06/south-koreas-foreign-policy-in-2013-building-trust-in-east-asia/>. [Diakses 23 Februari 2021]

¹¹⁴ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 160.

pemerintahan Park Geun Hye agar dapat memungkinkan kedua Korea untuk lebih mengembangkan hubungan di antara keduanya, membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea, serta dapat meletakkan dasar untuk unifikasi di masa depan. Dikutip dari artikel resmi yang diterbitkan oleh *Ministry of Unification* Korea Selatan, *trust-building process* (proses membangun kepercayaan) di Semenanjung Korea merupakan upaya untuk menjaga perdamaian dengan cara membangun sikap keamanan yang kokoh dan yang tidak mentolerir provokasi bersenjata yang ditimbulkan oleh Korea Utara, serta mendorong Korea Utara untuk turut mengambil jalan membangun kepercayaan untuk menciptakan perdamaian abadi.¹¹⁵

Melalui *Trustpolitik*, pemerintahan Park Geun Hye menginginkan kedua Korea untuk secara bertahap dapat membangun rasa saling percaya melalui dialog yang berkelanjutan, komitmen bersama terhadap janji-janji yang dibuat, serta upaya untuk meningkatkan berbagai pertukaran dan kerja sama. Melalui kebijakan *Trustpolitik*-nya juga, pemerintahan Park Geun Hye menegaskan bahwa jika terjadi suatu kesalahan Korea Utara yang merusak perdamaian, maka pemerintah Korea Selatan secara jelas menganggap bahwa tindakan yang salah tersebut harus dibayar dengan sanksi. Oleh karena itu, Korea Selatan mendorong Korea Utara untuk terus mengutamakan mengambil jalur kerja sama.¹¹⁶

Dikutip dari artikel resmi yang diterbitkan oleh *Ministry of Unification* Korea Selatan tentang *Trustpolitik* atau kebijakan *Trust-Building Process*, Korea Selatan dengan kebijakannya yang berlaku pada masa pemerintahan Park Geun Hye

¹¹⁵ Ministry of Unification, "Trust-Building Process on the Korean Peninsula", dalam https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_process.pdf. [Diakses 23 Februari 2021]

¹¹⁶ *ibid.*,

tersebut juga akan memastikan bahwa Korea Utara memahami bahwa hanya dengan membangun kepercayaan melalui dialog dan kerja sama yang tulus lah yang akan berakhir dengan menuai keuntungan bersama. Kebijakan *Trust-Building Process* pada masa pemerintahan Park Geun Hye juga menuntut beberapa hal yaitu:

- (a) kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara;
- (b) kepercayaan publik terhadap pemerintah Korea Selatan; dan
- (c) kepercayaan dari komunitas internasional.¹¹⁷

Selain *Trustpolitik*, Park Geun Hye juga meluncurkan *Dresden Doctrine/Initiatives*, di mana Park Geun Hye menekankan terhadap tiga bidang penting yaitu, kemanusiaan, *co-prosperity*, dan intergasi. Dalam menjalankan upaya reunifikasi, Park Geun Hye membentuk beberapa rencana seperti, mempertemukan kembali keluarga yang terpisah; mengembalikan rasa kebangsaan; memperluas bantuan ke Korea Utara; dan membangun kepercayaan antara kedua Korea dan kemudian keduanya akan memulai untuk membentuk program-program ekonomi bersama serta investasi terhadap proyek pembangunan infrastruktur sosial dalam bidang telekomunikasi dan transportasi.¹¹⁸

E. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pada Masa Pemerintahan Moon Jae In

Semenjak Moon Jae In mulai menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2017, hubungan baik antara Korea Selatan dan Korea Utara berhasil

¹¹⁷ Ministry of Unification, "Trust-Building Process on the Korean Peninsula", dalam https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_process.pdf. [Diakses 23 Februari 2021]

¹¹⁸ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 160.

mencapai berbagai titik baru dalam sejarah hubungan keduanya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi selama Moon Jae In menjabat sebagai presiden. Peristiwa-peristiwa tersebut di antaranya adalah tim Korea Selatan dan Korea Utara yang memutuskan untuk berparade bersama dalam upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018, atlet Korea Selatan dan Korea Utara membentuk tim hoki es gabungan dalam Olimpiade Musim Dingin 2018, dilaksanakannya 3 fase *Inter-Korean Summit* pada tahun 2018, serta penandatanganan Deklarasi Panmunjom oleh kedua pemimpin Korea.

Peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In secara signifikan terjadi pada tahun 2018. Peningkatan hubungan dimulai ketika tim Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk berparade bersama dalam satu defile peserta pada upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018. Peristiwa tersebut dianggap sebagai suatu peristiwa yang menarik dan bersejarah bukan hanya karena kedua tim berjalan berdampingan saat upacara pembukaan Olimpiade, tetapi juga karena tim Korea Selatan dan Korea Utara berparade sambil membawa bendera unifikasi kedua negara.

Upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin yang diselenggarakan di Korea Selatan itu pun dihadiri oleh Presiden Moon Jae In dan bahkan juga dihadiri oleh adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong. Moon Jae-in dan Kim Yo Jong serta jajaran mereka sempat tampak bersalaman dan saling menyapa di tribun kehormatan.¹¹⁹ Hubungan dua Korea setelahnya tampak lebih membaik lagi dalam

¹¹⁹ Nugyasa Laksamana, "Korea Selatan-Korea Utara Bersatu dalam Defile Olimpiade Musim Dingin", dalam <https://olahraga.kompas.com/read/2018/02/09/20212431/korea-selatan-korea-utara-bersatu-dalam-defile-olimpiade-musim-dingin>. [Diakses 02 Januari 2021]

Olimpiade Musim Dingin 2018 dengan dibentuknya tim hoki es putri gabungan yang terdiri dari atlet Korea Selatan dan Korea Utara.¹²⁰

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mencapai titik bersejarah lainnya ketika pada 27 April 2018 diselenggarakan *Inter-Korean Summit* pertama, setelah selama 11 tahun tidak pernah ada *Inter-Korean Summit* yang berhasil diselenggarakan.¹²¹ *Inter-Korean Summit* yang diselenggarakan pada April 2018 tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Panmunjom. Deklarasi Panmunjom berisi tentang berbagai kesepakatan dan komitmen untuk menjaga hubungan baik antar-Korea, pembangunan perdamaian dan peningkatan kesejahteraan di Semenanjung Korea, serta permasalahan denuklirisasi.¹²²

Inter-Korean Summit pada masa pemerintahan Moon Jae In tidak hanya diselenggarakan sekali tetapi sebanyak 3 kali pada tahun 2018. *Inter-Korean Summit* yang kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2018. Berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, *Inter-Korean Summit* yang diselenggarakan pada bulan Mei tersebut dilakukan secara mendadak tanpa adanya publikasi terlebih dahulu.¹²³ Setelahnya, *Inter-Korean Summit* yang ketiga dilaksanakan selama 3 hari yaitu sejak tanggal 18 September 2018 hingga 20 September 2018.¹²⁴ Pada *Inter-*

¹²⁰ Erlangga Dewanto, "Olimpiade Musim Dingin: Korea Utara - Selatan Bikin Tim Gabungan", dalam <https://sport.tempo.co/read/1053724/olimpiade-musim-dingin-korea-utara-selatan-bikin-tim-gabungan/full&view=ok>. [Diakses 02 Januari 2021]

¹²¹ Dong Hyuk Lee, "4 Things You Should Know About the Inter-Korean Summit", dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/4-things-you-should-know-about-inter-korean-summit>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹²² No Name, "Panmunjom Declaration: The Key Points", dalam <https://www.dhakatribune.com/world/asia/2018/04/27/panmunjom-declaration-key-points/>. [Diakses 13 Januari 2021]

¹²³ Jung Eun Kim dan Theresa Waldrop, "North and South Korean Leaders Hold Surprise Meeting", dalam <https://edition.cnn.com/2018/05/26/politics/north-and-south-korean-leaders-meet-again/index.html>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹²⁴ Dong Hwan Ko, "South Korea Seeks to Hold Inter-Korean Summit Sept. 18-20: reports", dalam https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103_254994.html. [Diakses 12 Januari 2021]

Korean Summit yang ketiga ini ditandatangani sebuah perjanjian yang disebut sebagai *Pyongyang Joint Declaration* oleh kedua pemimpin Korea, Moon Jae In dan Kim Jong Un.

Beberapa hari setelah penandatanganan perjanjian, pasukan dari Korea Utara dan Korea Selatan mulai membersihkan sekitar 800.000 ranjau darat yang terkubur di sepanjang perbatasan mereka, dengan rencana untuk memindahkan pos penjagaan dan senjata dari wilayah DMZ¹²⁵. Pengeras suara milik Korea Selatan yang digunakan untuk meledakkan pesan anti-Korea Utara, propaganda, dan terkadang, lagu K-pop, juga dihilangkan. Kemudian pada Oktober 2018, pertemuan pertama antara pejabat Korea Utara dan Korea Selatan berlangsung di Kantor Penghubung Antar-Korea di daerah Kaesong. Kantor tersebut sebelumnya telah didirikan pada awal tahun 2018 untuk berfungsi sebagai kedutaan *de facto*¹²⁶ antara kedua negara, tetapi tanpa adanya hubungan diplomatik yang resmi.

Jika 2018 tampak seperti tahun dimana hubungan antar-Korea sangat membaik, hal tersebut mulai berubah setelah dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada KTT AS-Korut 2019 di Hanoi, Vietnam, mengalami kegagalan.¹²⁷ Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mulai memburuk pada awal tahun 2019. Ketika Korea Selatan membuat upacara perayaan satu tahun

¹²⁵ Zona demiliterisasi/ *The demilitarized zone* (DMZ) adalah barrier perbatasan yang membagi Semenanjung Korea secara kasar menjadi dua. Barrier perbatasan tersebut dibuat atas kesepakatan antara Korea Utara, China dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1953. DMZ memiliki panjang sekitar 250 kilometer (160 mil), dan lebar sekitar 4 kilometer (2,5 mil).

¹²⁶ *De facto* dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya" atau "pada praktiknya". Dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum.

¹²⁷ Neha Banka, "Explained: North Korea-South Korea relations, two years after Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-south-korea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/>. [Diakses 12 Januari 2021]

Deklarasi Panmunjom pada April 2019 di daerah Panmunjom, Korea Utara bahkan tidak turut berpartisipasi dalam upacara tersebut.¹²⁸

Hubungan antar-Korea semakin memburuk di tahun berikutnya (2020). Korea Utara mulai memperingatkan Korea Selatan untuk mencegah pengungsi dan aktivis Korea Utara di Korea Selatan untuk mengirim balon, bersama dengan beras dan propaganda anti-Korea Utara, melintasi perbatasan ke Korea Utara. Bagi Korea Utara, masalah ini mungkin dianggap serius karena para pengungsi dan aktivis telah terlibat dalam kegiatan ini selama bertahun-tahun. Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah mengisyaratkan dan memberikan peringatan bahwa hubungan antara kedua negara akan memburuk jika Korea Selatan tidak mengambil tindakan apapun.

Hanya beberapa hari setelah peringatan tersebut diberikan, tepatnya pada 14 Juni 2020, Korea Utara meledakkan Kantor Penghubung Antar-Korea di Kaesong. Untungnya sejak Januari 2020, gedung kantor itu sudah kosong sehingga tidak ada korban jiwa akibat ledakan yang terjadi.¹²⁹ Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya kembali memburuk dan mencapai titik terendah pada musim panas 2020, akibat dari ledakan yang terjadi serta beberapa pernyataan Kim Yo Jong yang menyindir pihak Korea Selatan.

Selain memerintahkan penghancuran Kantor Penghubung Antar-Korea pada 14 Juni 2020, Kim Yo Jong juga memberikan kritikan keras terhadap

¹²⁸ Son Taek Wang, "One year since the Pyongyang Declaration: how inter-Korean relations went sour", dalam <https://www.nknews.org/2019/09/one-year-since-the-pyongyang-declaration-how-inter-korean-relations-went-sour/>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹²⁹ Neha Banka, "Explained: North Korea-South Korea relations, two years after Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-south-korea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/>. [Diakses 12 Januari 2021]

pemerintahan Moon Jae In. Kim Yo Jong menuduh Korea Selatan gagal membuka kerja sama ekonomi dan malah tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan resolusi sanksi PBB. Pernyataan Kim Yo Jong berikutnya pada 17 Juni 2020 juga kembali menyindir Presiden Korea Selatan Moon Jae In, yang dianggapnya telah mengalihkan tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan kerja sama antar-Korea dengan menggunakan aliansi Amerika Serikat sebagai dalih.¹³⁰

¹³⁰ Scott Snyder, “Back to square one for inter-Korean relations”, dalam <https://www.eastasiaforum.org/2020/06/23/back-to-square-one-for-inter-korean-relations/>. [Diakses 12 Januari 2021]

BAB III

UPAYA KOREA SELATAN DALAM MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN

A. Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Pemerintahan Moon Jae In (Kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In)

Moon Jae In yang dilantik pada tahun 2017 sebagai presiden Korea Selatan sangatlah mementingkan stabilitas perdamaian dan peningkatan kesejahteraan melalui kerjasama dalam kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara. Dikutip dari website resmi *Ministry of Unification* Korea Selatan, kebijakan Moon Jae In merupakan kebijakan jangka panjang dan komprehensif yang dipimpin oleh Korea untuk mewujudkan 'perdamaian' dan 'kemakmuran' di Semenanjung Korea serta Asia Timur Laut bersama dengan Korea Utara, tetangga regional, dan masyarakat internasional.

Pada masa pemerintahannya, Moon Jae In mengeluarkan *Berlin Initiative* sebagai outline dari kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.¹³¹ Hal ini disampaikan oleh Moon Jae In sendiri dalam pidatonya pada bulan Juli tahun 2011 di Körber Foundation, Jerman.¹³² Dalam pidatonya di Körber Foundation, Moon Jae In menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan upaya apapun yang mengarah pada reunifikasi melalui absorpsi terhadap Korea Utara, dan tidak juga menginginkan kejatuhan dari rezim Korea Utara.¹³³

¹³¹ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 158

¹³² No Name, "The Berlin Initiative for peace on the Korean Peninsula", dalam <http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view;jsessionid=S0ITaDJdJZ-IROcYLDg95I9x.node20?subId=686&affairId=750&articleId=40441> [Diakses 03 Januari 2021]

¹³³ No Name, "Speech at the invitation of the Koerber Foundation", dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 03 Januari 2021]

Moon Jae In juga menyatakan bahwa dalam pemerintahannya, unifikasi yang ingin dicapai dengan Korea Utara memiliki arti sebagai suatu proses dimana kedua belah pihak dapat berkoeksistensi dengan damai, dapat mencapai kesejahteraan bersama, dan bukan menyatukan kembali dua Korea dalam satu pemerintahan. Moon Jae In mengungkapkan bahwa sebenarnya reunifikasi mungkin saja bisa terjadi secara alami di masa depan apabila perdamaian sudah terbangun dengan baik. Tetapi, dalam pemerintahannya, fokus dan tujuan utama yang ingin dicapai hanyalah perdamaian saja, bukan penyatuan kembali dua Korea apalagi melalui absorpsi.¹³⁴

Dikutip dari laman *Ministry Of Unification* (2017), kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki 3 konsep utama, yaitu perdamaian sebagai prioritas utama (*'peace' first*), saling menghormati (*spirit of 'mutual respect'*), dan kebijakan terbuka (*open policy*).¹³⁵ Kebijakan Moon Jae In yang condong mendukung *peaceful co-existence* antara dua Korea sangat terlihat jelas dalam konsep *spirit of 'mutual respect'* yang dijunjungnya. Dalam laman *Ministry Of Unification* (2017), dijelaskan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip *spirit of 'mutual respect'* adalah Korea Selatan akan menghormati Korea Utara dengan pendirian mereka yang disebut dengan “3-Nos”/”3-Tidak”. “3-Nos”/”3-Tidak” diantaranya adalah tidak menginginkan

¹³⁴ No Name, “Speech at the invitation of the Koerber Foundation”, dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 03 Januari 2021]

¹³⁵ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/ [Diakses 03 Januari 2021]

runtuhnya rezim Utara, tidak akan melakukan unifikasi melalui absorpsi, dan tidak akan mengejar unifikasi melalui cara-cara yang artifisial.¹³⁶

Dikutip dari laman yang sama pula, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki 3 *goals* utama. Tiga *goals* utama tersebut ialah resolusi nuklir Korea Utara dengan membentuk perdamaian yang permanen, pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, dan realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea.¹³⁷ Dalam *goals* yang pertama yaitu terkait dengan resolusi nuklir Korea Utara, pemerintahan Moon Jae In berencana untuk membuat Korea Selatan memainkan ‘*driving*’ *role* dalam penyelesaian masalah nuklir Korea Utara, serta mengganti gencatan senjata Perang Korea yang tidak stabil dengan rezim perdamaian yang permanen.

Untuk mencapai *goals* yang kedua yaitu pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, pemerintahan Moon Jae In berencana untuk terus melanjutkan dan mewujudkan berbagai pernyataan dan perjanjian antar-Korea yang pernah dibuat, serta menyelesaikan berbagai perselisihan internal terkait dengan masalah unifikasi, kebijakan Korea Utara, dan setelahnya membuat konsensus nasional. Untuk mencapai *goals* yang ketiga yaitu realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea, pemerintahan Moon Jae In berencana untuk membangun pasar tunggal di Semenanjung Korea, sehingga dapat tercipta komunitas ekonomi antar-Korea baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendukung koeksistensi damai dua Korea.

¹³⁶ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/ [Diakses 03 Oktober 2020]

¹³⁷ *ibid.*,

Korea Selatan dibawah pemerintahan Moon Jae In juga berencana untuk membangun tatanan ekonomi baru dengan menerapkan kebijakan ekonomi *Three Economic Belts*. Kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat menghubungkan bukan hanya dua Korea, tetapi juga negara-negara tetangga Semenanjung Korea.¹³⁸ Selain memiliki 3 *goals*, Korea Selatan memiliki 4 strategi dalam penerapan kebijakannya terhadap Korea Utara.

Strategi yang pertama adalah mengambil pendekatan komprehensif dan *step-by-step*. Maksud dari strategi ini adalah Korea Selatan akan menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara secara damai, menggunakan pendekatan sanksi / tekanan, dan melakukan dialog secara langkah *step-by-step*. Sambil menyelesaikan masalah nuklir, Korea Selatan juga akan berusaha untuk secara mendasar menghilangkan ancaman keamanan dengan membentuk rezim perdamaian di Semenanjung Korea dan memfasilitasi peningkatan hubungan antara Korea Utara dan komunitas internasional.¹³⁹

Strategi yang kedua adalah menangani masalah hubungan antar-Korea dan ancaman nuklir Korea Utara secara bersamaan. Bagi Korea Selatan, penyelesaian masalah nuklir Korea Utara dan peningkatan hubungan antar-Korea bukanlah dua hal terpisah yang membutuhkan pilihan atau prioritas. Keduanya dapat mengalami kemajuan secara bersamaan dengan saling melengkapi dalam lingkaran yang bajik. Menurut Korea Selatan, jika Korea Selatan berhasil membangun kembali saluran

¹³⁸ *ibid.*,

¹³⁹ Ministry of Unification, "Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula", dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/ [Diakses 03 Januari 2021]

untuk dialog dan kerja sama antar-Korea, maka mereka akan dapat memfasilitasi pembicaraan multilateral untuk penyelesaian masalah nuklir.¹⁴⁰

Strategi yang ketiga adalah memastikan keberlanjutan hubungan antar-Korea melalui institusionalisasi atau pelembagaan. Korea Selatan akan mendorong '*National Unification Contract*' berdasarkan konsensus nasional untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan terhadap Korea Utara miliknya. Korea Selatan dibawah pemerintahan Moon Jae In juga memiliki rencana untuk memberlakukan perjanjian antar-Korea menjadi undang-undang, dan kemudian membuat serta menyimpulkan '*New Inter-Korean Basic Agreement*' untuk membangun hubungan antar-Korea yang berkelanjutan.¹⁴¹

Strategi yang keempat adalah meletakkan fondasi untuk unifikasi damai melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintahan Moon Jae In berencana untuk memulihkan homogenitas nasional dan membangun komunitas antar-Korea dengan memperluas berbagai pertukaran antar-Korea. Korea Selatan mengharapkan unifikasi yang secara alami terjadi sebagai bagian dari proses mempromosikan koeksistensi damai dan kemakmuran bersama kedua Korea, serta memulihkan komunitas nasional Korea.¹⁴²

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In juga memiliki 5 prinsip. Kelima prinsip tersebut di antaranya adalah *Korea-led Initiative*, *Strong Defense*, *Mutual Respect*, *Interaction with the People*, dan *International Cooperation*. Prinsip yang pertama yaitu *Korea-led Initiative*

¹⁴⁰ *ibid.*,

¹⁴¹ Ministry of Unification, "Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula", dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/ [Diakses 04 Januari 2021]

¹⁴² *ibid.*,

memiliki arti bahwa Korea Selatan akan memimpin dalam mempromosikan rekonsiliasi, kerjasama antar-Korea, serta pembangunan perdamaian dan kemakmuran bersama di Semenanjung Korea.

Prinsip kedua yaitu *Strong Defense* memiliki arti bahwa dengan menjaga postur keamanan yang kuat berdasarkan aliansi pertahanan nasional Korsel-AS yang kokoh, maka Korea akan mencegah provokasi Korea Utara dan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip ketiga, prinsip *Mutual Respect*. *Mutual Respect* disini memiliki arti bahwa Korea Selatan dalam penerapan kebijakannya terhadap Korea Utara akan berdasarkan atas semangat saling menghormati.¹⁴³

Kemudian, prinsip keempat adalah prinsip *Interaction with the People* yang memiliki arti bahwa Korea Selatan akan menginstitutionalisasi partisipasi dan interaksi dengan majelis nasional, badan pemerintah daerah, organisasi sipil, serta para ahli untuk membuat konsensus nasional dan kesepakatan tentang masalah unifikasi serta kebijakan terhadap Korea Utara. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kerja sama internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar-Korea, yaitu prinsip *International Cooperation*. Sesuai dengan prinsip tersebut maka Korea Selatan mengharapkan akan memperoleh kerja sama internasional melalui ‘keterbukaan’.¹⁴⁴

Kebijakan Korea Utara era Moon Jae In sebenarnya tidak jauh berbeda dari kebijakan pada era Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun. Namun dalam beberapa hal, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa Moon Jae In bisa disebut

¹⁴³ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/principles/ [Diakses 03 Oktober 2020]

¹⁴⁴ *ibid.*,

sebagai versi ketiga dari *Sunshine Policy* yang telah diperbarui. Perbedaan terbesar dari pemerintahan konservatif sebelumnya dengan pemerintahan Moon Jae In adalah bahwa tidak ada tuntutan untuk dialog atau pertemuan puncak yang dibuat yang tidak dapat dipenuhi oleh Korea Utara.¹⁴⁵

Memulai dan membangun percakapan antar-Korea adalah suatu hal yang menjadi perhatian utama Moon Jae In, dan sesuatu yang dianggap pula olehnya harus dipisahkan dari sikap ideologis. Bagi Moon Jae In, faktor kunci untuk meningkatkan hubungan antar-Korea adalah melanjutkan pencapaian positif dari pemerintahan sebelumnya, seperti pernyataan bersama tahun 1970-an, perjanjian rekonsiliasi awal 1990-an, dan deklarasi bersama serta *Inter-Korean Summit* yang pernah berhasil dibuat dan dilaksanakan pada pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun.¹⁴⁶

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In pun berfokus untuk mendukung koeksistensi damai dua Korea melalui peningkatan intensitas percakapan dengan Korea Utara, peningkatan kerja sama antar-Korea, serta menjaga stabilitas perdamaian di Semenanjung Korea. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan diselenggarakannya 3 fase *Inter-Korean Summit*, dibuatnya Deklarasi Panmunjom, serta ditandatanganinya *Pyongyang Joint Declaration* pada tahun 2018.

¹⁴⁵ Hannes B. Mosler, "President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea", dalam *Asia PolicyBrief*, edisi Juni 2017 (2017), h. 9.

¹⁴⁶ *ibid.*,

B. Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea Melalui *Inter-Korean Summit 2018, Deklarasi Panmunjom, & Pyongyang Joint Declaration*.

1. KTT antar-Korea 2018/*Inter-Korean Summit 2018* fase I dan Deklarasi Panmunjom

Inter-Korean Summit 2018 fase I berlangsung pada tanggal 27 April 2018¹⁴⁷ dan bertempat di *Peace House*. *Peace House* diterima oleh Korea Utara sebagai lokasi pertemuan, di antara tempat-tempat yang diusulkan oleh Korea Selatan, dimana *Peace House* terletak tepat di sebelah selatan garis demarkasi militer di *Joint Security Area*, daerah Panmunjom.¹⁴⁸ Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara Moon Jae In, Presiden Korea Selatan, dan Kim Jong Un, Pemimpin Tertinggi Korea Utara dari tiga rangkaian pertemuan *Inter-Korean Summit* yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Pertemuan ini merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar-Korea ketiga yang pernah dilaksanakan dan yang pertama dalam sebelas tahun. Ini juga pertama kalinya sejak akhir Perang Korea pada tahun 1953 seorang pemimpin Korea Utara memasuki wilayah Selatan.¹⁴⁹ Presiden Moon Jae In juga sempat menyeberang ke wilayah Utara beberapa saat sebelum pertemuan dimulai.¹⁵⁰ *Inter-*

¹⁴⁷ No Name, "North and South Korea set date for historic summit", dalam <https://www.abc.net.au/news/2018-03-29/north-and-south-korea-set-date-for-summit-between-leaders/9603274>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁴⁸ Chul Jae Lee, "North Korean leader to visit South for first time", dalam <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3045322>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁴⁹ Nicola Smith, Chris Graham, dan Gareth Davies, "Kim Jong-un and Moon Jae-in commit to Korean 'peace regime' to end nuclear conflict at historic summit", dalam <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/27/kim-jong-un-becomes-first-north-korean-leader-cross-south-65/>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁵⁰ No Name, "North Korea's Kim Jong-un pledges 'new history' with South Korea", dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-43914208>. [Diakses 10 Januari 2021]

Korean Summit 2018 fase I berlangsung setelah kedua belah pihak mengadakan beberapa pertemuan sebagai persiapan untuk hadir bersama di Olimpiade Musim Dingin 2018. Ide awalnya dilontarkan melalui undangan resmi dari Korea Utara untuk melakukan pertemuan. Konferensi Tingkat Tinggi tersebut difokuskan pada permasalahan program senjata nuklir Korea Utara dan denuklirisasi Semenanjung Korea.¹⁵¹

Konferensi pers bersama turut menjadi salah satu rangkaian dari *Inter-Korean Summit* fase I. Dalam konferensi pers bersama tersebut, Kim Jong Un dan Moon Jae In membuat sejumlah janji terkait dengan kerja sama dan perdamaian. Ini termasuk janji untuk bekerja sama menuju denuklirisasi Semenanjung Korea, meskipun Kim Jong Un sebenarnya tidak secara eksplisit setuju untuk menyerahkan senjata nuklir Korea Utara. Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk, di akhir tahun, mengubah Perjanjian Gencatan Senjata Korea menjadi perjanjian damai penuh, yang secara resmi mengakhiri Perang Korea setelah 65 tahun.¹⁵²

Setelahnya, Kim Jong Un dan Moon Jae In berjanji untuk mengakhiri "aktivitas permusuhan" antara negara mereka, untuk dimulainya kembali pertemuan reuni untuk keluarga yang terpisah,¹⁵³ untuk meningkatkan koneksi di sepanjang perbatasan dua Korea, dan untuk penghentian siaran propaganda di seberang itu.¹⁵⁴ Konferensi pers bersama ini ditayangkan secara langsung di televisi

¹⁵¹ Anna Fifield, dan Ashley Parker, "North Korea's Kim Jong Un invites South Korea's president to Pyongyang", dalam https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-jong-un-has-invited-south-koreas-moon-jae-in-to-pyongyang/2018/02/10/d7db9dde-0ddd-11e8-998c-96deb18cca19_story.html. [Diakses 12 Januari 2021]

¹⁵² No Name, "Koreas make nuclear pledge after historic summit", dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-43921385>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁵³ Matthew Weaver, "Korea summit: Trump hails 'end of the Korean war' - as it happened", dalam <https://www.theguardian.com/world/live/2018/apr/27/north-and-south-korea-summit-leaders-prepare-for-historic-inter-korean-meeting-live>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁵⁴ Rahn Kim, "Seoul seeks Moon-Kim joint press conference after April 27 summit", dalam https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/04/103_247427.html. [Diakses 10 Januari 2021]

Korea Selatan. Namun, hal yang sama tidak dapat dilakukan oleh Korea Utara, sebab liputan langsung tidak tersedia di negara tersebut karena kebijakan negara yang tidak mengizinkan untuk menyiarkan acara langsung yang melibatkan pemimpinnya.¹⁵⁵

Untuk mengesahkan janji-janji yang dibuat dalam *Inter-Korean Summit* fase I, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, juga menandatangani sebuah deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Panmunjom dalam pertemuan tersebut. Peristiwa ini merupakan momentum bersejarah yang merefleksikan aspirasi dari para rakyat Korea yang tak kunjung padam bagi terciptanya perdamaian, kesejahteraan dan unifikasi di Semenanjung Korea yang secara teknis masih dalam kondisi perang. Kedua pemimpin negara mendeklarasikan dihadapan 80 juta rakyat Korea dan publik dunia bahwa tidak akan ada perang di Semenanjung Korea sekaligus menegaskan bahwa momen ini menandai era baru perdamaian.¹⁵⁶

Adapun ringkasan isi dari Deklarasi Panmunjom tercantum di bawah ini:

1. Korea Selatan dan Korea Utara akan meningkatkan hubungan untuk mencari kemakmuran bersama dan penyatuan kembali secara mandiri.
 - Dua Korea setuju untuk mengusahakan penyatuan kembali, dan untuk melaksanakan semua tindakan yang sebelumnya telah disetujui.

¹⁵⁵ Alexandra Ma, "Kim Jong Un's historic peace talks were broadcast everywhere except North Korea — here's why he keeps his people in the dark", dalam <https://www.businessinsider.nl/why-inter-korean-summit-was-broadcast-live-everywhere-but-north-korea-2018-4/?international=true&r=UK>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹⁵⁶ Indriana Kartini, "Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un", dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15 No. 1 (2018), h. 2.

- Dua Korea akan membuka pembicaraan tingkat tinggi, dan negosiasi untuk merealisasikan kesepakatan pertemuan puncak.
 - Dua Korea akan mendirikan kantor komunikasi yang dioperasikan bersama di Kaesong.
 - Dua Korea akan meningkatkan pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang
 - Dua Korea akan membuka pembicaraan Palang Merah (*Red Cross talks*) untuk mencari penyelesaian masalah kemanusiaan.
 - Dua Korea akan melaksanakan proyek yang disepakati dalam Deklarasi 4 Oktober.
2. Dua Korea akan bekerja sama untuk mengurangi ketegangan militer
- Dua Korea akan menghentikan semua permusuhan.
 - Dua Korea akan membangun zona damai di Laut Barat dekat Garis Batas Utara
 - Dua Korea akan mengambil tindakan untuk menjamin proyek pertukaran, dan mengadakan pembicaraan militer
3. Dua Korea akan bekerja sama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
- Dua Korea setuju untuk tidak menggunakan aksi militer
 - Dua Korea setuju untuk mengurangi pengeluaran militer untuk mencerminkan penurunan ketegangan militer
 - Dua Korea setuju untuk mengupayakan pembicaraan tiga arah Selatan-Utara-AS atau Selatan-Utara-AS-China untuk menghasilkan perjanjian damai.

- Dua Korea menegaskan kembali tujuan membawa perdamaian melalui denuklirisasi total.¹⁵⁷

Setelah Inter-Korean Summit fase I berhasil dilaksanakan, disepakati bahwa pengeras suara penyebar propaganda di Zona Demiliterisasi Korea dibongkar per tanggal 1 Mei 2018. Komitmen ini terpenuhi sesuai rencana dan kedua belah pihak juga berkomitmen untuk mengakhiri kampanye propaganda balon mereka juga. Pada saat yang sama, Korea Utara setuju untuk menyesuaikan waktunya dengan Korea Selatan. Pada 5 Mei, Korea Utara secara resmi mengubah zona waktunya sehingga cocok dengan Korea Selatan. Juga pada tanggal 5 Mei, upaya pembelot Korea Utara untuk melanjutkan kampanye propaganda balon melintasi perbatasan dari Korea Selatan dihentikan oleh pemerintah Korea Selatan.¹⁵⁸

2. KTT antar-Korea 2018/*Inter-Korean Summit* 2018 fase II

Inter-Korean Summit 2018 fase II merupakan pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae In dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2018. Pertemuan ini berlangsung di *Inter-Korean Peace House* atau *Unification House* yang terletak di daerah Panmunjom dan berada di sisi wilayah Korea Utara. Tujuan diberlangsungkannya pertemuan ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen dua Korea untuk segera menerapkan ketentuan-ketentuan Deklarasi Panmunjom yang sudah dibuat sebelumnya pada 27 April 2018.¹⁵⁹

¹⁵⁷ He Suk Choi, “[2018 Inter-Korean summit] Panmunjeom Declaration summary”, dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180427000797>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁵⁸ Sasha Ingber, “North And South Korea Dismantle Loudspeakers Blaring Propaganda On The DMZ”, dalam <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/01/607399907/north-and-south-korea-dismantle-loudspeakers-blaring-propaganda-on-the-dmz>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁵⁹ Ji Eun Kim, “[News analysis] Moon and Kim reaffirm commitment to Panmunjeom Declaration”, dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/846575.html. [Diakses 10 Januari 2021]

Berbeda dari *Inter-Korean Summit* fase I, *Inter-Korean Summit* fase II dilaksanakan secara dadakan dan tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan terlebih dahulu ke publik sebelum pertemuan dilaksanakan. Dalam pertemuan itu, Kim Jong Un didampingi oleh Kim Yong Chol, mantan kepala intelijen militer yang sekarang menjadi wakil ketua komite pusat partai yang berkuasa di Korea Utara dan yang ditugaskan untuk mengurus urusan hubungan antar-Korea. Sedangkan Moon Jae In didampingi oleh Suh Hoon, Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut.

Pembahasan dalam *Inter-Korean Summit* fase II sebagian besar berpusat di sekitar permasalahan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Amerika Serikat-Korea Utara yang akan segera dilaksanakan.¹⁶⁰ Permasalahan KTT AS-Korut berakar pada pembatalan KTT tersebut secara tiba-tiba oleh Trump. Padahal KTT AS-Korut sebelumnya sudah direncanakan akan dilaksanakan pada 12 Juni 2018. Oleh sebab itu, mencoba untuk membuat KTT AS-Korut tetap berjalan sesuai dengan rencana awal dan terus melanjutkan pembicaraan denuklirisasi menjadi salah satu agenda utama dari *Inter-Korean Summit* fase II.¹⁶¹

Inter-Korean Summit tahun 2018 fase II sebenarnya baru ditetapkan atas saran Kim Jong Un dan diberitahukan pada pihak Korea Selatan hanya dalam kurun waktu 24 jam.¹⁶² Namun Moon Jae In tetap menerima undangan mendadak dari

¹⁶⁰ No Name, "North, South Korea meet for surprise second summit", dalam https://www.syracuse.com/politics/2018/05/north_south_korea_meet_for_surprise_second_summit.html. [Diakses pada 14 Januari 2021]

¹⁶¹ Matt Stiles, dan Noah Bierman, "North and South Korean leaders hold surprise meeting in DMZ to get U.S. summit back on track", dalam <https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-north-and-south-korea-surprise-summit-20180526-story.html>. [Diakses 11 januari 2021]

¹⁶² No Name, "North, South Korea meet for surprise second summit", dalam https://www.syracuse.com/politics/2018/05/north_south_korea_meet_for_surprise_second_summit.html. [Diakses pada 14 Januari 2021]

Kim Jong Un tersebut karena adanya agenda penting terkait dengan permasalahan nuklir antara Korea Utara dan Selatan, serta adanya permasalahan pembatalan pertemuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat secara mendadak oleh Donald Trump.¹⁶³ Dalam *Inter-Korean Summit* 2018 fase II, Moon Jae In mengungkapkan keyakinannya dan mengajak Kim Jong Un untuk berdiskusi tentang kesediaannya untuk bergabung dalam intervensi nuklir dengan Trump.¹⁶⁴

Dalam *Inter-Korean Summit* 2018 fase II, Moon Jae In dan Kim Jong Un juga sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi antar-Korea pada 1 Juni 2018. Pembicaraan tersebut kemudian akan diikuti dengan pembicaraan antara otoritas militer untuk meredakan ketegangan militer, serta pembicaraan *Red Cross* untuk permasalahan reuni keluarga yang terpisah. Kedua pemimpin kemudian juga sepakat untuk mempercepat pelaksanaan Deklarasi Panmunjom dan bertemu kembali "kapan saja dan di mana saja" tanpa formalitas.¹⁶⁵

3. KTT antar-Korea 2018/*Inter-Korean Summit* 2018 fase III dan *Pyongyang Joint Declaration*

Inter-Korean Summit 2018 fase III berlangsung selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 18 September 2018 hingga 20 September 2018. Pertemuan ini merupakan pertemuan puncak dari segala rangkaian pertemuan *Inter-Korean Summit* 2018. Awalnya, pada 31 Agustus 2018, diumumkan bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae In akan mengirim delegasi khusus ke Korea Utara pada 5 September 2018.

¹⁶³ Jung Eun Kim dan Theresa Waldrop, "North and South Korean leaders hold surprise meeting", dalam <https://edition.cnn.com/2018/05/26/politics/north-and-south-korean-leaders-meet-again/index.html>. [Diakses 11 Januari 2021]

¹⁶⁴ Matt Stiles dan Noah Bierman, "North and South Korean leaders hold surprise meeting in DMZ to get U.S. summit back on track", dalam <https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-north-and-south-korea-surprise-summit-20180526-story.html>. [Diakses 11 Januari 2021]

¹⁶⁵ No Name, "Full address by South Korean President Moon Jae In on May 26 inter-Korea summit", dalam <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/full-address-by-south-korean-president-moon-jae-in-on-may-26-inter-korea-summit>. [Diakses 11 Januari 2021]

Pengiriman delegasi khusus ini dimaksudkan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut terkait dengan permasalahan nuklir dan mengatur tanggal untuk *Inter-Korean Summit* 2018 fase III.¹⁶⁶

Pada 5 September 2018, Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Chung Eui Yong, Direktur Badan Intelijen Nasional, Suh Hoon dan delegasi Korea Selatan lainnya melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk mengadakan pertemuan dengan Kim Jong Un. Dalam pertemuan tersebut, para delegasi khusus Korea Selatan mengatur pertemuan puncak *Inter-Korean Summit* 2018 dan juga membantu menyelesaikan masalah diplomasi nuklir yang sempat goyah antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemudian setelahnya disepakati bahwa *Inter-Korean Summit* 2018 fase III akan berlangsung selama tiga hari yaitu antara 18 September dan 20 September.¹⁶⁷

Inter-Korean Summit 2018 fase III dimulai sesuai jadwal pada 18 September. Pada hari pertama, Moon Jae In dan istrinya Kim Jung Sook tiba di Bandara Internasional Sunan Pyongyang, Korea Utara, di mana mereka mendapat sambutan meriah, yang menampilkan pawai dari para *guard of honor* dan *Central Military Band* yang merupakan bagian dari Tentara Korea Utara (*Korean People's Army*). Kim Jong Un menyambut Moon Jae In beserta istrinya dan sempat memberikan pelukan singkat pada Moon Jae In. Kim Jong Un dan Moon Jae In kemudian pergi ke tempat pertemuan dengan mobil yang sama. Keduanya pun

¹⁶⁶ Jesse Johnson, "South Korean President Moon Jae-in to dispatch special envoy to North Korea next week", dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/31/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/south-korean-president-moon-jae-dispatch-special-envoy-north-korea-next-week/>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹⁶⁷ Steve Miller, "North-South Korea Summit Set for Mid-September", dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/north-south-korea-summit-set-mid-september>. [Diakses 12 Januari 2021]

secara terbuka melambai ke arah parade mobil dan orang-orang yang antusias menyambut mereka.¹⁶⁸

Selanjutnya, pada hari kedua pertemuan yaitu pada 19 September 2018, di Pyongyang, sebuah perjanjian berjudul "*Pyongyang Joint Declaration*" ditandatangani oleh kedua pemimpin Korea. Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian militer, pertukaran sipil dan kerja sama dua Korea di banyak bidang, serta kondisi untuk denuklirisasi Korea Utara. Secara garis besar ada 6 poin utama yang terdapat dalam *Pyongyang Joint Declaration*. Poin-poin tersebut di antaranya adalah:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memperluas penghentian permusuhan militer di wilayah konfrontasi seperti Zona Demiliterisasi menjadi penghapusan substansial dari bahaya perang di seluruh Semenanjung Korea serta penyelesaian mendasar dari hubungan permusuhan.
2. Kedua belah pihak sepakat melakukan langkah-langkah substansial untuk memajukan pertukaran dan kerja sama lebih lanjut berdasarkan semangat saling menguntungkan dan kemakmuran bersama, serta untuk mengembangkan perekonomian bangsa secara seimbang.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama kemanusiaan demi menyelesaikan masalah keluarga yang terpisah secara mendasar.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk secara aktif mempromosikan pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan suasana rekonsiliasi

¹⁶⁸ Brendan Cole, "North and South Korean Leaders Embrace Each Other as Korean Summit Begins, Denuclearization and Improved Ties Most Critical Issues", dalam <https://www.newsweek.com/north-and-south-korean-leaders-embrace-each-other-korean-summit-begins-1125645>. [Diakses 12 Januari 2021]

dan persatuan, serta untuk menunjukkan semangat bangsa Korea baik secara internal maupun eksternal.

5. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama bahwa Semenanjung Korea harus diubah menjadi tanah damai yang bebas dari senjata nuklir dan ancaman nuklir, dan bahwa kemajuan substansial menuju tujuan ini harus dibuat dengan segera.
6. Pemimpin Kim Jong Un setuju untuk mengunjungi Seoul lebih awal atas undangan Presiden Moon Jae In.¹⁶⁹

Pada pertemuan hari kedua ini pula, Menteri Pertahanan Korea Utara No Kwang Chol dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young Moo menandatangani Perjanjian baru tentang Rekonsiliasi, Non-Agresi, Pertukaran dan Kerjasama (alias "Perjanjian Dasar") yang dikenal sebagai "*Agreement on the Implementation of the Historic Panmunjom Declaration in the Military Domain*" (juga disebut *the Comprehensive Military Agreement*, atau CMA) untuk membantu mengurangi ketegangan militer antara kedua negara dan mengatur kontrol senjata yang lebih besar. Perjanjian tersebut menyerukan penghapusan dan pembersihan ranjau darat, pos penjagaan, senjata, dan personel di *Joint Security Area* dari kedua sisi perbatasan, baik itu sisi Korea Utara maupun Selatan. Perjanjian tersebut juga menyerukan pembentukan zona penyangga militer bersama.¹⁷⁰

Di hadapan 150.000 penonton, Moon Jae In juga menyampaikan pidato di Stadion *May Day* Pyongyang yang menyerukan persatuan budaya dan unifikasi

¹⁶⁹ No Name, "Pyongyang Joint Declaration of September 2018", dalam <https://www.ncnk.org/node/1633>. [Diakses 10 Januari 2021]

¹⁷⁰ Wooyoung Lee, "North, South Korea to halt military drills in border area", dalam https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/09/19/North-South-Korea-to-halt-military-drills-in-border-area/5211537339644/. [Diakses 14 Januari 2021]

kedua Korea. Moon Jae In menerima tepuk tangan meriah dan menjadi pemimpin Korea Selatan pertama yang memberikan pidato publik di Korea Utara. Di stadion yang sama, Moon Jae In, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan istri mereka menghadiri pertunjukan permainan massal "*The Glorious Country*".¹⁷¹

Pada hari ketiga (20 September 2018), pemimpin kedua Korea mengunjungi Gunung Baekdu bersama. Moon Jae In melakukan perjalanan dari Pyongyang dengan pesawat ke Bandara Samjiyon dekat Gunung Baekdu, tempat Kim Jong Un tiba lebih dulu untuk menyambutnya. Mereka kemudian menggunakan kendaraan untuk menuju ke gunung yang berada di dekat perbatasan Korea Utara dan China tersebut. Kedua pemimpin Korea juga sempat naik kereta gantung untuk mencapai *Heaven Lake*, yang terletak di sebuah kawah di atas area keramat gunung berapi. Moon Jae In adalah Presiden Korea Selatan pertama yang mengunjungi Gunung Baekdu.

Setelah sampai di danau *Heaven Lake*, Kim Jong Un dan Moon Jae In dengan istri mereka berpose bersama di depan danau untuk berfoto. Gunung berapi Baekdu dan *Heaven Lake* dianggap sebagai situs paling keramat dalam mitologi Korea dan keluarga Kim telah lama mengidentifikasi diri mereka sebagai "garis keturunan Gunung Baekdu". Sebelum Moon Jae In kembali ke Korea Selatan, sebuah penanda batu dibuat dan didedikasikan saat upacara penanaman pohon di Pyongyang untuk memperingati perjalanannya ke Korea Utara.¹⁷²

¹⁷¹ Jeong Ho Lee, "Moon gets 'standing ovation' after first ever speech by South Korean leader to North Koreans", dalam <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2164932/moon-gets-standing-ovation-after-first-ever-speech-south-korean>. [Diakses 12 Januari 2021]

¹⁷² No Name, "Kim, Moon Visit Mount Paektu as Summit Wraps", dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/kim-moon-visit-mount-paektu-summit-wraps>. [Diakses 14 Januari 2021]

BAB IV

ANALISIS *RATIONAL CHOICE THEORY* TERHADAP KEBIJAKAN KOREA SELATAN YANG CENDERUNG MENDUKUNG KOEKSISTENSI DAMAI DUA KOREA

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Korea Selatan Terhadap Prospek Reunifikasi Dua korea

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In yang cenderung lebih mendukung koeksistensi damai antara dua Korea dibandingkan prospek reunifikasi keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat dari terjadinya reunifikasi dua Korea dan kemudian sangat mempengaruhi dukungan Korea Selatan terhadap prospek reunifikasi dua Korea juga. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor perbedaan ideologi, perbedaan sistem politik, perbedaan pandangan dalam melihat reunifikasi, respon Korea Utara dan respon penduduk Korea Selatan terhadap reunifikasi,

1. Hambatan Ideologi dan Sistem Politik yang Berbeda

Korea Selatan dan Korea Utara menganut ideologi dan sistem pemerintahan yang jauh berbeda meskipun keduanya merupakan satu negara yang sama di masa lalu. Korea Selatan merupakan negara yang menganut ideologi liberalisme.¹⁷³ Liberalisme merupakan suatu paham, ideologi, pandangan filsafat, atau suatu tradisi politik yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bidang tersebut meliputi ekonomi, politik,

¹⁷³ Miza Widhyani, "Negara-negara yang menganut ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan pancasila", dalam https://www.academia.edu/34647698/NEGARA_NEGARA_YANG_MENGANUT_IDEOLOGI_LIBERALISME_KOMUNISME_SOSIALISME_DAN_PANCASILA. [Diakses 22 Januari 2021]

sosial, agama dan lain-lain. Dengan demikian, negara dan pemerintah yang menganut paham liberalisme wajib menghormati kebebasan dan hak warga negaranya dalam semua bidang kehidupan.¹⁷⁴

Paham liberalisme tumbuh dan berkembang di negara dengan sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai konsep yang sama, yaitu konsep kebebasan. Meski demikian, kebebasan yang dijunjung tinggi tetap memiliki batasan dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Korea Selatan yang merupakan negara penganut liberalisme pun memang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat sebab kekuasaan serta kedaulatan dipegang penuh oleh rakyat, dan dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana seluruh masyarakat negara memiliki hak serta kesempatan yang sama atau setara dalam berkontribusi untuk pengambilan keputusan yang berpengaruh pada nasib hidup orang banyak. Seperti negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan juga membagi pemerintahannya dalam tiga bagian yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden

¹⁷⁴ Vira Mahdiya, “Kekurangan dan Kelebihan Ideologi Liberalisme”, dalam <https://cerdika.com/kelebihan-dan-kekurangan-ideologi-liberalisme/>. [Diakses 22 Januari 2021]

bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.¹⁷⁵

Berbeda dengan Korea Selatan, Korea Utara dikenal sebagai negara penganut ideologi komunisme dan terasing di tengah pergaulan internasional. Komunisme di Korea Utara merupakan suatu perpaduan antara tradisi konfusius, masyarakat yang konservatif, kontrol, dan proses indoktrinasi komunisme yang dilakukan secara terus menerus. Perpaduan itu telah menciptakan suatu praktik sistem politik totaliter yang melebihi negara Uni Soviet (sekarang Rusia) maupun Republik Rakyat Tiongkok (China).¹⁷⁶ Dengan kata lain, Korea Utara adalah negara yang nilai-nilai moral dan atau ideologi nasionalnya masih alami dan berkarakter tidak dapat memenuhi keinginan pihak lawan.

Corak pemerintahan yang komunis konservatif masih mempengaruhi pemerintahan Korea Utara bahkan hingga Kim Jong Un naik sebagai pemimpin Korea Utara. Kecenderungan diktator juga masih terlihat dalam pemerintahan Kim Jong Un. Selain itu, Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara *Juche* (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri). Terminologi *Juche* merupakan sebutan untuk ideologi resmi yang dianut oleh Korea Utara.¹⁷⁷

Juche mengandung prinsip bahwa manusia menguasai segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Ideologi *Juche* pertama kali dicetuskan oleh Kim Il Sung pada 28 Desember 1955. Istilah *Juche* tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa

¹⁷⁵ Yuhan Lee, “Sistem Pemerintahan Korea Selatan”, dalam <https://www.kompasiana.com/leeyuhan/5dac8eff0d8230569a1f9bc4/sistem-pemerintahan-korea-selatan>. [Diakses 22 Januari 2021]

¹⁷⁶ Andi Rafael Saputra, *Dari Kim Jong-Il Hingga Kim Jong-Un* (Yogyakarta: Palapa, 2014), h. 142-143.

¹⁷⁷ *ibid.*, h. 143

Inggris atau bahasa yang lainnya. Kim Il Sung, sebagai kakek Kim Jong Un mengusung *Juche* sebagai slogan dengan menuliskan tiga dasar fundamental, yaitu merdeka dalam berpolitik (*chaju*), swasembada ekonomi (*charip*), dan mandiri dalam pertahanan (*chawi*).¹⁷⁸

Juche merupakan ideologi yang mencampurkan eklektik dari *Marxism*, *Confucianism*, *Korean Nationalism* dan *Japanese Fascism*. Ideologi ini bertujuan agar Korea Utara menjadi negara yang independen, yang dapat mengambil tempat di antara kekuatan besar dunia, tanpa takut akan dominasi asing.¹⁷⁹ Sistem pemerintahan yang dianut oleh Korea Utara adalah Monarki Komunis, yakni sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa monarki yang menjadi kepala negara sepanjang hayat, berbeda dengan presiden yang biasanya memegang jabatan hanya untuk jangka waktu tertentu. Negara komunis juga menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme.¹⁸⁰

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Korea Selatan dan Korea Utara memiliki perbedaan yang cukup kontras dalam hal ideologi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kedua belah pihak untuk melakukan reunifikasi. Akan sulit bagi pihak Korea Utara yang berideologikan komunis untuk menerima dan menerapkan ideologi liberal di negara nya, pun sebaliknya bagi pihak Korea Selatan.¹⁸¹ Ideologi *Juche* yang dianut oleh Korea Utara juga membuat negaranya menjadi negara yang tertutup karena hanya ingin percaya dan bergantung pada

¹⁷⁸ *ibid.*, h. 143-144

¹⁷⁹ Lutfi Dwi Puji Astuti dan Dinia Adrianjara, “Mengetahui *Juche*, Ideologi Negara Terisolir Korea Utara”, dalam <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1213083-mengenal-juche-ideologi-negara-terisolir-korea-utara>. [Diakses 23 Januari 2021]

¹⁸⁰ Andi Rafael Saputra, *op. cit.*, h. 144.

¹⁸¹ Faula Mahalika, “Dinamika Reunifikasi Semenanjung Korea”, dalam <http://www.pskp.or.id/2020/08/06/dinamika-reunifikasi-semenanjung-korea/>. [Diakses 22 Januari 2021]

kekuatan sendiri. Hal ini juga tentunya akan menghambat proses reunifikasi, sebab ketertutupan Korea Utara akan menyulitkan pembangunan kerja sama untuk mendukung reunifikasi dengan Korea Selatan.

Terhambatnya upaya reunifikasi Korea karena faktor perbedaan ideologi sebenarnya sudah bisa diprediksi dengan melihat salah satu faktor pemicu terjadinya Perang Korea. Perang Korea yang menjadi awal dari terpecahnya dua Korea juga dipicu karena adanya perbedaan ideologi dua negara yang begitu mendasar. Korea Selatan yang berideologikan liberal dan demokrasi, sedangkan Korea Utara dengan ideologi komunisnya, menyebabkan keduanya sulit untuk disatukan dan pada akhirnya menimbulkan rasa saling curiga antar Korea, menyebabkan kesenjangan ekonomi, dan menyebabkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea.¹⁸²

Selain itu, Korea Selatan yang memiliki sistem politik demokratis dan bebas bergerak tentunya tidak akan menikmati berkubang di bawah sistem totalitarianisme milik Korea Utara apabila reunifikasi benar terjadi. Di sisi lain, Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un juga memiliki prioritas untuk menjaga rezimnya dari kehancuran, sehingga kecil kemungkinannya bagi Korea Utara untuk menyetujui reunifikasi nasional apalagi dengan syarat yang menandai kehancuran rezim totaliternya sendiri.¹⁸³ Salah satu pilihan untuk mengatasi hambatan perbedaan ideologi dan perbedaan sistem politik adalah dengan bentuk pengaturan "satu negara, dua sistem".

¹⁸² Deby Liviamanda, "Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi Korea", dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58875/Deby%20Liviamanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Diakses 22 Januari 2021]

¹⁸³ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 22 Januari 2021]

Hal tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh China dan Hong Kong, yaitu memiliki dua sistem politik yang berbeda di bawah satu payung negara yang sama. Namun, Kim Jong Un pasti tahu bahwa melonggarkan kontrol internalnya dengan adanya pengaturan “satu negara, dua sistem” akan melemahkan posisinya sendiri. Hal ini dikarenakan 25 juta¹⁸⁴ rakyatnya yang miskin tidak diragukan lagi akan mulai bergerak untuk mengikuti 50 juta¹⁸⁵ saudara mereka di Selatan yang sudah lebih dulu maju demi keseimbangan ekonomi. Runtuhnya Tembok Berlin dan terjadinya reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur adalah contoh bagaimana hal tersebut dapat benar-benar terjadi.¹⁸⁶

Melihat bagaimana faktor perbedaan ideologi dan perbedaan sistem politik dua Korea akan menjadi masalah besar yang harus dihadapi apabila reunifikasi benar-benar terjadi, Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya bisa mencari cara lain. Cara tersebut adalah dengan berusaha untuk berkoeksistensi (hidup berdampingan) secara damai yang mana dapat dilakukan dengan mendukung terjadinya perdagangan bebas antar-Korea, mendukung pertukaran atau masuk-keluarnya penduduk antar-Korea secara lebih bebas, dan mendukung Semenanjung Korea sebagai wilayah tanpa ancaman militer.¹⁸⁷ Hal tersebutlah yang kemudian memang coba direalisasikan oleh Moon Jae In melalui kebijakan Semenanjung Korea-nya yang sangat mendukung *peaceful co-existence* di antara dua Korea.

¹⁸⁴ Jumlah penduduk Korea Utara pada tahun 2020

¹⁸⁵ Jumlah penduduk Korea Selatan pada tahun 2020

¹⁸⁶ Charlie Campbell, “What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome”, dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 22 Januari 2021]

¹⁸⁷ Alexis Dudden, Joan E. Cho, dan Mary Alice Haddad, “The goal in Korea should be peace and trade – not unification”, dalam <https://theconversation.com/the-goal-in-korea-should-be-peace-and-trade-not-unification-95701>. [Diakses 22 Januari 2021]

2. Respon Korea Utara dan Perbedaan Pandangan Dua Korea Terkait Reunifikasi

Salah satu faktor yang tentunya sangat mempengaruhi dukungan Korea Selatan terhadap prospek reunifikasi dua Korea adalah bagaimana Korea Utara merespon upaya reunifikasi yang berusaha dilakukan oleh negaranya. Korea Utara sempat beberapa kali dengan jelas menunjukkan respon negatif dan ketidaksukaannya terhadap upaya reunifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Hal tersebut sempat terjadi pada masa pemerintahan presiden Korea Selatan sebelum Moon Jae In, yaitu Park Geun Hye.

Korea Utara sempat menunjukkan respon negatif dan ketidaksukaannya terhadap dukungan Korea Selatan akan prospek reunifikasi dua Korea, setelah pidato yang disampaikan oleh Park Geun Hye pada konferensi pers yang diselenggarakan di *Blue House*, 5 Januari 2014, dan pidatonya pada 28 Maret 2014 di Dresden, Jerman.¹⁸⁸ Dalam pidatonya di *Blue House*, Park Geun Hye menyampaikan harapan akan terwujudnya reunifikasi dua Korea di masa depan dan menyebut reunifikasi dua Korea sebagai *jackpot* atau keberuntungan besar. Park Geun Hye percaya bahwa reunifikasi dapat menjadi suatu peluang bagi perekonomian Korea untuk membuat lompatan besar.¹⁸⁹ Park Geun Hye mengklaim bahwa reunifikasi yang dapat menyatukan kombinasi antara tenaga

¹⁸⁸ No Name, "Dresden Initiative for peaceful unification on the Korean peninsula", dalam <http://world.kbs.co.kr/special/kdivision/english/tasks/dresden.htm>. [Diakses 22 Januari 2021]

¹⁸⁹ Ji Eun Seo, "Unification may be jackpot: Park", dalam <https://koreajoongangdaily.joins.com/2014/01/06/politics/Unification-may-be-jackpot-Park/2983129.html>. [Diakses 22 Januari 2021]

kerja Korea Utara dan kemajuan teknologi Korea Selatan akan menciptakan banyak lapangan kerja dan memperkuat ekonomi Korea.¹⁹⁰

Sedangkan dalam pidatonya di Dresden, Park Geun Hye sempat mendesak Korea Utara agar memperluas reuni keluarga yang terpisah akibat pembagian Korea, meningkatkan pertukaran ekonomi dan budaya lintas batas, serta menyatakan akan meningkatkan bantuan kemanusiaan dari Korea Selatan. Dengan melakukan hal tersebut, Park Geun Hye berharap bisa meletakkan landasan kerja atau *blueprint* bagi reunifikasi Korea di masa depan. Dalam pidatonya di Dresden pula, Park Geun Hye sempat menyebut reunifikasi Jerman sebagai contoh dan model reunifikasi damai yang ingin dicapai Korea. Pernyataan ini bisa dianggap cukup kontroversial mengingat reunifikasi Jerman terjadi dengan adanya absorpsi Jerman Timur oleh Jerman Barat.¹⁹¹

Setelah pernyataan-pernyataan dan berbagai usulan Park Geun Hye terkait dengan reunifikasi Korea tersebut, Korea Utara langsung memberikan kecaman keras terhadap Korea Selatan. Seorang perwakilan dari Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara pun bahkan menyebut usulan reunifikasi Park Geun Hye sebagai “Mimpi di siang bolong dari seseorang yang gila”. Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara juga menuduh Korea Selatan meminta bantuan dari negara-negara asing lain untuk membantu reunifikasi Korea, dimana Korea Selatan akan

¹⁹⁰ Alexis Dudden, Joan E. Cho, dan Mary Alice Haddad, “The goal in Korea should be peace and trade – not unification”, dalam <https://theconversation.com/the-goal-in-korea-should-be-peace-and-trade-not-unification-95701>. [Diakses 22 Januari 2021]

¹⁹¹ Ruslan Burhani, “Korut damprat tawaran reunifikasi sebagai "mimpi orang gila"”, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/429074/korut-damprat-tawaran-reunifikasi-sebagai-mimpi-orang-gila>. [Diakses 22 Januari 2021]

mengabsorpsi Korea Utara, karena pernyataan Park Geun Hye yang ingin mencontoh reunifikasi Jerman.¹⁹²

Respon negatif Korea Utara terhadap dukungan Korea Selatan akan prospek reunifikasi Korea, kembali ditunjukkan setelah Park Geun Hye membentuk komite persiapan reunifikasi dua Korea. Pada bulan Juli 2014, *Blue House* mengumumkan bahwa Korea Selatan akan membentuk komite persiapan reunifikasi dua Korea yang akan dikepalai oleh Park Geun Hye. Komite tersebut akan beranggotakan 50 orang yang diantaranya terdiri atas beberapa anggota parlemen, pejabat pemerintah, hingga para ahli dalam berbagai bidang. Komite tersebut juga akan terdiri atas empat sub-komite yang mewakili urusan luar negeri dan keamanan, bidang sosial dan budaya, bidang politik dan peradilan serta ekonomi. Komite ini diharapkan bisa melakukan persiapan yang sistematis dan memberikan hasil aktual untuk tercapainya reunifikasi damai.¹⁹³

Pada bulan Mei 2017, setelah Presiden Moon Jae In resmi menjabat sebagai presiden menggantikan Park Geun Hye, Korea Utara meminta Korea Selatan untuk membubarkan komite persiapan reunifikasi dua Korea yang dibuat pada pemerintahan sebelumnya. *Korean Central News Agency*¹⁹⁴ (KCNA) menyatakan bahwa Korea Utara menganggap komite tersebut bekerja untuk melakukan “reunifikasi melalui absorpsi” dan merupakan kebijakan yang hanya akan menimbulkan konfrontasi. Korea Utara tidak menyukai dan menganggap hal ini berpotensi menghancurkan negaranya dan juga perdamaian di Semenanjung Korea,

¹⁹² *ibid.*,

¹⁹³ No Name, “S. Korea launches presidential preparatory committee for reunification with DPRK”, dalam <https://www.globaltimes.cn/content/870647.shtml>. [Diakses 23 Januari 2021]

¹⁹⁴ *Korean Central News Agency* merupakan suatu badan berita negara Korea Utara atau agregator keluaran media resmi dari Korea Utara. Badan tersebut menggambarkan pandangan pemerintah Korea Utara untuk konsumsi domestik dan asing.

sehingga Korea Utara pun meminta pemerintahan Moon Jae In untuk membubarkan komite tersebut.¹⁹⁵

Melihat bagaimana Korea Utara merespon upaya dan dukungan Korea Selatan terhadap reunifikasi Korea secara negatif pada masa pemerintahan sebelumnya, hal ini tentunya mempengaruhi arah kebijakan Moon Jae In. Kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In yang cenderung lebih mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya tentunya terpengaruh oleh respon negatif Korea Utara tersebut. Salah satu prinsip kebijakan Moon Jae In yang menyatakan bahwa Korea Selatan tidak mengharapkan jatuhnya rezim Utara, dan tidak akan melakukan unifikasi melalui absorpsi¹⁹⁶, pasti juga dibuat untuk meredakan ketakutan Korea Utara akan intensi Korea Selatan untuk menguasai Semenanjung Korea sepenuhnya.

Ketakutan Korea Utara akan intensi Korea Selatan untuk melakukan reunifikasi melalui absorpsi sebenarnya bukanlah ketakutan yang tidak berdasar. Ketakutan ini kemungkinan disebabkan oleh salah satu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu bocornya dokumen-dokumen rahasia berisi berkas diplomatik kedutaan besar Amerika Serikat di situs jejaring Wikileaks. Dokumen tersebut berisi tentang keyakinan Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa rencana reunifikasi Korea dengan tampuk kepemimpinan berada di tangan Korea Selatan akan memiliki prospek bagus dan kemungkinan lebih besar untuk terwujud.¹⁹⁷

¹⁹⁵ No Name, "DPRK urges S. Korea to abolish preparatory committee for reunification", dalam http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/29/c_136324451.htm. [Diakses 16 Januari 2021]

¹⁹⁶ Ministry of Unification, "Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula", dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/ [Diakses 16 Januari 2021]

¹⁹⁷ Deby Liviamanda, "Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi Korea", dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58875/Deby%20Liviamanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Diakses 22 Januari 2021]

Selain keyakinan akan lancarnya skenario reunifikasi Korea di bawah promotor Korea Selatan, rahasia di dalam berkas yang dikirim Duta Besar AS untuk Korea Selatan bernama Kathleen Stephens juga mencantumkan tentang skenario jatuhnya rezim komunis Korea Utara sebagai langkah awal upaya reunifikasi.¹⁹⁸ Di sisi lain, ketakutan Korea Utara juga bisa disebabkan oleh sejarah perbedaan pandangan kedua Korea terhadap persoalan reunifikasi. Semenjak pemerintahan Kim Dae Jung hingga Moon Jae In upaya nyata untuk mewujudkan reunifikasi memang sudah sangat berkurang. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Korea Selatan sudah lebih berfokus pada mendukung upaya koeksistensi damai dua Korea daripada berusaha untuk menyatukan kembali kedua negara.

Tetapi, ketika reunifikasi masih gencar diupayakan oleh kedua Korea pada tahun 1980-an, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap reunifikasi. Pada periode tersebut, Korea Selatan menganggap bahwa reunifikasi harus dicapai dengan membangun republik demokratis yang sepenuhnya bersatu dalam satu negara dan satu pemerintahan. Sebaliknya, Korea Utara lebih mendukung reunifikasi dengan penyatuan yang tidak seutuhnya, di mana dua pemerintahan Korea akan berada di bawah satu jubah konfederasi.¹⁹⁹ Sejarah perbedaan pandangan terkait dengan reunifikasi tersebut lah yang kemudian berpotensi menimbulkan kecurigaan di antara dua Korea dan juga menimbulkan ketakutan terjadinya reunifikasi melalui absorpsi.

¹⁹⁸ *ibid.*,

¹⁹⁹ Korean Overseas Information Service, *A Handbook of Korea* (Seoul: Samhwa Printing Co. Ltd., 1990), h. 321.

3. Pandangan dan Respon Publik Korea Selatan Terhadap Persoalan Reunifikasi dan Korea Utara

Faktor lain yang memengaruhi dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap reunifikasi dua Korea adalah bagaimana respon publik di negaranya terhadap persoalan tersebut. Ketika Presiden Moon Jae In dan Kim Jong Un mengadakan *Inter-Korean Summit* pada tahun 2018 dan sepakat untuk menandatangani Deklarasi Panmunjom, harapan publik akan damainya dua Korea seperti telah menemui titik terang. Tetapi, dukungan dan harapan masyarakat Korea Selatan akan damainya dua Korea nyatanya tidak sejalan dengan dukungan mereka terhadap prospek reunifikasi kedua negara.

Reunifikasi telah lama dianggap sebagai suatu tujuan akhir dan bahkan dianggap sakral bagi kedua Korea. Istilah "unifikasi" sempat muncul beberapa kali dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan presiden Korea Selatan, Moon Jae In, pada *Inter-Korean Summit* 2018. Bahkan kata "unifikasi" menjadi bagian dari judul pernyataan tersebut yaitu: "Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran, dan Unifikasi Semenanjung Korea". Namun penyebutan tersebut sebenarnya tidak benar-benar mengarah pada prospek reunifikasi yang sesungguhnya dan tidak juga segera membuatnya terjadi.²⁰⁰

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Moon Jae In dalam pidatonya di *Körber Foundation* yang menyatakan bahwa dalam pemerintahannya, unifikasi yang ingin dicapai dengan Korea Utara memiliki arti sebagai suatu proses dimana

²⁰⁰ John Power dan Michael Holtz, "Reunification? Many young South Koreans say, 'Let's not.'", dalam <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2018/0503/Reunification-Many-young-South-Koreans-say-Let-s-not>. [Diakses 20 Januari 2021]

kedua belah pihak dapat berkoeksistensi dengan damai, dapat mencapai kesejahteraan bersama, dan bukan menyatukan kembali dua Korea dalam satu pemerintahan. Moon Jae In juga menegaskan bahwa Korea Selatan tidak memiliki niat untuk melakukan reunifikasi dengan Korea Utara, dalam artian melakukannya dengan cara unifikasi melalui absorpsi. Dalam pidatonya pula Moon Jae In menyatakan bahwa reunifikasi mungkin saja bisa tercapai di masa depan, tetapi pemerintahannya sekarang hanya akan berfokus pada perdamaian dua Korea saja.²⁰¹

Faktanya, banyak dari masyarakat Korea Selatan yang memandang ide reunifikasi sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa dekade perpecahan di dua Korea telah menciptakan kesenjangan ekonomi dan budaya yang semakin melebar di antara keduanya. Menurut para analis dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, dan itu pun hanya jika orang Korea Selatan memang benar-benar berniat ingin menyelesaikannya.

Reunifikasi telah kehilangan banyak daya tariknya terutama bagi generasi muda Korea Selatan yang tidak memiliki ingatan tentang Semenanjung Korea yang bersatu. Banyak dari mereka tidak melihat banyak keuntungan dari upaya reunifikasi atau upaya menyatukan Selatan yang kapitalis dan demokratis dengan Utara yang dianggap totaliter dan miskin.²⁰² Sebenarnya tidak hanya generasi muda Korea Selatan yang memegang pandangan bahwa upaya reunifikasi dua Korea

²⁰¹ No Name, "Speech at the invitation of the Koerber Foundation", dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 21 Januari 2021]

²⁰² John Power dan Michael Holtz, "Reunification? Many young South Koreans say, 'Let's not.'", dalam <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2018/0503/Reunification-Many-young-South-Koreans-say-Let-s-not>. [Diakses 21 Januari 2021]

tidak akan membawa banyak keuntungan. Dukungan publik terhadap reunifikasi dua Korea secara keseluruhan terus menurun di Korea Selatan.

Menurut survei yang diterbitkan tahun 2017 oleh *Korea Institute for National Unification*, yang mana survei ini juga didanai langsung oleh pemerintah Korea Selatan, hanya ada sekitar 57,8 persen dari keseluruhan responden (yang merupakan penduduk Korea Selatan) yang menganggap reunifikasi dua Korea itu perlu dilakukan. Angka tersebut turun cukup jauh bila dibandingkan dengan angka 69,3 persen yang pernah di dapat pada survei yang sama pada tahun 2014. Namun di antara para generasi muda, yang banyak di antaranya memiliki kecenderungan tidak terpengaruh oleh daya tarik identitas atau warisan etnis, jumlah responden yang mendukung terjadinya reunifikasi dua Korea angkanya jauh lebih rendah.

Menurut survei *Korea Institute for National Unification* tahun 2017, hanya 38,9 persen dari keseluruhan responden yang berusia 20-an yang menganggap bahwa reunifikasi dua Korea itu perlu dilakukan.²⁰³ Selain itu, persepsi masyarakat Korea Selatan terkait dengan ancaman Korea Utara secara langsung juga mempengaruhi persepsi mereka tentang Korea Utara dan permasalahan reunifikasi.

Tabel 4.1 Survei Persepsi Publik Korea Selatan Terhadap Ancaman Korea Utara Melalui Tanggapan Publik akan Kemungkinan Terjadinya Perang Lain di Semenanjung Korea Berdasarkan Kelompok Usia

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total	49.8	58.8	47.5	49.0	46.4	60.6	52.5
20s	57.4	64.5	66.2	55.6	55.5	66.2	57.4
30s	46.0	59.9	62.1	48.4	45.5	62.1	49.3
40s	42.7	52.1	53.5	42.8	38.0	53.5	41.5
50s	48.5	58.0	57.2	47.1	44.8	57.2	47.7
60+	55.8	60.6	64.6	52.0	49.4	64.6	64.4

²⁰³ *ibid.*,

(Sumber: *The Asan Institute of Policy Studies*)

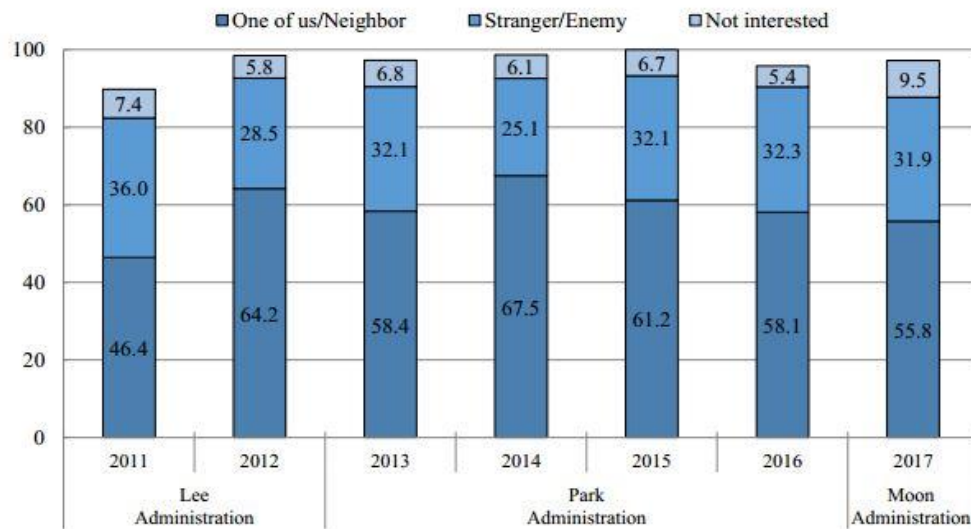
Untuk melihat persepsi ancaman Korea Utara bagi masyarakat Korea Selatan, *The Asan Institute of Policy Studies* menganalisis evaluasi masyarakat Korea Selatan melalui suatu survei tentang kemungkinan pecahnya perang lain di Semenanjung Korea atau tidak. Hasil survei selama bertahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap kemungkinan pecahnya perang dan ancaman Korea Utara dianggap cukup serius. Dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, persentase yang jauh lebih tinggi terlihat di antara mereka yang berusia 20-an dan orang tua yang berumur di atas 60-an, yang mana mereka percaya bahwa perang antara kedua Korea dapat terjadi lagi sewaktu-waktu.²⁰⁴

Sepanjang 2011 hingga awal masa pemerintahan Moon Jae In pada 2017, setidaknya 55,5% warga Korea Selatan yang berusia 20-an percaya bahwa perang lain dapat meletus di Semenanjung Korea. Survei tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok masyarakat usia yaitu 20-an dan 60-an ke atas menganggap ancaman Korea Utara jauh lebih serius daripada kelompok usia lainnya dan hal ini juga menjelaskan kecenderungan konservatif mereka terkait dengan masalah keamanan.²⁰⁵ Menurut survei lain dari *The Asan Institute of Policy Studies*, pandangan publik Korea Selatan terhadap Korea Utara juga mengalami perubahan ketika Moon Jae In memulai masa pemerintahannya.

Grafik 4.1 Pandangan Publik Korea Selatan Terhadap Korea Utara Berdasarkan Tahun dan Masa Pemerintahan

²⁰⁴ Jiyeon Kim, Kildong Kim, dan Chungku Kang, "South Korean Youths' Perceptions of North Korea and Unification", dalam <http://en.asaninst.org/contents/43527/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²⁰⁵ *ibid.*,



(Sumber: *The Asan Institute of Policy Studies*)

Sesuai dengan hasil survei di atas, terlihat bahwa presentase publik Korea Selatan yang menganggap Korea Utara sebagai bagian dari sesama Korea, saudara, ataupun tetangga mengalami penurunan pada masa pemerintahan Moon Jae In. Presentase publik Korea Selatan yang menganggap Korea Utara sebagai orang asing, musuh, ataupun tidak tertarik sama sekali dengan Korea Utara juga mengalami kenaikan pada masa pemerintahan Moon Jae In, bila dibandingkan dengan akhir periode pemerintahan Lee Myung Bak dan keseluruhan periode pemerintahan Park Geun Hye.²⁰⁶ Pandangan terhadap Korea Utara yang kurang baik ini kemudian berpengaruh juga terhadap pandangan publik Korea Selatan akan apakah reunifikasi perlu dilakukan secepatnya atau tidak.

The Asan Institute of Policy Studies juga merilis hasil survei yang dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 tentang kecepatan terjadinya reunifikasi yang diharapkan oleh publik Korea Selatan. Dalam survei tersebut didapatkan hasil bahwa mayoritas publik Korea Selatan cenderung menganggap bahwa reunifikasi

²⁰⁶ Jiyeon Kim, Kildong Kim, dan Chungku Kang, "South Korean Youths' Perceptions of North Korea and Unification", dalam <http://en.asaninst.org/contents/43527/>. [Diakses 24 Januari 2021]

dua Korea tidak perlu untuk buru-buru diwujudkan dan hanya perlu diwujudkan tergantung situasi saja. Berdasarkan survei *The Asan Institute of Policy Studies* bahkan didapatkan hasil juga bahwa ada publik Korea Selatan yang menganggap reunifikasi Korea itu tidak perlu untuk dilakukan sama sekali.²⁰⁷

Tabel 4.2 Pandangan Terkait dengan Kecepatan Terjadinya Reunifikasi Dua Korea yang Diharapkan oleh Publik Korea Selatan

	As soon as possible	Dependent on circumstances	No rush	Unnecessary
Total	16.2	<u>54.6</u>	22.3	7.0
20s	<u>7.2</u>	<u>56.9</u>	23.9	<u>12.0</u>
30s	12.8	<u>55.5</u>	21.3	<u>10.4</u>
40s	19.0	<u>62.1</u>	15.7	3.2
50s	18.1	<u>55.7</u>	21.9	4.2
60+	<u>21.0</u>	<u>45.1</u>	27.5	<u>6.4</u>

(Sumber: *The Asan Institute of Policy Studies*)

Hasil-hasil survei di atas secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan publik Korea Selatan untuk memiliki respon dan pandangan yang kurang baik terhadap Korea Utara maupun prospek reunifikasi kedua negara. Dari hasil-hasil survei di atas terlihat pula keengganan sebagian besar publik Korea Selatan, terutama para generasi muda, dalam mendukung prospek reunifikasi dua Korea. Respon dan pandangan negatif publik Korea Selatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap dukungan pemerintah Korea Selatan akan prospek reunifikasi dua Korea kedepannya. Dengan melihat respon dan pandangan masyarakatnya yang kurang baik terhadap Korea Utara maupun prospek reunifikasi, memilih untuk lebih berfokus pada memberikan dukungan terhadap koeksistensi damai dua Korea merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintahan Moon Jae In.

²⁰⁷ Jiyeon Kim, Kildong Kim, dan Chungku Kang, "South Korean Youths' Perceptions of North Korea and Unification", dalam <http://en.asaninst.org/contents/43527/>. [Diakses 24 Januari 2021]

4. Hambatan Ekonomi dalam Upaya Mewujudkan Reunifikasi

Untuk mendukung terwujudnya reunifikasi dua negara secara menyeluruh dan juga menstabilkan kondisi perekonomian pasca reunifikasi tentunya dibutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya yang sangat besar tersebut akan ditanggung oleh kedua negara yang akan melakukan reunifikasi, tetapi pendanaan reunifikasi akan cenderung lebih membebani pihak negara yang memiliki kondisi perekonomian lebih baik dan lebih makmur. Reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur merupakan contoh nyata dari proses reunifikasi dua negara yang memakan sangat banyak biaya.

Dalam upaya reunifikasi dua Jerman, pemerintah federal Jerman diperkirakan harus mentransfer dana dari Jerman bagian barat ke Jerman bagian timur hingga sekitar 1,3 triliun euro (data tahun 2009) untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di wilayah bekas Jerman Timur.²⁰⁸ Pada tahun 2019 atau 3 dekade setelah runtuhnya tembok Berlin, diperkirakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah federal Jerman untuk mendukung pembangunan dan perbaikan kondisi ekonomi pasca reunifikasi telah mencapai lebih dari 2 triliun dolar (USD).²⁰⁹ Jika kasus tersebut dijadikan contoh untuk memprediksi prospek reunifikasi dua Korea, maka bisa disimpulkan bahwa kedua Korea juga akan menanggung beban berat ekonomi untuk mendukung terwujudnya reunifikasi kedua negara.

²⁰⁸ Reuters Staff, "Study shows high cost of German reunification: report", dalam <https://www.reuters.com/article/us-germany-wall-idUSTRE5A613B20091107>. [Diakses 24 Januari 2021]

²⁰⁹ Stephen Beard, "Itemizing Germany's \$2 trillion bill for reunification", dalam <https://www.marketplace.org/2019/11/05/itemizing-germanys-2-trillion-bill-for-reunification/>. [Diakses 24 Januari 2021]

Tetapi tercapainya reunifikasi Jerman dengan pengeluaran dana yang sangat besar itu sebenarnya tidak benar-benar bisa dibandingkan dengan prospek reunifikasi dua Korea. Permasalahannya terletak pada ketimpangan ekonomi yang sangat besar antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ketika reunifikasi Jerman sedang diupayakan, Jerman Timur berada dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Korea Utara yang perekonomiannya sangat tertinggal jauh dari Korea Selatan. Pada saat Jerman Barat akan bersatu kembali dengan Jerman Timur, rasio perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita kedua negara berada di kisaran 7 atau 10 banding 1. Hal ini berbeda jauh sekali dengan perbedaan ekonomi kedua Korea.

Diperkirakan pada tahun 2017 hingga 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Korea Selatan berada di kisaran 33.200 dolar (USD). Sedangkan pada tahun yang sama, PDB per kapita Korea Utara hanya berada di kisaran 1.800 dolar (USD).²¹⁰ Jika dibandingkan maka rasio perbedaan kondisi perekonomian Korea Selatan dan Korea Utara berada di kisaran 19 banding 1. Melihat perbedaan kondisi ekonomi yang sangat timpang tersebut, bisa diperkirakan bahwa warga Korea Utara akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengejar dan menikmati kemakmuran yang sama seperti warga Korea Selatan.²¹¹

Untuk menyukseskan reunifikasi dua Korea, pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kondisi ekonomi Korea Utara sangat dibutuhkan agar Korea Utara dapat berbaur dengan baik dengan Korea Selatan yang sudah lebih dulu maju.

²¹⁰ Jillian Harding, "Reuniting North Korea and South Korea could cost trillions of dollars", dalam <https://www.cbsnews.com/news/reuniting-north-korea-and-south-korea-could-cost-trillions-investment/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²¹¹ Melissa Chan, "What Would It Take to Unify Korea? Germany Offers Lessons", dalam <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/11/german-reunification-offers-lessons-korea/601297/>. [Diakses 24 Januari 2021]

Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika Jerman Barat dan Jerman Timur yang memiliki ketimpangan ekonomi lebih kecil dibandingkan dua Korea saja membutuhkan lebih dari 2 triliun dolar (USD) untuk mewujudkan reunifikasi, maka besar kemungkinannya kedua Korea akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar lagi untuk mendukung upaya reunifikasi negaranya.

Para pengamat memperkirakan bahwa reunifikasi Korea Utara dan Selatan dapat menghabiskan biaya triliunan dolar (USD) dan reunifikasi pun akan tetap memakan waktu beberapa dekade.²¹² Menurut Dr. Leonid Petrov seorang pakar Korea Utara dan juga *visiting researcher* di *Australian National University's College of Asia and the Pacific*, reunifikasi dua Korea setidaknya akan menelan biaya sekitar 10 triliun dolar (USD). Dr. Petrov mengatakan perkiraan baru-baru ini menyebutkan kemungkinan bahwa biaya reunifikasi dua Korea bisa mencapai 3 triliun dolar (USD) di awal, dan kemudian membutuhkan tambahan sekitar 7-8 triliun dolar (USD) hanya dalam dekade pertama. Dr. Petrov juga mengatakan bahwa alasan generasi muda Korea Selatan hampir sama sekali tidak tertarik untuk mendukung reunifikasi adalah karena mereka tahu negaranya harus membayar besar untuk hal tersebut.²¹³

Sebenarnya kepastian berapa biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan reunifikasi dua Korea akan sangat bergantung pada apa yang menjadi katalisator reunifikasi. Para ahli berpendapat bahwa sebagian besar biaya seputar skenario

²¹² Jillian Harding, "Reuniting North Korea and South Korea could cost trillions of dollars", dalam <https://www.cbsnews.com/news/reuniting-north-korea-and-south-korea-could-cost-trillions-investment/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²¹³ Frank Chung, "North Korean reunification could cost \$10 trillion", dalam <https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/north-korean-reunification-could-cost-10-trillion/news-story/e6fc62c5b29b45085eb4e64fdd43235d>. {Diakses 24 Januari 2021}

reunifikasi Korea akan bergantung pada apakah negara-negara tersebut memutuskan untuk melakukan reunifikasi secara bertahap, atau apakah reunifikasi terjadi karena adanya kekacauan seperti melalui pecahnya perang. Jika reunifikasi direncanakan dengan hati-hati dan diikuti oleh penyatuan yang damai, maka skenario tersebut akan memakan biaya reunifikasi lebih sedikit bila dibandingkan skenario reunifikasi yang terjadi karena runtuhnya perekonomian Korea Utara ataupun yang disebabkan oleh pecahnya perang.

Hal ini dikarenakan reunifikasi dengan skenario runtuhnya perekonomian Korea Utara maupun pecahnya perang akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pemulihan ekonomi dan rekonstruksi infrastruktur.²¹⁴ Satu hal yang bisa dipastikan adalah hambatan ekonomi dalam persoalan reunifikasi dua Korea bukanlah suatu masalah yang mudah untuk diselesaikan. Ketimpangan kondisi ekonomi di antara kedua Korea mengakibatkan reunifikasi kedua negara akan mendatangkan kesulitan yang jauh lebih buruk daripada ketika Jerman Timur dan Barat bersatu pada tahun 1990.²¹⁵

Hambatan dan beban ekonomi yang harus dipikul dan dihadapi untuk mendukung reunifikasi Korea tentunya dapat mempengaruhi dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap prospek reunifikasi. Pilihan pemerintahan Moon Jae In untuk lebih berfokus mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya merupakan suatu pilihan yang baik. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa mendukung prospek reunifikasi Korea akan jauh lebih banyak

²¹⁴ Jillian Harding, "Reuniting North Korea and South Korea could cost trillions of dollars", dalam <https://www.cbsnews.com/news/reuniting-north-korea-and-south-korea-could-cost-trillions-investment/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²¹⁵ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 24 Januari 2021]

memakan biaya dan waktu, dibandingkan dengan hanya sekedar mendukung koeksistensi damai kedua negara melalui kerja sama ataupun usaha perdamaian lainnya.

5. Dinamika Hubungan Antara-Korea dan Pengaruh Pihak Sekutu Masing-masing Korea

Dukungan pemerintah Korea Selatan terhadap prospek reunifikasi dua Korea juga berkaitan erat dengan dinamika hubungan antara kedua negara. Hal ini dikarenakan tercapainya reunifikasi tentunya sangat bergantung pada kondisi dari baik atau tidaknya suatu hubungan di antara kedua negara yang terlibat. Pada masa pemerintahan Moon Jae In, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sempat mengalami peningkatan yang sangat baik, tetapi kemudian hubungan kedua negara juga sempat beberapa kali kembali mengalami penurunan.

Peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In secara signifikan terjadi pada tahun 2018. Peningkatan tersebut berawal ketika tim Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk berparade bersama dalam satu defile peserta pada upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018. Pada upacara pembukaan olimpiade yang diselenggarakan di Korea Selatan tersebut, Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, juga terlihat datang menghadiri acara dan sempat bersalaman dengan Moon Jae In.²¹⁶ Selain karena peristiwa yang terjadi di olimpiade musim dingin, hubungan dua Korea pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan pesat akibat dari diselenggarakannya 3 kali

²¹⁶ Nugyasa Laksamana, "Korea Selatan-Korea Utara Bersatu dalam Defile Olimpiade Musim Dingin", dalam <https://olahraga.kompas.com/read/2018/02/09/20212431/korea-selatan-korea-utara-bersatu-dalam-defile-olimpiade-musim-dingin>. [Diakses 22 Januari 2021]

pertemuan *Inter-Korean Summit*, dibuatnya Deklarasi Panmunjom, dan ditandatanganinya *Pyongyang Joint Declaration*.

Setelah tahun 2018 usai, sayangnya hubungan kedua Korea kembali memburuk pada 2 tahun setelahnya. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara juga akhirnya kembali mencapai titik terendah akibat dari keputusan Korea Utara untuk meledakkan Kantor Penghubung Antar-Korea di Kaesong pada 14 Juni 2020.²¹⁷ Beberapa kritikan yang disampaikan oleh Kim Yo Jong terhadap Korea Selatan dan Moon Jae In pun semakin memperkeruh hubungan di antara Korea Selatan dan Korea Utara.²¹⁸ Dinamika hubungan kedua Korea yang sulit diprediksi dan juga terus menerus mengalami pasang surut tersebut, membuat pemerintah kedua Korea kesulitan untuk bahkan hanya sekedar mewujudkan koeksistensi damai di antara keduanya. Jika kedua pemerintah Korea saja kesulitan untuk mendukung terwujudnya koeksistensi damai di antara kedua negara, prospek reunifikasi kedua Korea tentunya akan jauh lebih sulit lagi untuk diwujudkan.

Di sisi lain, Korea Selatan dan Korea Utara juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh asing yang didapatkan oleh kedua negara dari pihak sekutunya masing-masing. Korea Selatan memiliki Amerika Serikat sebagai sekutu utama, sedangkan Korea Utara memiliki dukungan dari China dan Rusia (meskipun dukungan itu berubah-ubah dan berkurang). Ancaman Korea Utara adalah alasan besar mengapa Amerika Serikat mempertahankan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan. Sedangkan sebagian besar dukungan China untuk Korea Utara berasal dari

²¹⁷ Neha Banka, "Explained: North Korea-South Korea relations, two years after Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-southkorea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/>. [Diakses 22 Januari 2021]

²¹⁸ Scott Snyder, "Back to square one for inter-Korean relations", dalam <https://www.eastasiaforum.org/2020/06/23/back-to-square-one-for-inter-korean-relations/>. [Diakses 12 Januari 2021]

keenggannya terhadap kemungkinan bersatunya Semenanjung Korea yang akan bersekutu dengan Amerika Serikat, sehingga nantinya dapat memperbesar kemungkinan ditempatkannya pasukan Amerika Serikat di sekitar perbatasan China.²¹⁹

Melihat besarnya pengaruh Amerika Serikat dan China di Semenanjung Korea, maka pemerintah Korea Selatan perlu mempertimbangkan respon dan pengaruh dari masing-masing sekutu, apabila pemerintahnya memang ingin mendukung tercapainya prospek reunifikasi kedua Korea. Terkait dengan permasalahan reunifikasi, sebenarnya baik Amerika Serikat maupun China dengan jelas menyatakan dukungannya terhadap prospek bersatunya kembali kedua Korea.²²⁰ Tetapi, bagi Amerika Serikat maupun China, tercapainya reunifikasi dua Korea dapat dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk mencapai keinginan keinginan mereka.

Amerika Serikat menginginkan reunifikasi dua Korea dilakukan secara damai dan dengan persyaratan denuklirisasi penuh dari Korea Utara. Hal ini sejalan dengan pernyataan resmi yang pernah disampaikan oleh perwakilan dari *State Department*²²¹ Amerika Serikat pada tahun 2018, yaitu bahwa tujuan utama dari Amerika Serikat adalah tercapainya denuklirisasi penuh di wilayah Semenanjung

²¹⁹ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 22 Januari 2021]

²²⁰ Oren Dorell, "U.S. would support reunified Korean Peninsula — without nukes, State Department says", dalam <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/01/25/u-s-would-support-reunification-korean-peninsulnorth-koreas-call-reunification-could-line-u-s-policy/1067341001/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²²¹ U.S. *State Department* atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merupakan departemen eksekutif pemerintah federal AS yang bertanggung jawab atas politik luar negeri dan hubungan internasional negara tersebut.

Korea.²²² Sayangnya, banyak yang menganggap bahwa denuklirisasi Korea Utara hampir tidak mungkin tercapai.

Hal ini dikarenakan Korea Utara menganggap senjata nuklirnya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan suatu penjamin keamanan absolut negaranya.²²³ Pada tahun 2018, Korea Utara yang tidak sependapat dengan Amerika Serikat dalam permasalahan denuklirisasi, dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya, kecuali jika Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama.²²⁴ Korea Utara bahkan mengatakan bahwa negaranya tidak akan menghentikan program senjata nuklirnya meski dengan imbalan deklarasi resmi berakhirnya Perang Korea sekalipun. Padahal saat itu Korea Utara yang diwakili oleh pemimpinnya, Kim Jong Un, telah setuju untuk menandatangani *Pyongyang Joint Declaration* dengan Presiden Moon Jae In pada tahun 2018, dimana salah satu poin dalam deklarasi tersebut menyatakan bahwa kedua Korea akan berusaha untuk mendukung proses denuklirisasi Semenanjung Korea.²²⁵

Jika bagi Amerika Serikat reunifikasi dua Korea dapat digunakan untuk menghilangkan ancaman Korea Utara dengan adanya denuklirisasi, bagi China reunifikasi dua Korea bisa berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk

²²² Oren Dorell, "U.S. would support reunified Korean Peninsula — without nukes, State Department says", dalam <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/01/25/u-s-would-support-reunification-korean-peninsula-north-koreas-call-reunification-could-line-u-s-policy/1067341001/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²²³ Cui Lei, "Why It's Nearly Impossible to Denuclearize North Korea", dalam <https://thediplomat.com/2018/06/why-its-nearly-impossible-to-denuclearize-north-korea/>. [Diakses 24 Januari 2021]

²²⁴ Min Joo Kim, "North Korea rejects denuclearization unless U.S. 'nuclear threat' is eliminated", dalam https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-korea-rejects-denuclearization-unless-us-nuclear-threat-is-eliminated/2018/12/20/fc642a2-0438-11e9-b5df-5d3874f1ac36_story.html. [Diakses 25 Januari 2021]

²²⁵ VOA News, "N. Korea Rejects Idea of Peace Treaty in Exchange for Denuclearization", dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/n-korea-rejects-idea-peace-treaty-exchange-denuclearization>. [Diakses 25 Januari 2021]

menyudutkan aliansi AS-Korsel. Hal ini dikarenakan tercapainya reunifikasi dua Korea berpotensi akan merusak argumen Amerika Serikat untuk keberlanjutan kehadiran personel militernya di Semenanjung Korea. Menurut Christopher Green, seorang ahli dan peneliti Semenanjung Korea untuk *International Crisis Group*, jika reunifikasi dua Korea tercapai maka China akan mempertanyakan alasan atas kehadiran pasukan AS di Semenanjung Korea.

China akan menganggap kehadiran pasukan AS tidak diperlukan lagi dan pasukan militer AS pun harus meninggalkan Semenanjung Korea karena rezim perdamaian telah tercapai dengan adanya reunifikasi.²²⁶ Pertanyaan dan fokus China terhadap keberadaan pasukan AS di Semenanjung Korea, sebenarnya didasari oleh kekhawatirannya akan kemungkinan ditempatkannya pasukan AS di sekitar perbatasan negaranya dengan Korea setelah tercapainya reunifikasi. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara selama ini masih dianggap oleh China sebagai penyangga penting negaranya dari gangguan militer AS-Korsel.²²⁷

Pertanyaan dan desakan China terkait dengan kehadiran pasukan AS yang seharusnya meninggalkan Semenanjung Korea setelah tercapainya reunifikasi akan menyudutkan aliansi AS-Korsel. Menurut Christopher Green, hal tersebut akan sangat menyebabkan ketidakstabilan politik bagi Korea Selatan. China yang semakin tegas di bawah Presiden Xi Jinping sebenarnya memang telah membidik Korea Selatan semenjak negara tersebut menjadi tuan rumah dari Sistem Pertahanan Antirudal (THAAD) milik AS. Apabila reunifikasi kedua Korea

²²⁶ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 25 Januari 2021]

²²⁷ Bonnie S. Glaser dan Yun Sun, "Chinese Attitudes toward Korean Unification", dalam *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol. 24 No. 2 (2015), h. 80.

tercapai, lalu kemudian menyebabkan argumen keberadaan pasukan AS di Korea hilang karena tidak adanya lagi ancaman Korea Utara, maka kesempatan tersebut dapat digunakan oleh China untuk meningkatkan pengaruh regionalnya di Asia Timur, terutama Korea, dengan mengorbankan AS.²²⁸

Dengan melihat berbagai potensi pengaruh asing dari pihak sekutu masing-masing Korea terkait dengan persoalan reunifikasi, maka pemerintah Korea Selatan perlu mempertimbangkan lagi jika memang negaranya ingin mendukung prospek reunifikasi Korea. Prospek reunifikasi yang sebenarnya sulit untuk dicapai karena permasalahan denuklirisasi dan hubungan tidak baik antara Korut-AS, serta potensi akan dimanfaatkannya reunifikasi untuk kepentingan China, menjadikan reunifikasi sebagai pilihan yang kurang tepat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pilihan terbaik pemerintah Korea Selatan adalah untuk berfokus mendukung terciptanya koeksistensi damai di antara dua Korea.

B. Analisis Kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In Berdasarkan Komponen *Rational Choice Theory*

Berdasarkan Model Pilihan Rasional/*Rational Choice Theory*, negara atau pemerintah dianggap sebagai aktor yang menjadi decision maker dan dapat menentukan tindakan secara rasional. Dalam menentukan tindakan secara rasional, para decision maker melakukan pertimbangan yang dipengaruhi oleh 4 komponen. 4 komponen tersebut ialah *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran), *Options* (opsi), *Consequences* (konsekuensi), dan *Choice* (pilihan).²²⁹

²²⁸ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 25 Januari 2021]

²²⁹ *ibid.*, h. 694

Inti dari hubungan keempat komponen *Rational Choice* tersebut ialah ketika *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran) dapat diidentifikasi, maka muncul berbagai *Options* (opsi) tindakan yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Opsi-opsi yang dimiliki negara kemudian kembali dipertimbangkan *Consequences*-nya (konsekuensinya) oleh *decision maker* sehingga muncul satu *Choice* (pilihan). Pilihan (kebijakan) ini yang selanjutnya dinilai kemanfaatannya bagi pencapaian sasaran dan tujuan negara.²³⁰ Keempat komponen *Rational Choice Theory* yang saling berkaitan tersebut, dapat digunakan untuk menganalisis mengapa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In lebih condong mendukung koeksistensi damai dua Korea daripada prospek reunifikasi kedua negara.

Komponen yang pertama yaitu *Goals and Objectives* (tujuan dan sasaran). Pada masa pemerintahannya, Moon Jae In mengeluarkan *Berlin Initiative* sebagai outline dari kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.²³¹ Dikutip dari laman *Ministry of Unification*, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki 3 *goals* utama. Tiga *goals* utama tersebut ialah resolusi nuklir Korea Utara dengan membentuk perdamaian yang permanen, pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, dan realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea.²³²

²³⁰ Syinthia Fawaati, "Indonesian Defense Diplomacy On The Cooperation Between Indonesian Ministry Of Defense Of The Republic Of Indonesia and United States Defense Institutional Reform Initiatives", dalam *Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan*, Vol. 3 No. 1 (2017), h. 4.

²³¹ Faizah Nadhiva, Anggia Utami Dewi, dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", dalam *Global Strategis*, Th. 13, No. 2 (2019), h. 158

²³² Ministry of Unification, "Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula", dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/ [Diakses 20 Januari 2021]

Sesuai dengan 3 *goals* utama dari kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In yang telah disebutkan di atas, maka komponen *goals and objectives* (tujuan dan sasaran) dari kebijakan Moon Jae In dapat teridentifikasi. Sebenarnya apa yang disebut *Ministry of Unification* sebagai *goals* dari kebijakan Moon Jae In merupakan bagian dari **komponen objectives (sasaran)** bukan komponen *goals* (tujuan). "Tujuan" bersifat luas dan umum (*broad and general*), sedangkan "sasaran" bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan.²³³ Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai *goals* dari kebijakan Moon Jae In merupakan bagian dari komponen sasaran karena sifatnya yang sudah sangat spesifik.

Kemudian, jika resolusi nuklir Korea Utara dengan membentuk perdamaian yang permanen, pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, dan realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea merupakan komponen sasaran dalam kebijakan Moon Jae In, maka bisa disimpulkan bahwa **komponen goals (tujuan)** yang bersifat luas dan umum dalam kebijakan Moon Jae In adalah menjaga stabilitas perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Semenanjung Korea. Selanjutnya, jika tujuan dan sasaran telah teridentifikasi, maka akan dipilih suatu opsi (*options*) atau alternatif (*alternatives*) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Komponen opsi (*options*) atau alternatif (*alternatives*) dalam *Rational Choice Theory* menjelaskan bahwa setiap aktor rasional diharuskan untuk memilih salah satu di antara alternatif atau opsi yang ada di dalam menghadapi situasi

²³³ No Name, "Perbedaan Tujuan dan Sasaran", dalam <https://www.scribd.com/document/358859065/Perbedaan-Tujuan-Dan-Sasaran>. [Diakses 25 Januari 2021]

tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu.²³⁴ Korea Selatan sebagai aktor rasional memiliki 2 opsi untuk mencapai tujuannya yaitu menjaga stabilitas perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Semenanjung Korea. **Opsi atau alternatif yang pertama** adalah dengan mendukung upaya reunifikasi dua Korea, dan **opsi atau alternatif yang kedua** adalah dengan sekedar mendukung upaya koeksistensi damai kedua negara.

Sebagai aktor rasional, Korea Selatan dibawah pemerintahan Moon Jae In dianggap akan memilih suatu opsi dari berbagai opsi lain yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi karena dipilihnya suatu opsi. Pertimbangan akan berbagai konsekuensi tersebut dilakukan untuk meminimalisir imbas buruk atau kerugian yang mungkin terjadi setelah dipilihnya suatu opsi sebagai pilihan yang akan dilakukan. Dalam *Rational Choice Theory* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison, *consequences* (konsekuensi) adalah merupakan hasil yang akan terjadi untuk setiap opsi atau alternatif yang telah dipilih.²³⁵

Merujuk pada sub-bab sebelumnya yang telah menjelaskan tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dukungan Korea Selatan terhadap prospek reunifikasi dua Korea, maka dapat disimpulkan bahwa opsi untuk mendukung upaya reunifikasi Korea memiliki cukup banyak konsekuensi. Konsekuensi ini berkaitan dengan berbagai hal yang harus dihadapi oleh Korea Selatan apabila pemerintahnya memang memutuskan untuk mendukung reunifikasi dua Korea. **Konsekuensi yang pertama** adalah mendapatkan respon negatif baik dari pihak

²³⁴ Graham T. Allison, *Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown and Company, 1971), h. 29-30.

²³⁵ Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 63 Issue 3 (1969), h. 694.

Korea Utara maupun dari penduduk Korea Selatan yang tidak menyukai dan tidak mendukung prospek reunifikasi dua Korea.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika masa pemerintahan Moon Jae In dimulai pada tahun 2017, baik dari pihak Korea Utara maupun penduduk asli Korea Selatan menunjukkan keengganan dan ketidaksukaan mereka terhadap prospek reunifikasi dua Korea. Menurut survei yang diterbitkan tahun 2017 oleh *Korea Institute for National Unification*, yang didanai langsung oleh pemerintah Korea Selatan, hanya ada sekitar 57,8 persen dari keseluruhan responden (yang merupakan penduduk Korea Selatan) yang menganggap reunifikasi dua Korea itu perlu dilakukan. Angka tersebut turun cukup jauh bila dibandingkan dengan angka 69,3 persen yang pernah di dapat pada survei yang sama pada tahun 2014.²³⁶

Di sisi lain, pihak Korea Utara juga dengan jelas menunjukkan ketidaksukaanya terhadap prospek reunifikasi dua Korea. Pihak Korea Utara sempat menyebut impian reunifikasi dari presiden sebelum Moon Jae In, yaitu Park Geun Hye, sebagai hanya sebuah “Mimpi di siang bolong dari seseorang yang gila”.²³⁷ Korea Utara juga menunjukkan respon negatifnya terhadap upaya reunifikasi dua Korea dengan meminta Korea Selatan untuk membubarkan komite persiapan reunifikasi dua Korea, yang pernah dibuat pada masa pemerintahan Park Geun Hye, segera setelah Moon Jae In mulai menjabat pada Mei 2017.²³⁸

²³⁶ John Power dan Michael Holtz, “Reunification? Many young South Koreans say, 'Let's not.'”, dalam <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2018/0503/Reunification-Many-young-South-Koreans-say-Let-s-not>. [Diakses 25 Januari 2021]

²³⁷ Ruslan Burhani, “Korut damprat tawaran reunifikasi sebagai "mimpi orang gila"”, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/429074/korut-damprat-tawaran-reunifikasi-sebagai-mimpi-orang-gila>. [Diakses 25 Januari 2021]

²³⁸ No Name, “DPRK urges S. Korea to abolish preparatory committee for reunification”, dalam http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/29/c_136324451.htm. [Diakses 25 Januari 2021]

Konsekuensi yang kedua adalah pemerintah Korea Selatan harus bersiap menghadapi hambatan untuk menyatukan ideologi dan sistem politik dua Korea yang sangat jauh berbeda, jika memang negaranya memutuskan untuk mendukung prospek penyatuan kembali dua Korea dalam satu sistem pemerintahan tunggal. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki perbedaan yang cukup kontras dalam hal ideologi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kedua belah pihak untuk melakukan reunifikasi.²³⁹

Akan sulit bagi pihak Korea Utara yang berideologikan komunis untuk menerima dan menerapkan ideologi liberal di negaranya, pun sebaliknya bagi pihak Korea Selatan.²⁴⁰ Korea Selatan yang memiliki sistem politik demokratis dan bebas bergerak tentunya juga tidak akan menikmati berkubang di bawah sistem totalitarianisme milik Korea Utara apabila reunifikasi benar terjadi.²⁴¹

Konsekuensi yang ketiga adalah Korea Selatan yang merupakan negara yang lebih makmur dibandingkan Korea Utara akan berpotensi harus menanggung beban ekonomi yang jauh lebih berat apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea.

Reunifikasi Jerman Barat dan Timur dapat dijadikan contoh nyata dari kasus penyatuan kembali dua negara yang memakan biaya sangat besar. Dalam upaya reunifikasi dua Jerman, pemerintah federal Jerman bahkan diperkirakan harus mentransfer dana dari Jerman bagian barat ke Jerman bagian timur hingga sekitar

²³⁹ Faula Mahalika, “Dinamika Reunifikasi Semenanjung Korea”, dalam <http://www.pskp.or.id/2020/08/06/dinamika-reunifikasi-semenanjung-korea/>. [Diakses 26 Januari 2021]

²⁴⁰ Deby Liviamanda, “Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi Korea”, dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58875/Deby%20Liviamanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Diakses 26 Januari 2021]

²⁴¹ Charlie Campbell, “What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome”, dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 26 Januari 2021]

1,3 triliun euro untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di wilayah bekas Jerman Timur.²⁴² Tetapi tercapainya reunifikasi Jerman dengan pengeluaran dana yang sangat besar itu sebenarnya tidak benar-benar bisa dibandingkan dengan prospek reunifikasi dua Korea. Permasalahannya terletak pada tingkat ketimpangan ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sangat jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan ketimpangan ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur.

Jika Jerman Barat dan Jerman Timur yang memiliki ketimpangan ekonomi tidak terlalu jauh saja membutuhkan lebih dari 1 triliun euro untuk mendukung upaya reunifikasi negaranya, maka dua Korea yang memiliki perbandingan ketimpangan ekonomi yang lebih besar tentunya akan membutuhkan lebih banyak biaya lagi untuk mendukung prospek reunifikasi kedua negaranya. Menurut Dr. Leonid Petrov seorang pakar Korea Utara dan juga *visiting researcher* di *Australian National University's College of Asia and the Pacific*, reunifikasi dua Korea bahkan setidaknya diperkirakan akan menelan biaya sekitar 10 triliun dolar (USD).²⁴³ Korea Selatan yang jauh lebih makmur dari Korea Utara tentunya akan lebih dibebankan dalam perihal menanggung biaya reunifikasi yang sangat besar tersebut.

Konsekuensi yang keempat adalah Korea Selatan berpotensi dapat memperburuk hubungan antar-Korea dan hanya akan menambah beban negaranya apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua

²⁴² Reuters Staff, "Study shows high cost of German reunification: report", dalam <https://www.reuters.com/article/us-germany-wall-idUSTRE5A613B20091107>. [Diakses 28 Januari 2021]

²⁴³ Frank Chung, "North Korean reunification could cost \$10 trillion", dalam <https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/north-korean-reunification-could-cost-10-trillion/news-story/e6fc62c5b29b45085eb4e64fdd43235d>. {Diakses 28 Januari 2021}

Korea. Pada pemerintahan Moon Jae In, hubungan dua Korea mengalami pasang surut yang sangat signifikan. Pada tahun 2018, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mengalami peningkatan pesat dengan diselenggarakannya 3 kali pertemuan *Inter-Korean Summit*, serta ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom dan *Pyongyang Joint Declaration* oleh kedua negara. Tetapi hubungan dua Korea kembali mencapai titik terendah pada tahun 2020 setelah Korea Utara memutuskan untuk meledakkan Kantor Penghubung Antar-Korea di Kaesong pada 14 Juni 2020.²⁴⁴

Pasang surut hubungan kedua Korea yang sering mengalami perubahan secara tiba-tiba dan sulit diprediksi tersebut membuat pemerintah kedua Korea bahkan kesulitan untuk hanya sekedar mewujudkan koeksistensi damai di antara kedua negara. Jika koeksistensi damai saja sulit untuk diwujudkan, maka mewujudkan prospek reunifikasi kedua Korea tentunya akan jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu, Korea Selatan hanya akan menambah beban negaranya jika memang pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea, daripada hanya sekedar berusaha untuk mewujudkan koeksistensi damai antara kedua negara.

Hubungan kedua Korea yang mengalami penurunan pada tahun ke-2 dan ke-3 masa pemerintahan Moon Jae In pun juga berpotensi dapat semakin memburuk apabila Korea Selatan memaksakan untuk mengupayakan reunifikasi. Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat ketidaksukaan yang dengan jelas pernah ditunjukkan oleh Korea Utara terhadap upaya reunifikasi Korea Selatan yang

²⁴⁴ Neha Banka, "Explained: North Korea-South Korea relations, two years after Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-southkorea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/>. [Diakses 28 Januari 2021]

sempat coba dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. **Konsekuensi yang kelima adalah** Korea Selatan harus menghadapi kemungkinan adanya imbas buruk dari pihak sekutu masing-masing Korea apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea.

Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Korea Selatan dengan jelas menyatakan bahwa negaranya akan mendukung reunifikasi dua Korea, asalkan reunifikasi tersebut dilakukan secara damai dan dengan persyaratan denuklirisasi penuh Korea Utara. Hal ini dikarenakan tercapainya denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea merupakan tujuan utama Amerika Serikat.²⁴⁵ Sayangnya, Korea Utara dan Amerika Serikat tidak sependapat dalam perihal denuklirisasi dan Korea Utara pun dengan tegas menolak untuk menyerahkan senjata nuklirnya, apalagi sebelum Amerika Serikat juga turut memutuskan untuk menyerahkan senjata nuklir negaranya.²⁴⁶

Oleh sebab itu, apabila Korea Selatan memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi Korea, maka kemungkinan Amerika Serikat akan semakin mendesak Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi sebelum upaya reunifikasi dua Korea dilakukan. Hal tersebut tentunya dapat berimbas tidak baik terhadap hubungan antar-Korea maupun hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Di sisi lain, China yang merupakan sekutu utama Korea Utara kemungkinan tidak akan terlalu senang dengan tercapainya prospek reunifikasi dua Korea. Pasalnya,

²⁴⁵ Oren Dorell, "U.S. would support reunified Korean Peninsula — without nukes, State Department says", dalam <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/01/25/u-s-would-support-reunification-korean-peninsulnorth-koreas-call-reunification-could-line-u-s-policy/1067341001/>. [Diakses 28 Januari 2021]

²⁴⁶ Min Joo Kim, "North Korea rejects denuclearization unless U.S. 'nuclear threat' is eliminated", dalam https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-korea-rejects-denuclearization-unless-us-nuclear-threat-is-eliminated/2018/12/20/fcf642a2-0438-11e9-b5df-5d3874f1ac36_story.html. [Diakses 28 Januari 2021]

Korea Utara selama ini masih dianggap oleh China sebagai penyangga penting negaranya dari gangguan militer AS-Korsel.

Oleh sebab itu, jika reunifikasi dua Korea berhasil diwujudkan, maka China akan mengkhawatirkan kemungkinan Bergeraknya dan ditempatkannya pasukan AS di sekitar perbatasan negaranya dengan Korea setelah tercapainya reunifikasi.²⁴⁷ Dengan adanya upaya reunifikasi, pertanyaan dan argumen tentang mengapa pasukan Amerika Serikat masih perlu berada di Semenanjung Korea padahal rezim perdamaian juga sudah tercapai di Korea Utara (setelah adanya upaya reunifikasi) akan dinaikkan atau muncul dari berbagai pihak.

Hal ini dikarenakan ancaman Korea Utara merupakan alasan besar mengapa Amerika Serikat mempertahankan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan. Sehingga apabila upaya reunifikasi kedua Korea dilakukan, maka sebenarnya argumen untuk keberlanjutan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea telah hilang karena tidak adanya lagi ancaman Korea Utara. Menurut Christopher Green, seorang ahli dan peneliti Semenanjung Korea untuk *International Crisis Group*, keadaan tersebut akan sangat menciptakan ketidakstabilan politik bagi Korea Selatan.²⁴⁸ Penyebabnya adalah karena Korea Selatan berpotensi akan kehilangan sebagian kekuatannya dengan kepergian pasukan negara sekutunya dari Semenanjung Korea.

China yang mengkhawatirkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di sekitar perbatasan negaranya tentunya akan mendukung argumen yang

²⁴⁷ Bonnie S. Glaser dan Yun Sun, "Chinese Attitudes toward Korean Unification", dalam *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol. 24 No. 2 (2015), h. 80.

²⁴⁸ Charlie Campbell, "What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome", dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 22 Januari 2021]

mempertanyakan tentang alasan keberadaan pasukan Amerika Serikat setelah tercapainya rezim damai di Korea karena adanya upaya reunifikasi. Dengan hilangnya argumen yang menjadi alasan utama keberadaan pasukan AS di Korea Selatan karena anggapan bahwa ancaman Korea Utara telah dinetralkan dengan adanya upaya reunifikasi, maka China berpotensi untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pengaruh regional negaranya di Asia Timur dengan mengorbankan Amerika Serikat.²⁴⁹ Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pilihan pemerintah Korea Selatan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea dapat berimbas buruk bukan hanya pada negaranya saja, tetapi juga pada sekutu utamanya yaitu Amerika Serikat.

Dari penjabaran di atas maka bisa disimpulkan bahwa opsi pemerintah Korea Selatan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea memiliki banyak konsekuensi yang berpotensi dapat merugikan Korea Selatan di masa depan. Oleh karena itu, setelah berbagai pertimbangan konsekuensi, maka **opsi yang dipilih oleh pemerintah Korea Selatan adalah opsi untuk sekedar mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea saja**. Opsi untuk mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea bisa dianggap sebagai pilihan terbaik karena opsi tersebut dapat dijalankan dengan hanya sekedar memperbaiki hubungan di antara dua Korea dan meningkatkan kerja sama di antara kedua negara saja.

Oleh sebab itu, opsi untuk mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea merupakan opsi yang tidak memerlukan pengorbanan yang besar ataupun memiliki resiko yang besar bila dibandingkan dengan opsi untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea. Opsi untuk mendukung koeksistensi damai di antara

²⁴⁹ *ibid.*,

dua Korea yang telah dipilih setelah pertimbangan berbagai konsekuensi tersebut merupakan bagian dari komponen terakhir *Rational Choice Theory*, yaitu komponen **pilihan** (*choice*). Komponen pilihan (*choice*) dalam *Rational Choice Theory* berkaitan dengan pilihan yang telah diputuskan untuk dijalankan karena dianggap sebagai pilihan rasional yang paling mampu untuk meminimalisir kerugian.

Selain lebih mampu untuk meminimalisir kerugian dibandingkan pilihan reunifikasi, pilihan untuk lebih berfokus mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea juga sudah pernah terbukti lebih efektif dalam menjaga atau meningkatkan hubungan baik antara dua Korea. Contohnya adalah ketika pada masa pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun yang kebijakannya sama-sama menjunjung *peaceful co-existence*, hubungan kedua Korea pada saat itu sempat naik drastis. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea bahkan sama-sama berhasil dilaksanakan baik itu pada masa pemerintahan Kim Dae Jung ataupun pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun.

Pilihan pemerintah Korea Selatan untuk akhirnya lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi kedua negara tersebut, sesuai dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Moon Jae In di *Körber Foundation*. Moon Jae In dalam pidatonya menyatakan bahwa dalam pemerintahannya, unifikasi yang ingin dicapai dengan Korea Utara memiliki arti sebagai suatu proses dimana kedua belah pihak dapat berkoeksistensi dengan damai dan dapat mencapai kesejahteraan bersama. Moon Jae In menegaskan bahwa Korea Selatan tidak memiliki niat untuk melakukan reunifikasi dengan Korea Utara, dalam artian melakukannya dengan cara unifikasi melalui absorpsi. Moon Jae In

juga menyatakan bahwa reunifikasi mungkin saja bisa tercapai di masa depan, tetapi pemerintahannya sekarang hanya akan berfokus pada perdamaian dua Korea saja.²⁵⁰

Pilihan pemerintah Korea Selatan untuk lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya pun kemudian diaplikasikan dalam kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In. Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In memiliki banyak poin yang dimaksudkan untuk mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea. Tetapi, salah satu bagian dari kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In yang memang terlihat lebih condong mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya, terletak pada prinsip *spirit of 'mutual respect'* yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut.

Dalam laman *Ministry Of Unification* (2017), dijelaskan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip *spirit of 'mutual respect'* adalah Korea Selatan akan menghormati Korea Utara dengan pendirian mereka yang disebut dengan “3-Nos”/”3-Tidak”. “3-Nos”/”3-Tidak” diantaranya adalah tidak menginginkan runtuhnya rezim Utara, tidak akan melakukan unifikasi melalui absorpsi (reunifikasi), dan tidak akan mengejar unifikasi melalui cara-cara yang artifisial.²⁵¹ Selain itu, untuk mendukung koeksistensi damai di antara kedua Korea, pemerintah Korea Selatan juga mengupayakannya melalui penyelenggaraan *Inter-Korean*

²⁵⁰ No Name, “Speech at the invitation of the Koerber Foundation”, dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 28 Januari 2021]

²⁵¹ Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/goals/ [Diakses 28 Januari 2021]

Summit pada tahun 2018, serta penandatanganan Deklarasi Panmunjom dan *Pyongyang Joint Declaration* dengan pihak Korea Utara. *Inter-Korean Summit* 2018, Deklarasi Panmunjom, dan *Pyongyang Joint Declaration* dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antar-Korea dalam berbagai bidang, meningkatkan hubungan baik antar-Korea, dan menjaga stabilitas perdamaian di Semenanjung Korea.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In yang cenderung lebih mendukung koeksistensi damai antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya, bisa dipengaruhi oleh pertimbangan Korea Selatan akan berbagai faktor. Pertimbangan faktor-faktor tersebut berkaitan dengan konsekuensi yang kemungkinan harus dihadapi oleh Korea Selatan terkait dengan pilihannya untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea, atau hanya sekedar mendukung koeksistensi damai di antara keduanya saja.

Sebagaimana dengan *Rational Choice Theory* yang digunakan dalam penelitian ini, maka Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae In diasumsikan sebagai seorang aktor rasional yang akan memilih pilihan terbaik di antara pilihan yang ada dalam membuat kebijakan negaranya. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir kerugian yang mungkin akan ditanggung negaranya di masa depan. Dalam proses menentukan mana pilihan yang terbaik, suatu negara dapat melakukannya dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap opsi yang ada.

Dari analisis menggunakan *Rational Choice Theory* yang telah dilakukan di atas, dapat diidentifikasi bahwa pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan, resolusi nuklir Korea Utara dengan membentuk perdamaian yang permanen, serta realisasi ekonomi baru di Semenanjung Korea merupakan komponen sasaran dalam kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In. Dari

komponen sasaran tersebut, kemudian dapat diidentifikasi tujuan utama dari kebijakan Semenanjung Korea pemerintahan Moon Jae In adalah untuk menjaga stabilitas perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Semenanjung Korea.

Seperti pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Moon Jae In juga dihadapi oleh dua opsi untuk mencapai tujuannya dalam menjaga stabilitas perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Semenanjung Korea. Dua opsi tersebut adalah untuk mendukung upaya reunifikasi dua Korea atau untuk sekedar mendukung upaya koeksistensi damai di antara keduanya saja. Dari analisis yang telah dilakukan di atas, didapatkan hasil bahwa keputusan pemerintah Korea Selatan untuk mendukung upaya reunifikasi dua Korea memiliki cukup banyak konsekuensi.

Konsekuensi yang pertama adalah mendapatkan respon negatif baik dari pihak Korea Utara maupun dari penduduk Korea Selatan yang tidak menyukai dan tidak mendukung prospek reunifikasi dua Korea. Konsekuensi yang kedua, pemerintah Korea Selatan harus bersiap menghadapi hambatan untuk menyatukan ideologi dan sistem politik dua Korea yang sangat jauh berbeda, jika memang negaranya memutuskan untuk mendukung prospek penyatuan kembali dua Korea dalam satu sistem pemerintahan tunggal. Konsekuensi yang ketiga, Korea Selatan yang merupakan negara yang lebih makmur dibandingkan Korea Utara berpotensi harus menanggung beban ekonomi yang jauh lebih berat apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea.

Selanjutnya, konsekuensi yang keempat adalah Korea Selatan berpotensi dapat memperburuk hubungan antar-Korea dan hanya akan menambah beban negaranya apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek

reunifikasi dua Korea. Konsekuensi yang kelima atau yang terakhir, Korea Selatan harus menghadapi kemungkinan adanya imbas buruk dari pihak sekutu masing-masing Korea apabila pemerintahnya memutuskan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa opsi pemerintah Korea Selatan untuk mendukung prospek reunifikasi dua Korea memiliki banyak konsekuensi yang berpotensi dapat merugikan Korea Selatan di masa depan.

Oleh karena itu, maka opsi yang dipilih oleh pemerintah Korea Selatan adalah opsi untuk sekedar mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea saja. Opsi untuk mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea bisa dianggap sebagai pilihan terbaik karena opsi tersebut dapat dijalankan dengan hanya sekedar memperbaiki hubungan di antara dua Korea dan meningkatkan kerja sama di antara kedua negara saja. Pilihan pemerintah Korea Selatan untuk lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea kemudian diaplikasikan dalam kebijakan luar negerinya yaitu Kebijakan Semenanjung Korea Moon Jae In, penyelenggaraan *Inter-Korean Summit* 2018, serta penandatanganan Deklarasi Panmunjom dan *Pyongyang Joint Declaration* dengan pihak Korea Utara.

Dari analisis yang telah dilakukan dengan *Rational Choice Theory*, maka rumusan masalah dari penelitian ini pun dapat terjawab. Alasan mengapa kebijakan pada masa pemerintahan Moon Jae In cenderung lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya adalah karena mendukung prospek reunifikasi dua Korea berpotensi memiliki lebih banyak konsekuensi yang dapat merugikan Korea Selatan, bila dibandingkan dengan hanya sekedar untuk mendukung koeksistensi damai di antara kedua Korea saja.

B. Saran

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan juga masih meninggalkan banyak variabel lain yang belum dibahas secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu maupun karena keterbatasan lain dari diri penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik ataupun menggunakan objek yang sama agar melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai variabel lain yang belum dibahas, sehingga kemudian dapat melengkapi hasil dari penelitian ini. Penulis juga menyarankan bagi peneliti lain untuk menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian ini, serta lebih memperbanyak lagi sumber-sumber atau referensi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Hal tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan keakuratan dan juga menambah pengetahuan baru yang dapat dituangkan dalam hasil penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Allison, Graham T., *Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company, 1971.
- Association of Korean History Teachers, *A Korean History for International Readers: What Do Koreans Talk about Their Own History and Culture?*. Seoul: Humanist, 2010.
- Bakry, Umar S., *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bakry, Umar S., *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Kamasa, Frassminggi, *Perang Korea: Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea Dalam Perang yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Narasi, 2016.
- Korean Overseas Information Service, *A Handbook of Korea*. Seoul: Samhwa Printing Co. Ltd., 1990.
- Lee, Ki Baik, *A New History of Korea*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Mas'ood, Mohtar dan Yang Seung Yoon, *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Saputra, Andi Rafael, *Dari Kim Jong-Il Hingga Kim Jong-Un*. Yogyakarta: Palapa, 2014.
- Yang, Seung Yoon, *Spirit Budaya & Politik Korea*. Jakarta: Kosa Kata Kita, 2016.

Jurnal Ilmiah & Majalah Berkala

- Allison, Graham T., "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis", *The American Political Science Review*, Vol. 63 Issue 3 (1969).
- de Bear, Adam, "From Sunshine To Storm Clouds: An Examination of South Korea's Policy on North Korea", *Michigan State International Law Review*, Vol. 23 No. 3 (2015).
- Glaser, Bonnie S., dan Yun Sun, "Chinese Attitudes toward Korean Unification", dalam *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol. 24 No. 2 (2015).

Nadhiva, Faizah, Anggia Utami Dewi dan Dadan Suryadipura, "Reorientation of the Republic of Korea's Foreign Policy towards the Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)", *Global Strategis*, Th. 13 No. 2 (2019).

Park, Young Ho, "South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations", *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, Vol. 21 (2014).

Fawaati, Syinthia, "Indonesian Defense Diplomacy On The Cooperation Between Indonesian Ministry Of Defense Of The Republic Of Indonesia and United States Defense Institutional Reform Initiatives", *Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan*, Vol. 3 No. 1 (2017).

Kartini, Indriana, "Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15 No. 1 (2018).

Mosler, Hannes B., "President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea", *Asia PolicyBrief*, edisi Juni 2017 (2017).

Strnad, Grażyna, "The Sixth Republic Under Roh Tae Woo: The Genesis of South Korean Democracy", *Polish Political Science*, Vol. 39 (2010).

Sulistyo, Ponco Budi, "Sifat-Sifat Penelitian", *Metode Penelitian Kualitatif* (2017).

Umarama, Fahrin, Michael Mamentu, dan Trilke E. Tulung, "Prospek Penyelesaian Konflik Korea Selatan dan Korea Utara", *Jurnal Politico*, Vol. 7 No. 4 (2018).

Media Online & Berita

Astuti, Lutfi Dwi Puji, dan Dinia Adrianjara, "Mengenal Juche, Ideologi Negara Terisolir Korea Utara", dalam <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1213083-mengenal-juche-ideologi-negara-terisolir-korea-utara>. [Diakses 23 Januari 2021]

Bachtiar, Absal, "Bagaimana Kekalahan Jepang Menjadi Penentu Berhentinya Perang Dunia Kedua?", dalam <https://kumparan.com/absal-bachtiar/bagaimana-kekalahan-jepang-menjadi-penentu-berhentinya-perang-dunia-kedua->. [Diakses 01 Januari 2021]

Banka, Neha, "Explained: North Korea-South Korea relations, two years after Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-south->

korea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/. [Diakses 12 Januari 2021]

Beard, Stephen, “Itemizing Germany’s \$2 trillion bill for reunification”, dalam <https://www.marketplace.org/2019/11/05/itemizing-germanys-2-trillion-bill-for-reunification/>. [Diakses 24 Januari 2021]

Burhani, Ruslan, “Korut damprat tawaran reunifikasi sebagai "mimpi orang gila"”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/429074/korut-damprat-tawaran-reunifikasi-sebagai-mimpi-orang-gila>. [Diakses 22 Januari 2021]

Campbell, Charlie, “What Would Korean Reunification Look Like? Five Glaring Problems to Overcome”, dalam <https://time.com/5255381/north-south-korea-kim-jong-un-reunification/>. [Diakses 22 Januari 2021]

Chan, Melissa, “What Would It Take to Unify Korea? Germany Offers Lessons”, dalam <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/11/german-reunification-offers-lessons-korea/601297/>. [Diakses 24 Januari 2021]

Choi, He Suk, “[2018 Inter-Korean summit] Panmunjeom Declaration summary”, dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180427000797>. [Diakses 10 Januari 2021]

Chung, Frank, “North Korean reunification could cost \$10 trillion”, dalam <https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/north-korean-reunification-could-cost-10-trillion/news-story/e6fc62c5b29b45085eb4e64fdd43235d>. [Diakses 24 Januari 2021]

Cole, Brendan, “North and South Korean Leaders Embrace Each Other as Korean Summit Begins, Denuclearization and Improved Ties Most Critical Issues”, dalam <https://www.newsweek.com/north-and-south-korean-leaders-embrace-each-other-korean-summit-begins-1125645>. [Diakses 12 Januari 2021]

Dewanto, Erlangga, “Olimpiade Musim Dingin: Korea Utara - Selatan Bikin Tim Gabungan”, dalam <https://sport.tempo.co/read/1053724/olimpiade-musim-dingin-korea-utara-selatan-bikin-tim-gabungan/full&view=ok>. [Diakses 02 Januari 2021]

Dorell, Oren, “U.S. would support reunified Korean Peninsula — without nukes, State Department says”, dalam <https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/01/25/u-s-would-support-reunification-korean-peninsula-north-koreas-call-reunification-could-line-u-s-policy/1067341001/>. [Diakses 24 Januari 2021]

Dudden, Alexis, Joan E. Cho, dan Mary Alice Haddad, “The goal in Korea should be peace and trade — not unification”, dalam <https://theconversation.com/the-goal-in-korea-should-be-peace-and-trade-not-unification-95701>. [Diakses 22 Januari 2021]

- Fathimatuzzahrah, Dessy, "Studi Tentang Pemerintahan Presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan Tahun 1998-2003", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/241758-none-2baa3780.pdf>. [Diakses 16 Desember 2020]
- Fifield, Anna, dan Ashley Parker, "North Korea's Kim Jong Un invites South Korea's president to Pyongyang", dalam https://www.washingtonpost.com/world/north-koreas-kim-jong-un-has-invited-south-koreas-moon-jae-in-to-pyongyang/2018/02/10/d7db9dde-0ddd-11e8-998c-96deb18cca19_story.html. [Diakses 12 Januari 2021]
- Hanafiaty, Nurul, "Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara.", dalam <http://repository.unair.ac.id/87738/5/Nurul%20Hanafiaty.pdf>. [Diakses 22 Agustus 2020]
- Harding, Jillian, "Reuniting North Korea and South Korea could cost trillions of dollars", dalam <https://www.cbsnews.com/news/reuniting-north-korea-and-south-korea-could-cost-trillions-investment/>. [Diakses 24 Januari 2021]
- Hayati, Rina, "Pengertian Penelitian Kualitatif, Macam, Ciri, dan Cara Menuliskannya", dalam <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kualitatif/>. [Diakses 5 Oktober 2020].
- Indriani, Dita Feby, "Sejarah Kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang Terlengkap", dalam <https://sejarahlengkap.com/dunia/negara/sejarah-kemerdekaan-korea-selatan>. [Diakses 26 Desember 2020]
- Ingber, Sasha, "North And South Korea Dismantle Loudspeakers Blaring Propaganda On The DMZ", dalam <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/01/607399907/north-and-south-korea-dismantle-loudspeakers-blaring-propaganda-on-the-dmz>. [Diakses 10 Januari 2021]
- Johnson, Jesse, "South Korean President Moon Jae-in to dispatch special envoy to North Korea next week", dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/31/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/south-korean-president-moon-jae-dispatch-special-envoy-north-korea-next-week/>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Kim, Ji Eun, "[News analysis] Moon and Kim reaffirm commitment to Panmunjeom Declaration", dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/846575.html. [Diakses 10 Januari 2021]

- Kim, Jiyeon, Kildong Kim, dan Chungku Kang, “South Korean Youths’ Perceptions of North Korea and Unification”, dalam <http://en.asaninst.org/contents/43527/>. [Diakses 24 Januari 2021]
- Kim, Jung Eun, dan Theresa Waldrop, “North and South Korean Leaders Hold Surprise Meeting”, dalam <https://edition.cnn.com/2018/05/26/politics/north-and-south-korean-leaders-meet-again/index.html>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Kim, Min Joo, “North Korea rejects denuclearization unless U.S. ‘nuclear threat’ is eliminated”, dalam https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-korea-rejects-denuclearization-unless-us-nuclear-threat-is-eliminated/2018/12/20/fcf642a2-0438-11e9-b5df-5d3874f1ac36_story.html. [Diakses 25 Januari 2021]
- Kim, Rahn, “Seoul seeks Moon-Kim joint press conference after April 27 summit”, dalam https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/04/103_247427.html. [Diakses 10 Januari 2021]
- Kim, Yong Jick, “The Nordpolitik as President Rho Tae Woo's New Foreign Policy, 1988-1992”, dalam http://www.ekaas.org/lib/common/download.php?fpath=/data/bbs/kjas_board/. [Diakses 20 Februari 2021]
- Ko, Dong Hwan, “South Korea Seeks to Hold Inter-Korean Summit Sept. 18-20: reports”, dalam https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103_254994.html. [Diakses 12 Januari 2021]
- Laksamana, Nugyasa, “Korea Selatan-Korea Utara Bersatu dalam Defile Olimpiade Musim Dingin”, dalam <https://olahraga.kompas.com/read/2018/02/09/20212431/korea-selatan-korea-utara-bersatu-dalam-defile-olimpiade-musim-dingin>. [Diakses 02 Januari 2021]
- Larasati, Aziza Fanny, “Ini Alasan Mengapa Perang Korea Tak Pernah Berakhir hingga Saat Ini.”, dalam <https://www.matamatapolitik.com/historical-ini-alasan-mengapa-perang-korea-tak-pernah-berakhir-hingga-saat-ini/>. [Diakses 1 Oktober 2020].
- Lee, Chul Jae, “North Korean leader to visit South for first time”, dalam <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3045322>. [Diakses 10 Januari 2021]

- Lee, Dong Hyuk, “4 Things You Should Know About the Inter-Korean Summit”, dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/4-things-you-should-know-about-inter-korean-summit>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Lee, Jeong Ho “Moon gets ‘standing ovation’ after first ever speech by South Korean leader to North Koreans”, dalam <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2164932/moon-gets-standing-ovation-after-first-ever-speech-south-korean>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Lee, Kwang Rin, “Korea Under Japanese Rule, The March First Movement”, dalam <https://www.britannica.com/place/Korea/Korea-under-Japanese-rule>. [Diakses 26 Desember 2020]
- Lee, Wooyoung, “North, South Korea to halt military drills in border area”, dalam https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/09/19/North-South-Korea-to-halt-military-drills-in-border-area/5211537339644/. [Diakses 14 Januari 2021]
- Lee, Yuhan, “Sistem Pemerintahan Korea Selatan”, dalam <https://www.kompasiana.com/leeyuhan/5dac8eff0d8230569a1f9bc4/sistem-pemerintahan-korea-selatan>. [Diakses 22 Januari 2021]
- Lei, Cui, “Why It’s Nearly Impossible to Denuclearize North Korea”, dalam <https://thediplomat.com/2018/06/why-its-nearly-impossible-to-denuclearize-north-korea/>. [Diakses 24 Januari 2021]
- Liviamanda, Deby, “Keputusan Korea Utara Membatalkan Upaya Reunifikasi Korea”, dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58875/Deby%20Liviamanda.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Diakses 22 Januari 2021]
- Ma, Alexandra, “Kim Jong Un’s historic peace talks were broadcast everywhere except North Korea — here’s why he keeps his people in the dark”, dalam <https://www.businessinsider.nl/why-inter-korean-summit-was-broadcast-live-everywhere-but-north-korea-2018-4/?international=true&r=UK>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Mahalika, Faula, “Dinamika Reunifikasi Semenanjung Korea”, dalam <http://www.pskp.or.id/2020/08/06/dinamika-reunifikasi-semenanjung-korea/>. [Diakses 22 Januari 2021]
- Mahdiya, Vira, “Kekurangan dan Kelebihan Ideologi Liberalisme”, dalam <https://cerdika.com/kelebihan-dan-kekurangan-ideologi-liberalisme/>. [Diakses 22 Januari 2021]

- Miller, Steve, “North-South Korea Summit Set for Mid-September”, dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/north-south-korea-summit-set-mid-september>. [Diakses 12 Januari 2021]
- Millet, Allan R., “Revolution, Division, And Partisan Warfare, 1945–50”, dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 28 Desember 2020]
- Millet, Allan R., “Invasion and Counterinvasion, 1950-51 (To the negotiating table)”, dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 06 Januari 2021]
- Millet, Allan R., “Korean War: Introduction”, dalam <https://www.britannica.com/event/Korean-War>. [Diakses 06 Januari 2021]
- Min, Jesse, “The Sunshine Policy of South Korea”, dalam <http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/>. [Diakses 26 Februari 2021]
- Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/strategies/ [Diakses 22 Agustus 2020].
- Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/gosals/ [Diakses 03 Oktober 2020]
- Ministry of Unification, “Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula”, dalam https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/principles/ [Diakses 03 Oktober 2020]
- Ministry of Unification, “Trust-Building Process on the Korean Peninsula”, dalam https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_process.pdf. [Diakses 23 Februari 2021]
- No Name, “Speech at the invitation of the Koerber Foundation”, dalam <http://www1.president.go.kr/articles/57> [Diakses 20 Agustus 2020].
- No Name, “Dresden Initiative for peaceful unification on the Korean peninsula”, dalam <http://world.kbs.co.kr/special/kdivision/english/tasks/dresden.htm>. [Diakses 22 Agustus 2020].
- No Name, “North Korea's Kim Jong-un pledges 'new history' with South Korea”, dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-43914208>. [Diakses 10 Januari 2021]
- No Name, “Pyongyang Joint Declaration of September 2018”, dalam <https://www.ncnk.org/node/1633>. [Diakses 10 Januari 2021]

- No Name, “Korea Under Japanese Rule”, dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 25 Desember 2020]
- No Name, “Full address by South Korean President Moon Jae In on May 26 inter-Korea summit”, dalam <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/full-address-by-south-korean-president-moon-jae-in-on-may-26-inter-korea-summit>. [Diakses 11 Januari 2021]
- No Name, “Intervensi China dan Perlawanan Pasukan PBB”, dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/625/war_panorama_i.html?lang=i#warEnterModal03. [Diakses 06 Januari 2021]
- No Name, “Japan’s Annexation of Korea”, dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 25 Desember 2020]
- No Name, “Japanese Rule Begins”, dalam <https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-koreas/>. [Diakses 26 Desember 2020]
- No Name, “North and South Korea set date for historic summit”, dalam <https://www.abc.net.au/news/2018-03-29/north-and-south-korea-set-date-for-summit-between-leaders/9603274>. [Diakses 10 Januari 2021]
- No Name, “Kim, Moon Visit Mount Paektu as Summit Wraps”, dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/kim-moon-visit-mount-paektu-summit-wraps>. [Diakses 14 Januari 2021]
- No Name, “Proses Pelaksanaan Pertemuan puncak antar-Korea tahun 2007”, dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i. [Diakses 8 Desember 2020]
- No Name, “DPRK urges S. Korea to abolish preparatory committee for reunification”, dalam http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/29/c_136324451.htm. [Diakses 16 Januari 2021]
- No Name, “Sejarah dan Dinamika Hubungan Korea Selatan & Korea Utara”, dalam <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/30066/4.%20Bab-%20ii.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. [Diakses 28 Desember 2020]
- No Name, “S. Korea launches presidential preparatory committee for reunification with DPRK”, dalam <https://www.globaltimes.cn/content/870647.shtml>. [Diakses 23 Januari 2021]
- No Name, “Perbedaan Tujuan dan Sasaran”, dalam <https://www.scribd.com/document/358859065/Perbedaan-Tujuan-Dan-Sasaran>. [Diakses 25 Januari 2021]

- No Name, “Penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata”, dalam http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/625/war_panorama_i.html?lang=i#warSignModal. [Diakses 06 Januari 2021]
- No Name, ”KTT antar-Korea yang pertama di tahun 2000.”, dalam http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=&id=&board_seq=339274. [Diakses 16 Desember 2020]
- No Name, “Panmunjom Declaration: The Key Points”, dalam <https://www.dhakatribune.com/world/asia/2018/04/27/panmunjom-declaration-key-points/>. [Diakses 13 Januari 2021]
- No Name, “North, South Korea meet for surprise second summit”, dalam https://www.syracuse.com/politics/2018/05/north_south_korea_meet_for_surprise_second_summit.html. [Diakses pada 14 Januari 2021]
- No Name, “The Berlin Initiative for peace on the Korean Peninsula”, dalam <http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view;jsessionid=S0ITaDJdJZ-IROcYLDg95I9x.node20?subId=686&affairId=750&articleId=40441> [Diakses 22 Agustus 2020].
- Power, John, dan Michael Holtz, “Reunification? Many young South Koreans say, 'Let's not.'”, dalam <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2018/0503/Reunification-Many-young-South-Koreans-say-Let-s-not>. [Diakses 20 Januari 2021]
- Ramadhona, “Sejarah Singkat Perang Korea”, dalam <https://www.kompasiana.com/dhnzh/5aeb066bab12ae483d688e93/sejarah-singkat-perang-korea?page=2>. [Diakses 08 Januari 2021]
- Reuters Staff, “Study shows high cost of German reunification: report”, dalam <https://www.reuters.com/article/us-germany-wall-idUSTRE5A613B20091107>. [Diakses 24 Januari 2021]
- Seo, Ji Eun, “Unification may be jackpot: Park”, dalam <https://koreajoongangdaily.joins.com/2014/01/06/politics/Unification-may-be-jackpot-Park/2983129.html>. [Diakses 22 Januari 2021]
- Shin, Yong Bae, “Full text of Park's speech on N. Korea”, dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140328001400> [Diakses 22 Agustus 2020]
- Smith, Nicola, Chris Graham, dan Gareth Davies, “Kim Jong-un and Moon Jae-in commit to Korean 'peace regime' to end nuclear conflict at historic summit”, dalam <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/27/kim-jong-un->

becomes-first-north-korean-leader-cross-south-65/. [Diakses 10 Januari 2021]

Snyder, Scott, “Back to square one for inter-Korean relations”, dalam <https://www.eastasiaforum.org/2020/06/23/back-to-square-one-for-inter-korean-relations/>. [Diakses 12 Januari 2021]

Stiles, Matt, dan Noah Bierman, “North and South Korean leaders hold surprise meeting in DMZ to get U.S. summit back on track”, dalam <https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-north-and-south-korea-surprise-summit-20180526-story.html>. [Diakses 11 Januari 2021]

Teo, Sarah, “South Korea’s Foreign Policy in 2013: Building Trust in East Asia”, dalam <https://www.e-ir.info/2014/02/06/south-koreas-foreign-policy-in-2013-building-trust-in-east-asia/>. [Diakses 23 Februari 2021]

VOA News, “N. Korea Rejects Idea of Peace Treaty in Exchange for Denuclearization”, dalam <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/n-korea-rejects-idea-peace-treaty-exchange-denuclearization>. [Diakses 25 Januari 2021]

Wang, Son Taek, “One year since the Pyongyang Declaration: how inter-Korean relations went sour”, dalam <https://www.nknews.org/2019/09/one-year-since-the-pyongyang-declaration-how-inter-korean-relations-went-sour/>. [Diakses 12 Januari 2021]

Weaver, Matthew, “Korea summit: Trump hails 'end of the Korean war' - as it happened”, dalam <https://www.theguardian.com/world/live/2018/apr/27/north-and-south-korea-summit-leaders-prepare-for-historic-inter-korean-meeting-live>. [Diakses 10 Januari 2021]

Wertz, Daniel, “Inter-Korean Relations”, dalam <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations>. [Diakses 06 Januari 2021]

Widhyani, Miza, “Negara-negara yang menganut ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan pancasila”, dalam https://www.academia.edu/34647698/NEGARA_NEGARA_YANG_MENGANUT_IDEOLOGI_LIBERALISME_KOMUNISME_SOSIALISME_DAN_PANCASILA. [Diakses 22 Januari 2021]

Yun, Byung-se, “Park Geun-hye's Trustpolitik: A New Framework for South Korea's Foreign Policy”, dalam https://globalasia.org/v8no3/cover/park-geun-hyes-trustpolitik-a-new-framework-for-south-koreas-foreign-policy_yun-byung-se. [Diakses 20 Agustus 2020]

BIODATA SINGKAT

Full name : Nadia Syafira
Place/Date of birth : Jakarta, 2nd of April 1999
Gender : Female
Nationality : Indonesia
Phone Number : +62 852 4357 6832
E-mail : nadiafira02@gmail.com, nadiafira0299@gmail.com
Address : Jl. Buaran II dalam I, RT. 009 / RW. 013, kel. Klender,
kec. Duren Sawit, kota Jakarta Timur, 13470.

Formal Education

1. 2005 – 2008 : SD Negeri 22 Klender – Jakarta
2. 2008 – 2011 : SD Negeri 05 Ambon – Maluku
3. 2011 – 2014 : SMP Negeri 2 Ambon – Maluku
4. 2014 – 2017 : SMA Negeri 1 Ambon – Maluku
5. 2017 – 2021 : Department of International Relations – FISIP
Jayabaya University – Jakarta

Organizational Experience

1. 2018 – 2019 : Head Division of Jayabaya University International
Relations Students Association (IRSA) Academic
Division
2. 2018 – 2019 : Vice President of Foreign Policy Community Of Indonesia
Chapter Jayabaya
3. 2019 – 2020 : Head Division of Jayabaya University International
Relations Students Association (IRSA) Academic
Division
4. 2019 – 2020 : President of Foreign Policy Community Of Indonesia
Chapter Jayabaya

Activities and Voluntarism

• 2018

- Participated as a Delegate in the Conference of Indonesian Diaspora Youth 2018
- Participated and Won “Best Delegate” title in Jayabaya Short Diplomatic Course (SDC) 2018 held by Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Jayabaya
- Participated in Journalistic Seminar and Workshop 2018 held by Universitas Negeri Jakarta English Literature Student Association
- Volunteered as the ‘Booth & Registration’ position in Conference on Indonesia Foreign Policy 2018 event held by Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)
- Project Officer of Model United Nations and English Club class 2018 held by HIMAHI Jayabaya

• 2019

- Project Officer of Study Excursion Thailand Edition 2019 held by HIMAHI Jayabaya in Bangkok and Pattaya, Thailand
- Chaired in Jayabaya Short Diplomatic Course (SDC) 2019 held by HIMAHI Jayabaya
- Volunteered as a Liaison Officer in Indonesia International Smart City Exhibition 2019
- Volunteered as an Usher in Indonesia Color Run Festival 2019
- Volunteered as an Usher in one of Teater Koma Indonesia Projects 2019
- Volunteered as a Talent Coordinator in one of Teater Keliling Indonesia Projects 2019
- Project Officer of Political Discussion Event 2019 held by HIMAHI Jayabaya

• 2020

- Project Officer of Online Discussion Event 2020 held by HIMAHI Jayabaya
- Participated in Global Town Hall Event 2020 held by FPCI

Personal skill

- Language : Indonesia (native), English (advanced), Korean (elementary)
- Programs : Ms. Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Illustrator